

Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045

Peran Kelas Menengah Terhadap Demokrasi



Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045

Peran Kelas Menengah Terhadap Demokrasi

Penulis

Baginda Muda Bangsa

Jessica Arreta

Asisten Penulis

Katherine Viella Irwanto

Muhammad Zaidan

LABORATORIUM INDONESIA 2045

2025

Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045: Peran Kelas Menengah terhadap Demokrasi

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45)

Cetakan Pertama, Agustus 2025

E-ISBN: 978-623-88635-7-0

Tim Penulis

Baginda Muda Bangsa
Jessica Arreta

Asisten Penulis

Katherine Viella Irwanto
Muhammad Zaidan

Mitra Bestari

Makmur Keliat
Teguh Dartanto
I Dewa Gede Karma Wisana

Penyelaras Akhir

Muhammad Ilham

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham
Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Bangsa, Baginda Muda, et. al. 2025. "Refleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045: Peran Kelas Menengah terhadap Demokrasi". LAB 45 Monograf. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi kajian akademik ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabas Hankam No. T65
Bambu Apus, Cilangkap
Jakarta Timur
+62811452045
lab45@lab45.id

Kata Pengantar

Kita kerap meyakini bahwa kelas menengah adalah harapan bagi demokrasi. **Asumsi ini dilandasi oleh keyakinan bahwa mereka memiliki tingkat pendidikan yang memadai untuk memahami hak-hak sipil, serta kemampuan ekonomi untuk menyuarakan aspirasi tanpa dibayangi ketakutan akan kesulitan hidup.** Namun, sejarah menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Di banyak negara pascakolonial, termasuk Indonesia, kelas menengah justru seringkali tumbuh di bawah bayang-bayang kekuasaan negara. **Mereka tidak sepenuhnya mandiri dan tidak memiliki jarak yang cukup untuk melakukan gugatan terhadap tatanan yang ada.** Dalam ruang yang diselimuti imajinasi bahwa negara adalah penyelamat, aspirasi politik seringkali diredam oleh kenyamanan, dan keberanian dikalahkan oleh ketergantungan.

Indonesia, dengan segala capaian ekonominya, belum memiliki basis kelas menengah pro-demokrasi yang kokoh. **Kelompok kritis—mereka yang mandiri secara ekonomi dan berani menyuarakan kepentingan publik—selalu muncul dalam jumlah terbatas, meskipun dampaknya seringkali melampaui kuantitasnya.** Kini, kita memasuki era baru di mana generasi Z dan Alpha hadir dengan membawa harapan. Mereka tumbuh di tengah dunia yang bising akan informasi, penuh distraksi, dan rapuh secara struktural. Namun, justru di tengah kompleksitas inilah demokrasi membutuhkan keberanian baru yang tidak datang dari elite, **melainkan dari mereka yang berani menggugat dan mempertanyakan kondisi yang belum ideal.**

Masa depan Indonesia terletak di tangan generasi baru, dan sinisme terhadap mereka bukanlah jalan keluar untuk memperbaiki demokrasi. Mereka harus didukung dengan ruang dan daya untuk menjadi warga negara yang berani dan kritis. Monograf ini diharapkan dapat menjadi salah satu penguat dalam upaya membentuk **demokrat-demokrat baru Indonesia di masa depan.**

Akhir kata, monograf ini adalah sebuah pengingat bahwa demokrasi bukanlah warisan, melainkan kerja tanpa henti yang menuntut komitmen terus-menerus, bahkan saat harapan terasa redup. Atas terwujudnya monograf ini, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, mitra, akademisi, dan tim peneliti yang telah memberikan kontribusi berarti. Semoga karya ini menjadi pemantik bagi lahirnya demokrasi yang lebih berani, kritis, dan berakar pada partisipasi publik yang sejati.

Jakarta, 11 Agustus 2025

Jaleswari Pramodhawardani

Kepala LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan dan Akronim	iii
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	xi
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan	2
Literatur Kelas Menengah: Kesulitan Dalam Menemukan Konsensus	6
Pendekatan Sosial-Ekonomi: Absolut dan Relatif	6
Pendekatan Sosial-Politik: Mencari Titik Temu	8
Kelas Menengah dan Demokrasi: Kelas yang Kontradiktif	10
Metodologi	13
Sejarah Kelas Menengah Indonesia	16
Kelas Menengah Indonesia Orde Lama	16
Kelompok Cendekiawan	16
Konsolidasi Kapitalis yang Gagal	20
Kelas Menengah Orde Baru	23
Korportisme Negara Dalam Ekonomi Orde Baru	23
Mengristalnya Perlawanan Masyarakat: Peran Penting Ornop	27
Refleksi Atas Sejarah Gerakan Kelas Menengah Kritis Indonesia	31
Menyongsong 100 Tahun Indonesia: Kelas Menengah Yang Berdaya?	32
Selayang Pandang Gen Z	33
Gen Z Indonesia	34
Aktivisme Politik Gen Z Indonesia: Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja	38
Tantangan Aktivisme Politik Gen Z Indonesia	39
Skenario Menuju Konsolidasi Demokrasi	46
Pekerjaan Berkualitas Sebagai Fondasi Kelas Menengah Kritis	50
Peran Ganda Pendidikan	60
Penutup	74

Daftar Singkatan dan Akronim

ADB	Asian Development Bank
AI	Artificial Intelligence/Akal Imitasi
AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
Aldera	Aliansi Demokratik Rakyat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
BKK	Badan Koordinasi Kemahasiswaan
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BEM SI	Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia
BNI	Bank Negara Indonesia
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CIPS	Center for Indonesian Policy Studies
Ciptaker	Cipta Kerja
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
CTC	Central Trading Company
DDI	Domestic Direct Investment
DG	Directorate-General
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EU	European Union
EIU	Economist Intelligence Unit
FDI	Foreign Direct Investment
FGD	Focus Group Discussion
FKMY	Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta
FKPR	Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat

FMN	Front Mahasiswa Nasional
Gemhas	Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial
Gen Z	Generasi Z
GVC	Global Value Chain
Gemsos	Gerakan Mahasiswa Sosialis
Gestapu	Gerakan September Tiga Puluh
GMKI	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
GMNI	Gerakan Mahasiswa Nasional
GNI	Gross National Income
GPS	Gerakan Pemuda Sosialis
Golkar	Golongan Karya
GTCI	Global Talent Competitiveness Index
HAM	Hak Asasi Manusia
HDI	Human Development Index
HMI	Himpunan Mahasiswa Islam
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IKADIN	Ikatan Advokat Indonesia
ILO	International Labour Organization
IMF	International Monetary Fund
IMM	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
INFID	International NGO Forum on Indonesian Development
INFIGHT	Indonesia Front for Defense of Human Right
IPKI	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
IPPNU	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
ISAI	Ikatan Arsitek Indonesia
ISEI	Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
ISKA	Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
ISPI	Ikatan Sarjana Politik Indonesia

K/L	Kementerian/Lembaga
K-Pop	Korean Pop
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
Kadin	Kamar Dagang dan Industri
Keppres	Keputusan Presiden
KKN	Korupsi, Kolusi, Nepotisme
KPM	Koninklijke Paketvaart Maatschappij
Lansia	Lanjut Usia
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
Lekhat	Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat
Litbang	Penelitian dan Pengembangan
LMND	Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
LP3ES Lembaga	Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LPHAM	Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia
LPI	Logistics Performance Index
LPPMD	Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Malari	Malapetaka Lima Belas Januari
Manipol	Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MNC	Multinational Corporation
Nasakom	Nasionalisme, Agama, Komunisme
NEET	Not in Education, Employment, or Training
NKK	Normalisasi Kehidupan Kampus
NU	Nahdlatul Ulama
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
Ornop	Organisasi Nonpemerintah

Pakdes	Paket Desember
Pakto	Paket Oktober
Parkindo	Partai Kristen Indonesia
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
Permesta	Perjuangan Rakyat Semesta
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PIJAR	Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi
PIKI	Persatuan Intelektual Kristen Indonesia
PIPHAM	Pusat Informasi dan Pendidikan Hak-hak Asasi Manusia
PISA	Program for International Student Assessment
PKH	Program Keluarga Harapan
PKI	Partai Komunis Indonesia
PMII	Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PPBI	Pusat Perjuangan Buruh Indonesia
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PPP	Public-Private Partnership
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PRRI	Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSII	Partai Syarikat Islam Indonesia
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
R&D	Research and Development

RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDM	Sumber Daya Manusia
Skephi	Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMID	Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SPSI	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
STN	Serikat Tani Indonesia
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
Tritura	Tri Tuntutan Rakyat
UIN	Universitas Islam Negeri
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WEF	World Economic Forum
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Daftar Bagan

Bagan 1. Silang Data PDB per Kapita dan Demokrasi Substantif Indonesia	4
Bagan 2. Lini Masa Peristiwa Nasional dan Global Era Orde Lama	17
Bagan 3. Inflasi dan PDB dalam Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1951–1966	18
Bagan 4. Tren Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1951–1966	19
Bagan 5. Tren Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1961–2000	24
Bagan 6. Lini Masa Peristiwa Utama Ekonomi dan Sosial-Politik Indonesia Era Orde Baru	25
Bagan 7. Jumlah Populasi Indonesia berdasarkan Generasi Tahun 2020	34
Bagan 8. Ketertarikan terhadap Politik	35
Bagan 9. Penilaian terhadap Politik	35
Bagan 10. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Milenial dan Gen Z Indonesia terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024	36
Bagan 11. Hasil Survei Preferensi Bentuk Partisipasi Politik	37
Bagan 12. Hasil Survei Faktor Pendorong Keterlibatan Politik Milenial dan Gen Z Indonesia Tahun 2024	38
Bagan 13. <i>Not in Employment , Education and Training</i> (NEET) Indonesia, Agustus 2024	40

Bagan 14.	
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan berdasarkan Kelompok Umur, Februari 2025	41
Bagan 15.	
<i>Dependency Ratio</i> dan Hasil Proyeksi 2010–2045	42
Bagan 16.	
Perbandingan <i>Global Talent Competitiveness Indeks</i> (GTCI) Indonesia Tahun 2023	42
Bagan 17.	
Kekhawatiran Utama terkait Penggunaan AI	43
Bagan 18.	
Skenario Konsolidasi Demokrasi	46
Bagan 19.	
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia, 2024	51
Bagan 20.	
Jumlah Pekerja Indonesia Menurut Jenis Pekerjaan, 2019–2024)	52
Bagan 21.	
Penilaian Business Ready Indonesia, 2024	54
Bagan 22.	
Komparasi Nilai Infrastruktur dan Pelayaran Internasional dalam <i>Logistics Performance Index</i> (LPI)	55
Bagan 23.	
<i>Political Trilemma of the World Economy</i>	57
Bagan 24.	
Tren HDI Indonesia dan Global	63
Bagan 25.	
Perbandingan Skor HDI Indonesia per Indikator (2023)	63
Bagan 26.	
Tren PISA Indonesia	64
Bagan 27.	
Komparasi Rerata Skor Matematika Berdasarkan Status Sosial Ekonomi	64

Bagan 28. Perbandingan Skor Kemampuan Membaca (PISA 2018) dan Rerata Anggaran Pendidikan per Siswa (Kumulatif)	65
Bagan 29. Perbandingan Anggaran Belanja Pendidikan Indonesia dengan Negara Lain	66
Bagan 30. Realisasi Anggaran Pendidikan per Kabupaten/Kota Tahun 2018	67

Daftar Tabel

Tabel 1. Ringkasan Pengukuran Kelas Menengah	8
Tabel 2. Tema Kajian Literatur	14
Tabel 3. Pengelompokan Ornop Periode Orde Baru	30
Tabel 4. Jumlah Populasi Berdasarkan Kelompok Usia dan Hasil Proyeksi Skenario Kebijakan Optimis	43
Tabel 5. Lintasan Historis Kelas Menengah dan Relasinya terhadap Negara	49
Tabel 6. Transmisi Pendidikan terhadap Partisipasi Sipil	71

Ringkasan Eksekutif

Monograf ini menyadari bahwa pendekatan ekonomi semata dalam memahami kelas menengah tidak cukup menjelaskan keragaman peran politik mereka. Pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan identitas kelas menengah sebagai kelompok homogen berbasis pendapatan atau konsumsi. Karena itu, tulisan ini menggunakan pendekatan simbolik-historis sebagaimana dikemukakan oleh Ariel Heryanto, yang menempatkan kelas menengah sebagai posisi sosial yang terbentuk oleh relasi simbolik, ideologis, dan historis. Pendekatan ini memungkinkan pengenalan terhadap segmen kelas menengah kritis, yaitu mereka yang mandiri secara ekonomi dan/atau aktif dalam partisipasi sipil untuk mendorong demokrasi.

Studi ini menemukan bahwa kelas menengah kritis, termasuk mahasiswa, cendekiawan, jurnalis, dan aktivis secara konsisten berperan dalam momen-momen krusial demokratisasi Indonesia, mulai dari keterlibatan dalam parlemen era Demokrasi Liberal, perlawanan terhadap Demokrasi Terpimpin, hingga konsolidasi gerakan sipil pada akhir Orde Baru. Meskipun jumlah mereka relatif kecil, kekuatan simbolik, jaringan sosial, serta keberanian menghadapi represi menjadikan mereka katalis perubahan. Sebaliknya, kelompok kapitalis pribumi yang sempat didorong negara untuk tumbuh justru gagal memainkan peran politik karena bergantung pada patronase dan tidak memiliki kapasitas organisasi sebagai oposisi.

Menjelang 100 tahun kemerdekaan Indonesia, demografi Gen Z dan generasi setelahnya memiliki signifikansi ekonomi dan politik. Mereka merupakan kelompok usia dengan jumlah terbesar dan akan mendominasi populasi usia kerja. Potensi mereka sebagai kelas menengah kritis baru terbuka lebar, terutama karena memiliki akses pendidikan lebih baik dan literasi digital yang tinggi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan struktural yang dapat melemahkan partisipasi sipil seperti ketidakpastian ekonomi, dominasi pekerjaan informal, dan disrupsi teknologi.

Berdasarkan temuan tersebut, monograf ini menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan bergantung pada terbentuknya kelas menengah kritis baru yang berdaya secara ekonomi dan aktif secara politik. Untuk itu, dua faktor kunci perlu diperkuat:

1. Pekerjaan formal berkualitas, yang tidak hanya menyediakan pendapatan stabil tetapi juga membuka ruang aktualisasi dan keberanian berpolitik.
2. Pendidikan integral, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja tetapi juga menumbuhkan etika kewarganegaraan dan kesadaran demokratis.

Pendahuluan

“Thus it is manifest that the best political community is formed by citizens of the middle class, and that those states are likely to be well-administered in which the middle class is large, and stronger if possible than both the other classes, or at any rate than either singly; for the addition of the middle class turns the scale, and prevents either of the extremes from being dominant” -**Aristotle, Politics**¹

Seymour Martin Lipset dalam tulisannya *Some Social Requisites of Democracy* menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pembangunan ekonomi dan keberlangsungan sistem demokrasi.² Dalam kerangka teori modernisasi, Lipset mengidentifikasi empat indikator utama, yakni tingkat kekayaan, industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan sebagai fondasi yang memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokratis dan institusi politik yang stabil. Lipset berargumen bahwa negara yang lebih makmur cenderung memiliki masyarakat yang terdidik, struktur kelas yang lebih terbuka, dan budaya politik partisipatif yang menjadi prasyarat muncul dan bertahannya demokrasi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan kelas menengah yang besar merupakan manifestasi dari masyarakat yang sejahtera. Lipset menegaskan bahwa pertumbuhan kelas menengah juga diiringi dengan penguatan nilai-nilai moderat, toleransi politik, dan partisipasi sipil yang berkelanjutan. Dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang lebih tinggi, kelas menengah memiliki keleluasaan untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, khususnya pada saat negara mengimplementasikan kebijakan yang dianggap merugikan. Selain itu, mereka cenderung terlibat dalam kelompok-kelompok sukarela yang relatif otonom dari negara. Keterlibatan ini memungkinkan kelas menengah untuk mengambil peran sebagai pelindung demokrasi dari ancaman sentralisasi kekuasaan.

Pemikiran Lipset tentang transformasi sosial-ekonomi yang mendorong demokratisasi memiliki keselarasan historis dengan argumentasi Barrington Moore dalam *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Moore menunjukkan bahwa transformasi ekonomi dari sistem feodal ke kapitalisme membuka ruang bagi kemunculan kelas borjuis non-feodal seperti pedagang, pemilik usaha, dan profesional urban yang tidak bergantung pada aristokrasi atau tatanan agraria lama.³ Kelompok borjuis non-feodal ini memiliki kesamaan karakter dengan kelas menengah yang disebutkan oleh Lipset, yakni mandiri secara ekonomi dan vokal dalam mengadvokasikan kepentingan mereka.

¹ Aristotle, *Politics*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (Batoche Book, 1999), 78.

² Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy,” *American Political Science Review* 53, no. 1 (1959): 75.

³ Barrington Moore menjelaskan bahwa di Inggris transformasi ekonomi ditandai dengan gerakan *enclosure* yang dimulai pada abad ke-15, di mana para pemilik tanah dan sebagian petani melakukan konsolidasi tanah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari perdagangan wol. Di Amerika Serikat, kelas kapitalis di wilayah Utara tumbuh seiring dengan ekspansi pabrik tekstil, rel kereta api, dan produksi baja membutuhkan pasar tenaga kerja yang bebas dan kebijakan pemerintah yang mendukung ekspansi bisnis.

Moore menegaskan bahwa demokrasi liberal hanya muncul ketika kekuatan ekonomi baru—kelas borjuis non-feodal atau dalam tesis Lipset disebut sebagai kelas menengah—menjadi dominan sehingga cukup kuat untuk menantang tatanan feodal.

Dari penjelasan ini, sekilas muncul kesan bahwa pembangunan ekonomi menjadi prasyarat penting lahirnya demokrasi. Kelas Menengah diharapkan menjadi aktor yang secara aktif mendorong terbentuknya pranata-pranata demokratis melalui keterlibatan dalam wacana publik, lembaga sosial, dan advokasi kebijakan. Kelas menengah menjadi elemen vital untuk memastikan agar proses modernisasi ekonomi tidak terjerumus ke dalam otoritarianisme, melainkan terkonsolidasi dalam kerangka demokrasi yang berkelanjutan.

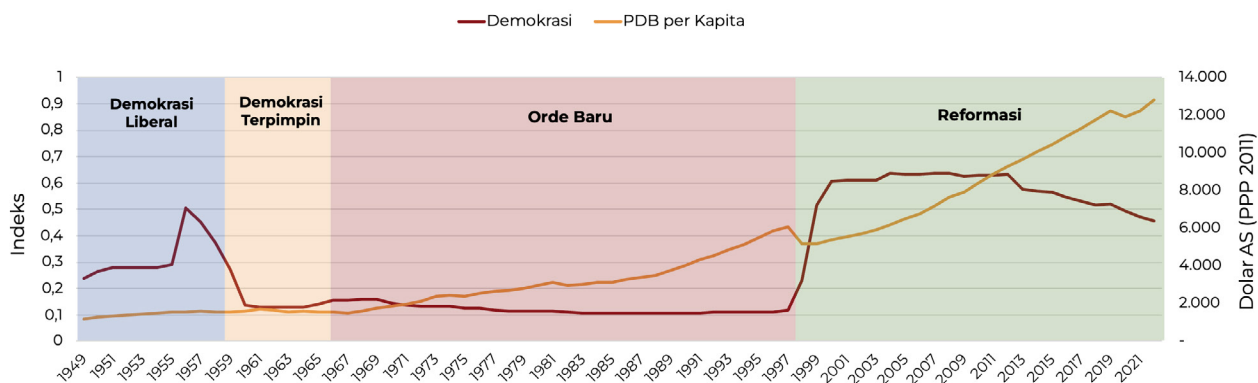
Namun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks negara-negara berkembang yang tergolong dalam gelombang demokratisasi kedua dan ketiga.⁴ Dalam banyak kasus, termasuk di Asia, kelas menengah tumbuh dalam bayang-bayang dominasi negara. Proses kolonisasi yang panjang menghambat modernisasi ekonomi secara organik dan menyebabkan ketergantungan terhadap pembangunan yang didorong oleh negara. Akibatnya, kelas menengah yang muncul bukanlah kelompok yang sepenuhnya otonom, melainkan bagian dari birokrasi atau sektor-sektor yang hidup dari aliran sumber daya negara. Dalam kondisi seperti ini, loyalitas kelas menengah lebih cenderung mengarah pada stabilitas dan kesinambungan negara ketimbang pada perjuangan hak-hak sipil atau demokrasi yang substansial.

Faktor budaya turut memperkuat posisi negara sebagai figur paternalistik yang dihormati dan dijadikan sandaran oleh masyarakat. Dalam konteks budaya politik Asia yang hierarkis, keberpihakan terhadap demokrasi tidak selalu muncul dari kelas menengah, terutama ketika stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga meski kebebasan sipil menyempit.

Fenomena serupa ditemukan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ketika melakukan silang data antara PDB per kapita dan indeks demokrasi, tampak adanya inkonsistensi. Pada masa demokrasi liberal, yang notabene ekonomi Indonesia masih sangat lemah, demokrasi menunjukkan kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan periode setelahnya. Pada Orde Baru, ekonomi mengalami peningkatan, tetapi demokrasi terpuruk, sebelum akhirnya meningkat pada tahun 1998 atas desakan masyarakat sipil, termasuk di dalamnya kelas menengah. Pada era reformasi, ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, akan tetapi kualitas demokrasi turun memasuki tahun 2014, yang berlanjut hingga saat ini.

⁴ Bryn Rosenfeld, *The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces The Demand for Democracy* (Princeton University Press, 2021), 24.

Bagan 1. Silang Data PDB per Kapita dan Demokrasi Substantif Indonesia⁵



Kondisi ini menunjukkan bahwa tesis Lipset tentang linearitas pembangunan ekonomi dan demokrasi tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Hal ini terlihat dari inkonsistensi hubungan keduanya. Namun demikian, di tengah kontradiksi ini, kelas menengah selalu memiliki andil dalam periode kritis demokrasi Indonesia (transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan dari Orde Baru menuju reformasi). Dalam setiap periode, selalu dapat diidentifikasi kelompok kelas menengah “kritis” yang cukup mandiri secara ekonomi dan/atau melakukan partisipasi politik aktif. Segmen kelas menengah kritis ini terwakilkan melalui keberadaan kelompok seperti intelektual/cendekiawan, aktivis mahasiswa, aktivis organisasi nonpemerintah (ornop), dan pers.

Dewasa ini, narasi aktivisme kelas menengah kembali mengemuka seiring dengan resistensi yang disuarakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, yang mewujud dalam bentuk demonstrasi peringatan “Indonesia Darurat” dan “Indonesia Gelap”. Meskipun gerakan perlawanan tersebut dapat menjadi api harapan bagi perbaikan demokrasi, sejumlah penurunan kondisi ekonomi berpotensi melemahkan konsolidasi kelas menengah dan gerakan prodemokrasi. Fenomena deindustrialisasi prematur, pelemahan daya beli, dan sulitnya lapangan pekerjaan menjadi momok bagi kelas menengah.

Pada saat yang sama, Indonesia juga sedang mengalami transisi demografi. Generasi Z (Gen Z), generasi Alpha (Gen Alpha), dan generasi setelahnya akan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan garda penjaga demokrasi pada masa mendatang. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik Gen Z masih sangat terbatas dan didominasi oleh partisipasi elektoral.⁶ Meskipun di dalam beberapa demonstrasi masa seperti penolakan Cipta Kerja, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dapat ditemukan keikutsertaan Gen Z, tetapi partisipasi aktif non-elektoral baru dilakukan oleh segelintir kelompok.

⁵ Diolah dari World Bank, “GDP per Capita, PPP (Constant 2021 Internasional \$) - Indonesia,” diakses pada Juni 2025, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=ID>; Varieties of Democracy, “The V-Dem Dataset,” diakses pada Juni 2025, <https://www.v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/>.

⁶ Katadata Insight Center, *Temuan Survei Nasional: Politik di Mata Anak Muda* (Katadata Insight Center, 2023), 14.

Keberadaan segelintir kelompok ini saja tidaklah cukup untuk secara konsisten menguatkan demokrasi. Ditambah lagi, situasi ekonomi yang tidak menentu pada masa depan, disertai dengan disrupsi teknologi berpotensi melemahkan gerakan pro demokrasi yang sudah ada. Di tengah realita yang tidak mudah ini, sulit membayangkan Indonesia untuk memiliki basis kelas menengah baru yang besar, kritis, dan peduli terhadap keberlanjutan demokrasi tanpa upaya perbaikan strategis yang terarah

Beranjak dari penjelasan di atas, maka monograf ini mencoba untuk fokus mencermati keberadaan dan peran dari kelompok kelas menengah pro demokrasi yang dalam tulisan ini disebut sebagai kelas menengah “kritis”. Kemudian, tulisan ini juga mencoba menganalisis faktor yang dapat menguatkan dan memperbesar jumlah kelas menengah kritis yang berasal dari Gen Z dan generasi baru setelahnya. Untuk itu, monograf ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yakni:

1. Bagaimana peran kelas menengah kritis dalam penguatan demokrasi Indonesia semenjak kemerdekaan sampai dengan saat ini?
2. Apa faktor pemungkin (*enabling factor*) yang dapat menguatkan peran kelas menengah untuk konsolidasi demokrasi pada masa depan?

Literatur Kelas Menengah: Tantangan Dalam Mencari Konsensus

Mendefinisikan siapa kelas menengah bukan perkara mudah. Beragam teori dan pendekatan yang digunakan tentang kelas menengah menunjukkan bahwa kelas ini merupakan kategori yang kompleks, sering kali kontekstual, dan rentan terhadap ambiguitas analitis. Oleh karena itu, bagian ini bertujuan untuk membantu memahami pelbagai perdebatan konseptual mengenai kelas menengah, khususnya dalam kajian politik dan demokrasi.

Penjelasan teoritis ini terbagi menjadi dua, yakni pendekatan sosial-ekonomi yang mengidentifikasi kelas menengah berdasarkan indikator ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan, dan konsumsi. Dilanjutkan dengan uraian tentang pendekatan sosial-politik dengan fokus pada kesadaran kelas, orientasi nilai, dan partisipasi politik. Teori-teori yang dijabarkan di bagian ini diharapkan dapat membantu menjernihkan pendefinisian kelas menengah.

Pendekatan Sosial-Ekonomi: Absolut dan Relatif

Menentukan definisi yang utuh dan komprehensif mengenai kelas menengah merupakan tantangan tersendiri. Kendati demikian, sejumlah pendekatan telah digunakan secara luas untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelompok ini, khususnya dalam dimensi sosial-ekonomi. Salah satu pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan kesejahteraan, yang merujuk pada ukuran pendapatan dan konsumsi sebagai indikator utama. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kesederhanaannya dalam mengukur dan mengklasifikasikan kelas menengah secara kuantitatif. Akan tetapi, di balik keseragaman pendekatan tersebut, terdapat perbedaan mendasar dalam standar pengukuran dan argumentasi antar-lembaga.

Setidaknya terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur kondisi ekonomi kelas menengah, yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif. Pendekatan absolut kerap digunakan oleh pelbagai lembaga ekonomi dengan menjadikan tingkat pendapatan atau konsumsi sebagai tolok ukur. Pengukuran ini menggunakan angka nominal yang telah disesuaikan dengan inflasi dan paritas daya beli global (*Purchasing Power Parity/PPP*). Dengan standar yang seragam antarnegara, pendekatan ini mampu membandingkan jumlah kelas menengah secara global yang mengacu pada standar hidup minimum dunia.

Bank Dunia, misalnya, mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok dengan tingkat konsumsi harian antara 7,75 Dolar AS hingga 38 Dolar AS (PPP 2016), yang setara dengan sekitar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan.⁷ Selanjutnya, Asian Development Bank (ADB) menggunakan rentang konsumsi per kapita 2 Dolar AS hingga 20 Dolar AS

⁷ World Bank, *Aspiring Indonesia – Expanding the Middle Class* (The World Bank, 2019), 88.

per hari (PPP 2005) untuk mengidentifikasi kelas menengah di kawasan Asia.⁸ Sementara di tingkat nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kelas menengah berdasarkan pengeluaran sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional,⁹ yang secara rata-rata berkisar antara Rp2,04 juta hingga Rp9,99 juta per rumah tangga per bulan, dengan asumsi garis kemiskinan sebesar Rp582.932 per kapita per bulan.

Sebaliknya, pendekatan relatif menawarkan perspektif yang lebih kontekstual terhadap standar ekonomi suatu negara. Alih-alih mengacu pada angka nominal tertentu, pendekatan ini memosisikan kelas menengah sebagai kelompok yang berada di tengah distribusi pendapatan. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Birdsall et al. memandang kelas menengah sebagai kelompok yang menempati posisi tengah dalam distribusi pendapatan relatif terhadap median pendapatan nasional.¹⁰ Sementara itu, Easterly mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok yang berada dalam rentang persentil ke-20 hingga ke-80 dalam distribusi pendapatan atau konsumsi.¹¹ Dalam hal ini, pendekatan relatif memiliki keunggulan dalam menangkap perbedaan standar hidup antarstatus ekonomi serta mengungkap ketimpangan distribusi kekayaan.

Sebagai ilustrasi, rumah tangga di Indonesia dengan penghasilan Rp6 juta per bulan tergolong kelas menengah secara relatif karena berada di sekitar median pendapatan nasional sebesar 5,2 Dolar AS per hari atau Rp2,75 juta per bulan. Akan tetapi, di negara kaya seperti Luksemburg, nominal tersebut tergolong sebagai kelas bawah karena ambang batas median pendapatan Luksemburg adalah 79,7 Dolar AS per hari atau Rp38,3 juta per bulan. Dengan asumsi menggunakan pengukuran dari berbagai teori sebelumnya, kelas menengah Luksemburg ditetapkan sebagai kelompok dengan pengeluaran lebih kurang Rp28,7 hingga Rp47,8 juta per bulan. Hal ini terjadi karena median pendapatan dan standar hidup negara berpenghasilan atas (*upper income countries*) jauh lebih tinggi dibandingkan negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income country*) seperti Indonesia.

Baik pendekatan absolut maupun relatif memiliki keunggulan masing-masing dan perlu dipertimbangkan secara komplementer dalam penelitian ini. Namun demikian, hanya bergantung murni pada ukuran sosial-ekonomi berisiko menyederhanakan kelas menengah sebagai entitas yang homogen. Padahal di dalam kajian ini, kelas menengah hendak diulas dan dilihat sebagai kelompok yang kompleks, berlapis, dan kontekstual. Ukuran-ukuran statistik sosial-ekonomi belum bisa menjangkau aspek ideologis, relasi

⁸ Asian Development Bank, *The Rise of Asia's Middle Class* (ADB, 2010), 3.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS," Siaran Pers, 2 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>.

¹⁰ Nancy Birdsall et al., "Stuck In The Tunnel: Is Globalisation Muddling The Middle Class?" Working Paper 14 (Centre on Social and Economic Dynamics, 2000), 3; OECD, *Latin American Economic Outlook 2011: How Middle-Class Is Latin America* (OECD Publishing, 2011), 17.

¹¹ William Easterly, "The Middle Class Consensus and Economic Development," *Journal of Economic Growth* 6, no. 4 (2001), dikutip dari World Bank, *Aspiring Indonesia*, 203.

antarkelas, orientasi politik, serta kapasitas kelas menengah dalam memobilisasi gerakan sosial. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan mengulas posisi kelas menengah dalam kerangka teori sosial-politik yang lebih luas, yang akan langsung dikaitkan dengan perannya terhadap demokrasi.

Tabel 1. Ringkasan Pengukuran Kelas Menengah

Sumber	Pendekatan	Pengukuran Kelas Menengah
Bank Dunia	Absolut	Konsumsi per kapita sebesar 7,75 Dolar AS hingga 38 Dolar AS per hari, atau sekitar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan
ADB	Absolut	Konsumsi per kapita sebesar 2 Dolar AS hingga 20 Dolar AS per hari (PPP 2005), dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kelas menengah-bawah: 2-4 Dolar AS • Kelas menengah: 4-10 Dolar AS • Kelas menengah-atas: 10-20 Dolar AS
Badan Pusat Statistik (BPS)	Absolut	Level pengeluaran berada pada rentang 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional. Mengacu pada GK sebesar Rp583.000, maka kelas menengah dimaksud sebagai kelompok dengan pengeluaran Rp2,04 juta hingga Rp9,99 juta per bulan per rumah tangga (asumsi satu rumah tangga memiliki 4 anggota)
OECD	Relatif	50 persen hingga 150 persen dari median pendapatan nasional per kapita
Easterly	Relatif	Persentil ke-20 hingga ke-80 dalam distribusi pendapatan atau konsumsi
Birdsall, Graham, dan Petinatto	Relatif	75 persen hingga 125 persen dari median pendapatan nasional

Pendekatan Sosial-Politik: Mencari Titik Temu

Pemahaman terhadap kelas menengah tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial dan politik yang membentuknya. Seperti dikemukakan oleh Ariel Heryanto, kelas menengah pada dasarnya adalah konstruksi konseptual yang diperdebatkan—ia bukan entitas tetap yang dapat didefinisikan secara empirik dan objektif, melainkan suatu posisi dalam struktur sosial yang bersifat simbolik, ideologis, dan historis.¹² Heryanto menekankan bahwa meskipun indikator kuantitatif seperti pendapatan, pendidikan, atau gaya hidup dapat memberikan gambaran tentang keberadaan kelas menengah, indikator tersebut sering kali menyesatkan jika dijadikan dasar tunggal untuk memahami watak dan peran sosial-politik mereka.

Sebelum membahas lebih banyak mengenai teorisasi kelas menengah, perlu untuk menjelaskan pemikiran Karl Marx dan Max Weber dalam analisis kelas, walaupun

¹² Ariel Heryanto, "Public Intellectuals, Media and Democratization: Cultural Politics of the Middle Classes in Indonesia," dalam *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*, disunting oleh Ariel Heryanto dan Sumit K. Mandal (RoutledgeCurzon, 2003), 27.

dengan sederhana. Marx memiliki analisis yang deterministik dalam melihat relasi politik antarkelas, yang ia gambarkan selalu penuh ketegangan dan bersifat eksploitatif. Dalam kerangka tersebut, maka Marx menyebutkan hanya ada dua kelas sosial, yakni mereka yang memiliki modal produksi atau kelas pemodal dan mereka yang tidak memiliki modal produksi atau kelas pekerja.¹³ Konsekuensi disiplin kerangka berpikir ini adalah tidak adanya unit analisis yang digunakan untuk menjelaskan mereka yang berada di “tengah.” Menurut Marx, mereka yang belum masuk ke dalam dua kelompok tadi, secara perlahan akan terdesak dan bergabung ke dalam salah satu dari dua kelas utama ini.

Weber memiliki cara pandang berbeda dalam melihat kelas sosial. Menurutnya, kelas sosial tidak terbatas dalam dua atau tiga kelas saja, tetapi ia jamak. Menurut Weber pembentukan kelas tidak hanya ditentukan oleh penguasaan alat produksi, tetapi juga kegiatan konsumtif, status sosial, dan prestise.¹⁴ Sehingga tidak hanya berpusat kepada aspek ekonomi, tetapi juga politik dan budaya. Kerangka analisis ini dinilai lebih mampu menggambarkan situasi empiris di masyarakat di mana banyak hal yang serba tanggung dan kontradiktif.

Dari penjabaran sederhana ini, maka tampak perbedaan antara Marx yang menekankan pada pertentangan antara kelas yang dikotomis berdasarkan kepemilikan modal produksi, sedangkan Weber yang melihat perbedaan kepentingan atau kemampuan di antara banyak kelas. Sifat dari analisis Marx tersebut, menyulitkan dalam melihat realitas masyarakat yang majemuk. Di sisi lain keluwesan analisis Weber menghadapi tantangan dalam memberikan batasan jelas siapa kelas menengah. Dalam perkembangannya, dua aliran ini mulai saling memengaruhi dan meminjam pendekatan satu sama lain. Aliran Marxian mulai mempertimbangkan aspek-aspek non-ekonomi dan non-produksi dalam analisisnya, sementara Weberian mulai mengakomodasi aspek konflik antara kelas dalam analisisnya.

Erik Olin Wright dapat dikatakan sebagai salah satu ilmuwan yang mencoba “merekonsiliasi” kerangka berpikir Marx dan Weber dengan mengenalkan konsep “posisi kelas kontradiktif”.¹⁵ Konsep ini menggambarkan posisi kelas menengah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori klasik proletariat atau borjuasi. Wright melihat kelas menengah sebagai kelompok yang memiliki sebagian kontrol terhadap proses produksi (misalnya, manajer dan teknokrat), namun tidak memiliki kepemilikan kapital. Posisi ini menempatkan mereka dalam relasi yang ambigu: kadang cenderung berpihak kepada kelas pekerja, kadang justru mengidentifikasi diri dengan kepentingan kelas kapitalis, tergantung konteks historis dan struktur peluang politik yang tersedia.

¹³ Antony Giddens dan David Held, *Classes, Power, and Conflict: Classical and Contemporary Debates*, (The Macmillan Press, 1982), 4.

¹⁴ Giddens dan Held, *Classes, Power, and Conflict*, 60.

¹⁵ Ariel Heryanto, “Kelas Menengah yang Majemuk,” dalam *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*, disunting oleh Hadijaya (Tiara Wacana Yogya, 1999), 7.

Pandangan lainnya dari Bourdieu, Wallerstein, dan Gouldner juga mencoba melakukan analisis kelas menengah dengan menggunakan kerangka Marx dan Weber.¹⁶ Mereka menunjukkan bahwa di dalam kapitalisme modern modal produksi tidak hanya merujuk kepada kepemilikan mesin dan uang. Terdapat bentuk moda produksi lain yang disebut sebagai modal manusiawi, modal simbolik atau kultural. Melalui celah teoritis ini maka kelompok terdidik dan profesional dapat menjadi bagian dari analisis kelas menengah.

Ariel Heryanto menawarkan kerangka analisis yang melihat bahwa dalam sebuah masyarakat terdapat lebih dari satu tata produksi.¹⁷ Di antara tata produksi yang majemuk terdapat tata produksi yang dominan dan menguasai lainnya. Setiap tata produksi menghasilkan dua kelas sosial, yakni kelas atas dan kelas bawah seperti pandangan Marx. Dalam kerangka ini, kelas menengah terdiri dari beberapa kelas atas dari beberapa tata produksi yang kurang dominan.¹⁸

Kelas Menengah dan Demokrasi: Kelas yang Kontradiktif

Dengan memahami kelas menengah sebagai entitas yang tidak homogen dan berada dalam posisi sosial yang kompleks, maka peran politik mereka pun menjadi sangat kontekstual. Literatur mengenai relasi kelas menengah dan demokrasi dapat dikelompokkan ke dalam dua tema besar. Tema pertama mencerminkan optimisme terhadap peran kelas menengah sebagai aktor utama dalam demokratisasi. Tema kedua menunjukkan ambivalensi dan inkonsistensi posisi kelas menengah terhadap proses demokratisasi.

Pada tema pertama, kelompok modernis seperti Lipset, Dahl, dan Huntington menempatkan kelas menengah dalam posisi sentral untuk mendorong pembangunan ekonomi dan membuka pintu menuju demokrasi. Dalam pandangan mereka, pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menyebabkan perubahan dalam struktur kelas sosial yang memperbesar kemungkinan lahir dan bertahannya demokrasi.¹⁹

Sejumlah studi menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan spesialisasi pekerjaan berkorelasi dengan tumbuhnya nilai-nilai demokratis dan kapasitas partisipasi

¹⁶ Heryanto, "Kelas Menengah yang Majemuk," 9.

¹⁷ Karl Marx menawarkan bahwa dalam ekonomi modern hanya ada satu tata produksi yakni tata produksi kapitalisme yang dicirikan pemilikan modal ekonomi. Ariel Haryanto dengan mengadopsi Weberian melihat bahwa kapital tidak hanya tentang modal ekonomi, tetapi juga modal sosial, simbolik, dan lainnya. Sebagai contoh, para cendekiawan bisa diidentifikasi ke dalam tata produksi pengetahuan, di mana ada kelompok cendekiawan yang memiliki kuasa simbolik lebih besar dibandingkan cendekiawan lainnya dikarenakan aspek seperti reputasi dan latar belakang pendidikan.

¹⁸ Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia* (LP3ES, 1993), xiii.

¹⁹ Bryn Rosenfeld, *The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces The Demand for Democracy* (Princeton University Press, 2021), 13; Samuel P Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (University of Oklahoma Press, 1991), 69.

politik yang lebih efektif.²⁰ Pendidikan dipandang berperan dalam memperkuat efikasi politik, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi-institusi politik, serta meningkatkan komitmen terhadap nilai-nilai seperti toleransi, kebebasan, dan demokrasi. Selain itu, perubahan dalam dunia kerja dianggap memiliki implikasi politik yang signifikan, terutama ketika jenis pekerjaan yang menuntut kemandirian berpikir dan memberikan keterampilan yang relevan bagi aktivisme politik menjadi semakin dominan dalam pasar tenaga kerja.

Kelompok teori distribusi ekonomi seperti Carles Boix, Acemoglu dan Robinson juga meyakini bahwa kelas menengah memiliki peran vital dalam mendorong terbentuknya demokrasi, meskipun peran tersebut tidak selalu linier seperti yang diuraikan oleh kelompok modernis.²¹ Ketika proporsi kelas menengah masih kecil dibandingkan dengan populasi bawah, maka mereka cenderung bertahan dengan sistem yang represif, berkoalisi dengan elite, dan menentang perluasan hak-hak politik. Konservatisme ini disebabkan oleh kekhawatiran akan kehilangan aset ekonomi imbas tuntutan distribusi ekonomi kelas bawah.

Ketika kelas menengah tumbuh besar dan memiliki daya tawar ekonomi yang kuat, maka demokrasi menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada harus mengalami kudeta dari kelas bawah atau represi dari kelas atas. Pendekatan ini mengacu pada teori *median voter* yang menempatkan kelas menengah sebagai aktor rasional dalam proses konsolidasi demokrasi. Leventoglu juga menjelaskan bahwa meskipun kelas menengah tidak selalu memicu transisi demokrasi, kehadiran mereka yang makin besar dan sejahtera menjadi prasyarat penting bagi stabilitas demokrasi.²² Dengan kata lain, kelompok distribusi ekonomi mengasumsikan bahwa salah satu pertumbuhan signifikan jumlah kelas menengah adalah prasyarat terbentuknya kekuatan masyarakat yang progresif dalam proses demokratisasi.

Sementara itu, tema kedua mengangkat sisi kontradiktif kelas menengah terhadap demokrasi. Kelompok ini menerangkan bahwa pembangunan ekonomi dan membesarnya kelas menengah tidak semerta-merta membentuk kelas menengah yang prodemokrasi. Sejumlah studi menyebutkan bahwa kelas menengah bisa menjadi kekuatan yang justru mendukung otoritarianisme ketika kepentingan ekonominya dapat terjaga dalam sistem non-demokratis. Bryn Rosenfeld melihat ketergantungan ekonomi terhadap negara sebagai salah satu penyebab mengapa kelas menengah cenderung mempertahankan *status quo*.²³ Fenomena ini banyak terjadi pada negara-

²⁰ Alex Inkeles, "Participant Citizenship in Six Developing Countries," *American Political Science Review* 63, no. 4 (1969): 1132, <https://doi.org/10.2307/1955075>; Lipset, "Some Social Requisites of Democracy," 79.

²¹ Carles Boix, *Democracy and Redistribution*, (Cambridge University Press, 2003), 47; Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Economic Origins of Dictatorship and Democracy* (Cambridge University Press, 2006), 257.

²² Bahar Leventoglu, "Social Mobility, Middle Class, and Political Transitions," *The Journal of Conflict Resolution*, 58, no. 5, (2014): 841, DOI: 10.1177/0022002713478563

²³ Rosenfeld, *The Autocratic Middle Class*, 17.

negara demokrasi gelombang dua dan tiga yang secara politik sedang dalam tahap awal *nation building* pascakolonialisme dan secara ekonomi tergolong sebagai *late industrialize country*.

Dengan konteks politik dan ekonomi yang demikian, negara menjelma menjadi aktor yang sangat dominan. Mengontrol seluruh lini kehidupan masyarakat. Alhasil, kelas menengah tumbuh dengan bergantung kepada naungan negara. Pada kondisi tersebut, kepentingan kelas menengah dan negara seolah tidak bisa diurai. Keberlangsungan negara menjadi cerminan keberlangsungan kelas menengah itu sendiri.

Barrington Moore dan Ralf Dahendrof menjadi salah satu referensi klasik yang menjelaskan bagaimana ketergantungan ekonomi terhadap negara menghambat terjadinya demokrasi di Prancis dan Jerman. Di Prancis, modernisasi ekonomi difasilitasi oleh Kerajaan, sehingga terjadi percampuran antara kepentingan borjuasi dan para bangsawan yang menghambat transisi demokrasi secara utuh.²⁴ Di Jerman, pada masa kepemimpinan Bismarck, negara melakukan industrialisasi secara masif, hasilnya kelas menengah tumbuh dengan sangat bergantung kepada negara dan hampir tidak memiliki aspirasi politik. Ralf Dahendorf menyebutkan bahwa "... pada era yang seharusnya menjadi era keemasan berkembangnya perusahaan swasta dan politik liberal, di Jerman, pengusaha terbesar dan satu-satunya adalah negara itu sendiri".²⁵

Frye, Reuter, dan Szakonyi menuliskan bahwa keberadaan perusahaan dan institusi besar yang bergantung pada dukungan negara cenderung lebih mudah mendapatkan tekanan untuk mendukung kekuasaan yang merongrong demokrasi.²⁶ Diamond menuliskan bahwa penetrasi negara terhadap ekonomi yang sangat dalam telah menghambat tumbuhnya kelompok yang mandiri dan produktif di pelbagai negara Afrika dan Asia.²⁷ Sebaliknya, yang muncul adalah individu yang bergantung kepada rente politik, kedekatan birokrasi untuk kemajuan individual.

²⁴ Barrington Moore, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World* (Beacon Press, 1966), 57.

²⁵ Rosenfeld, *The Autocratic Middle Class*, 21.

²⁶ Timothy Frye, Ora John Reuter & David Szakonyi, "Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace," *World Politics* 66, no. 2 (2014): 196, DOI: 10.1353/wp.2014.0012

²⁷ Larry Diamond, "Economic Development and Democracy Reconsidered," *American Behavioral Scientist*, 35, no. 4-5 (1992): 482, <https://doi.org/10.1177/000276429203500407>.

Metodologi

Pelbagai literatur di atas menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas dalam mendefinisikan kelas menengah baik menggunakan pendekatan sosial-ekonomi berbasis statistik maupun pendekatan sosial-politik. Memahami peran kelas menengah terhadap demokrasi juga bersifat kontekstual dan tidak tunggal. Dalam konteks tersebut, penelitian peran kelas menengah Indonesia terhadap demokrasi harus dilakukan dengan pendekatan yang reflektif dan terbuka terhadap keberagaman posisi, orientasi, serta kondisi sosial-ekonomi yang membentuknya. Kelas menengah tidak bisa diperlakukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai kelompok yang dinamis. Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan oleh Ariel Haryanto untuk melihat kelas menengah tidak hanya dari kepemilikan modal, tetapi juga peran simbolik dinilai sesuai untuk digunakan.

Dengan mempertimbangkan perdebatan dan perkembangan literatur yang ada, serta tujuan dari monograf ini, maka akan dikembangkan definisi kelas menengah yang sekiranya sesuai. **Kelas menengah dalam monograf ini dibatasi definisinya sebagai mereka yang memiliki kemandirian ekonomi dan/atau melakukan partisipasi sipil (*civic engagement*) untuk menguatkan demokrasi.** Untuk memudahkan pembaca, monograf ini akan menggunakan istilah kelas menengah kritis dalam setiap uraiannya.

Analisis yang dilakukan dalam monograf ini menggunakan perancangan skenario yang dikembangkan oleh Richard Heuer dan Randolph Pherson dalam *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*.²⁸ Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi kemungkinan-kemungkinan masa depan secara sistematis dan reflektif berdasarkan data dan dinamika yang sudah terjadi.

Untuk menggunakan metode ini, maka perlu terlebih dahulu ditentukan skenario ideal yang ingin dicapai serta faktor kunci yang memengaruhinya. Setelah itu, kombinasi antara dua faktor kunci (*main drivers*) digambarkan ke dalam matriks 2X2 untuk menjadi panduan analisis. Adapun **skenario ideal** yang ingin dicapai dalam monograf ini adalah **konsolidasi demokrasi** yang ditandai dengan perluasan dan penguatan kelas menengah kritis Indonesia.

Sebelum melakukan analisis pengembangan skenario masa depan, pengerjaan monograf diawali dengan kajian literatur dengan menganalisis buku, jurnal ilmiah, laporan dari institusi kredibel seperti Bank Dunia, OECD, BPS, IDN Research Institute, dan lainnya, serta berita dari media terpercaya. Literatur dipilih berdasarkan beberapa tema sebagai berikut.

²⁸ Richard J. Heur Jr. dan Randolph H. Pherson, *Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis*, (SAGE Publications, 2015), 164.

Tabel 2. Tema Kajian Literatur

No	Tema	Tujuan Penggunaan
1	Definisi kelas menengah	Digunakan untuk memetakan perdebatan definisi dari perspektif sosial-ekonomi dan sosial-politik
2	Peran kelas menengah terhadap demokrasi	Menunjukkan keragaman sikap dan peran kelas menengah terhadap sistem demokrasi
3	Sejarah kelas menengah Indonesia	Digunakan untuk mengidentifikasi siapa dan apa peran kelas menengah Indonesia, khususnya kelas menengah kritis dalam sejarah Indonesia
4	Pembangunan ekonomi dan demokrasi	Menunjukkan keterhubungan antara pembangunan ekonomi, khususnya ketersediaan pekerjaan berkualitas dengan penguatan demokrasi
5	Budaya sipil dan demokrasi	Menunjukkan hubungan antara budaya sipil dan penguatan demokrasi, bagaimana cara menguatkan budaya sipil di masyarakat

Kajian literatur ini menjadi basis pendefinisian kelas menengah, memberikan pemahaman tentang peran kelas menengah kritis dalam lintasan sejarah demokrasi Indonesia, sekaligus membantu identifikasi faktor kunci yang dibutuhkan dalam pengembangan skenario masa depan. Akademisi, aktivis mahasiswa, dan ornop menjadi kelompok yang diidentifikasi sebagai kelas menengah kritis, sekaligus menjadi fokus analisis.²⁹ Terkait dengan poin pengembangan skenario, kajian literatur yang dilakukan mengarah kepada dua konsep yang dijadikan sebagai faktor kunci.

Konsep pertama datang dari Bryn Rosenfeld yang berargumen bahwa kelas menengah akan menjadi agen demokrasi ketika memiliki kemandirian ekonomi yang ditandai dengan kesejahteraan yang tidak bergantung kepada negara.³⁰ Konsep kemandirian ekonomi dipadukan dengan pandangan pendidikan sebagai instrumen untuk menumbuhkan budaya demokrasi seperti yang dikemukakan oleh Amy Gutmann.³¹ Faktor pendidikan tidak hanya dilihat sebagai instrumen untuk memupuk nilai demokrasi, tapi juga sebagai faktor pemungkin dari kemandirian ekonomi. Untuk merangkum peran ganda dari pendidikan, maka digunakan istilah pendidikan integral.

Selain menggunakan telaah literatur, pengumpulan data kuantitatif berbasis data sekunder digunakan untuk mengkaji perkembangan kontemporer kelas menengah, dengan fokus kepada dua faktor kunci yang telah ditentukan sebelumnya: (1) akses terhadap pekerjaan layak dan berkualitas serta (2) terpenuhinya akses serta kualitas

²⁹ Segmen kelas menengah ini dipilih karena tidak hanya sesuai dengan definisi kelas menengah dalam studi ini (memiliki kemandirian ekonomi dan/atau melakukan partisipasi politik), tetapi juga karena peran historis mereka yang konsisten dalam setiap fase penting demokratisasi di Indonesia. Kelompok ini berfungsi sebagai motor ideologis sekaligus jembatan sosial antara kekuasaan dan masyarakat sipil, dengan kekuatan simbolik berupa pengaruh intelektual, jaringan sosial, dan akses terhadap media. Penjelasan ini selaras dengan definisi kelas menengah yang dituliskan pada bagian literatur kelas menengah bahwa pendefinisian kelas menengah tidak hanya didasarkan pada satu tata produksi berbasis ekonomi, tapi juga tata produksi simbolik.

³⁰ Rosenfeld, *The Autocratic Middle Class*, 27.

³¹ Amy Gutmann, *Democratic Education* (Princeton University Press, 1987), 16.

pendidikan integral. Pada faktor pertama, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan perkembangan pekerjaan berkualitas, yang tercermin dari proporsi pekerja formal terhadap keseluruhan tenaga kerja sebagai cerminan kapasitas kelas menengah dalam mengakses pekerjaan stabil, bergaji layak, dan memiliki perlindungan sosial. Sementara pada faktor kedua, data kuantitatif digunakan untuk menjelaskan alokasi anggaran pendidikan dalam struktur APBN, efektivitas pelaksanaan kurikulum pendidikan, serta capaian hasil pembelajaran siswa yang tercermin dari asesmen seperti Programme for International Student Assessment (PISA), untuk memahami bagaimana sistem pendidikan mampu memperkuat kapasitas kritis kelas menengah.

Temuan literatur dan data sekunder dilengkapi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada tujuh pakar dengan komposisi: tiga pakar politik untuk memahami aktivisme politik kelas menengah, termasuk Gen Z; dua pakar ekonomi untuk membahas keterbukaan dan deregulasi ekonomi; dua pakar ekonomi untuk membahas ketenagakerjaan; satu demograf untuk membahas transisi demografi Indonesia. Wawancara mendalam dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dua faktor kunci (pekerjaan berkualitas dan pendidikan integral) yang telah ditentukan dalam menyusun skenario masa depan. Selain itu, wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan tentang langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mencapai skenario ideal.

Dalam melakukan analisis, monograf ini menyadari adanya keterbatasan metodologis. Pertama, kajian ini tidak menggunakan data primer (survei langsung) sebagai basis penelitian. Hal ini membuat kesimpulan kajian hanya didasarkan pada perolehan tinjauan literatur dan analisis data sederhana, dengan interpretasi bergantung pada kualitas sumber sekunder. Kedua, ketiadaan pelaksanaan wawancara, diskusi, maupun observasi lapangan bersama mahasiswa, aktivis, dan ornop yang prodemokrasi. Keterbatasan ini membuat kajian tidak mampu menjelaskan situasi riil berdasarkan perspektif gerakan kelas menengah kritis saat ini.

Sejarah Kelas Menengah Indonesia

Pada bagian metodologi telah disebutkan bahwa ada dua faktor kunci yang dibutuhkan untuk membentuk kelas menengah kritis yang besar dan kuat, yakni kemandirian ekonomi dan pendidikan integral. Untuk mendukung dan menjustifikasi asumsi tersebut, maka menelusuri karakter dari kelas menengah kritis dalam sejarah demokratisasi Indonesia menjadi penting untuk dilakukan.

Selain fokus kepada kelas menengah kritis yang secara spesifik merujuk kepada cendekiawan, aktivis ornonp, dan mahasiswa. Dinamika segmen kelas menengah (definisi yang lebih luas berdasarkan indikator ekonomi) seperti pengusaha, pegawai negeri, militer, dan birokrat juga akan dibahas secara terbatas, untuk memberikan gambaran mengapa sebagian kelas menengah tidak berkembang menjadi kekuatan demokratis

Kelas Menengah Indonesia Orde Lama

Kelompok Cendekiawan dan Mahasiswa

Sebelum 1945, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan rakyat menempatkan intelektual di posisi istimewa. Sebagai lulusan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, mereka menjadi elite yang mampu menjembatani pemerintah dan rakyat setelah kemerdekaan.³² Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), ruang politik terbuka luas dan cendekiawan, yang juga bagian dari kelas menengah, mengisi posisi penting di pemerintahan, parlemen, dan partai politik. Zuhdi mencatat, pada dekade 1950-an, 94 persen menteri dan 91 persen anggota parlemen adalah lulusan pendidikan tinggi dari negara Barat. Dominasi para tidak terlepas dari peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan.³³

Kelas menengah kritis juga hadir di kalangan profesional bisnis dan pers, meski sering mendapat tekanan politik. Beberapa pemimpin serikat dagang dan jurnalis yang dipenjarakan karena alasan politik (*offence of the press*).³⁴ Sementara itu, gerakan mahasiswa pada periode ini masih dalam tahap belum menjadi kekuatan politik yang solid. Selain karena jumlahnya yang masih sedikit, kondisi sosial dan ekonomi yang cukup “baik” dan kedekatan mereka dengan elite politik menyebabkan tidak ada alasan yang cukup bagi mahasiswa untuk menjadi oposisi.³⁵

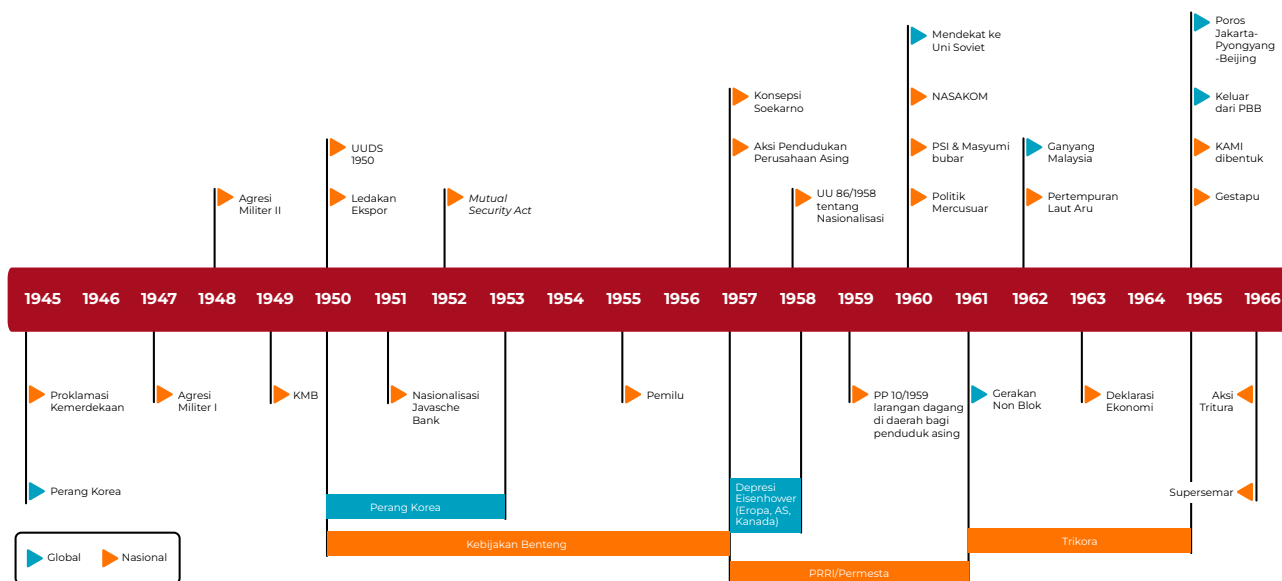
³² Ongkhokham, “Angkatan Muda dalam Sejarah dan Politik,” *Prisma* 12 (1977): 19.

³³ Zuhdi et al., *A Century of Parliamentary Life in Indonesia: History of the House of Representatives of the Republic of Indonesia* (The Secretariat General of the House Representatives of the Republik of Indonesia, 2021).

³⁴ Henk Schulte Nordholdt, “Indonesia in the 1950s: Nation, Modernity, and the Post-Colonial State,” *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 167, no. 4 (2011): 394, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003577>.

³⁵ Burhan D. Magenda, “Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Sistem Politik: Suatu Tinjauan,” *Prisma* 12 (1977): 5.

Bagan 2. Lini Masa Peristiwa Nasional dan Global Era Orde Lama



Peran mahasiswa di dalam perpolitikan terbuka lebar menjelang Pemilihan Umum 1955. Partai politik menyadari potensi mahasiswa sebagai kelompok terdidik yang akan menjadi *future elite*.³⁶ Partai-partai besar melebarkan sayapnya dengan menggandeng mahasiswa melalui pembentukan organisasi sayap partai di kampus. PNI (Partai Nasional Indonesia) mendirikan GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) pada tahun 1954, NU (Nahdlatul Ulama) mendirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), yang kelak pada kemudian hari secara khusus mendirikan PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia), sementara PSI (Partai Sosialis Indonesia) mendirikan GPS (Gerakan Pemuda Sosialis). Seksi Mahasiswa GPS ini pada kemudian hari berdiri sendiri dengan nama Gemsos.³⁷ Jaringan ini kelak mempermudah terbentuknya perlawanan terhadap pemerintahan Soekarno.

Krisis politik pada tahun 1959 membuka jalan bagi Soekarno untuk memusatkan kekuasaannya. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan sistem parlementer dan memulai era Demokrasi Terpimpin.³⁸ Para intelektual politisi dalam Masyumi dan PSI menjadi oposisi Soekarno.³⁹ Aktivisme mereka ditandai oleh advokasi kebijakan dan wacana demokrasi melalui saluran konstitusional, pemboikotan

³⁶ Magenda, "Gerakan Mahasiswa," 5.

³⁷ Air Airlangga Pribadi Kusman, *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era* (Palgrave Macmillan, 2019), 65.

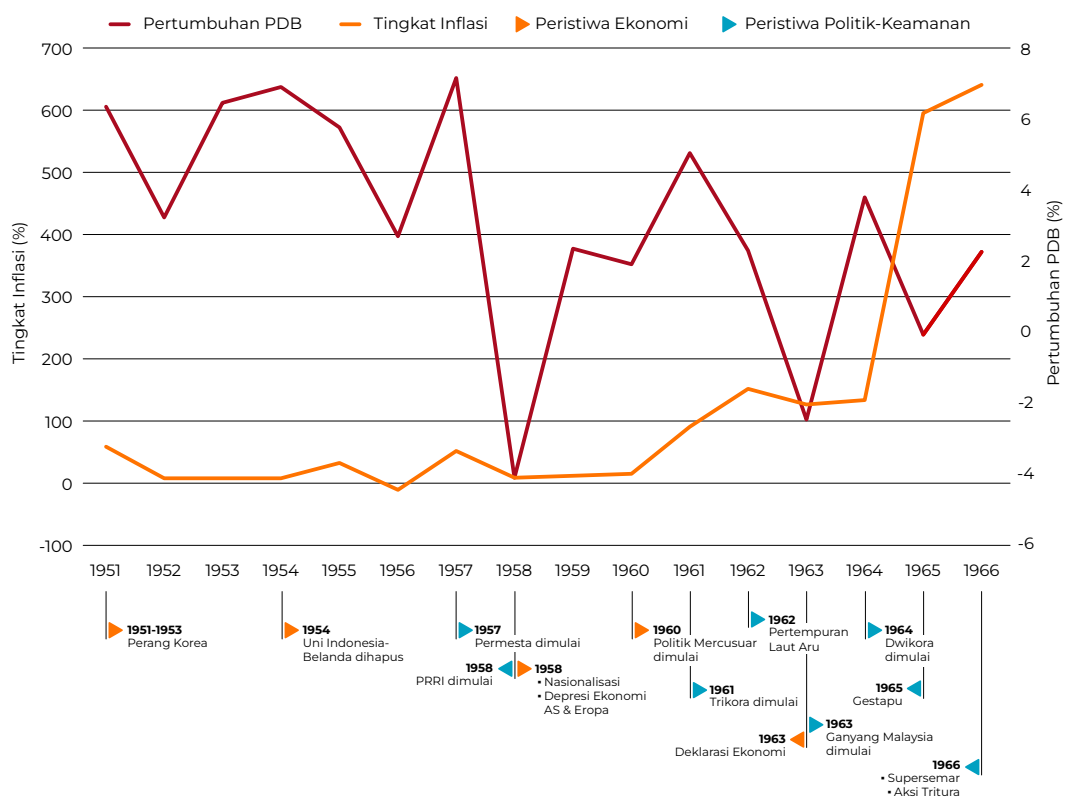
³⁸ Gagasan Demokrasi Terpimpin didukung oleh dua kekuatan besar yakni Partai Komunis Indonesia (PKI) dan militer, khususnya TNI Angkatan Darat (TNI AD). Bagi PKI, sistem ini memberi peluang besar untuk ekspansi politik dalam struktur negara. Sementara bagi militer, dukungan awal terhadap Soekarno dilandasi harapan mendapatkan peran politik yang lebih luas dan formal dalam pemerintahan. Dalam konsolidasi kekuasaan berikutnya, Soekarno memperkuat poros Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), yang memberi ruang besar bagi PKI. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan militer, terutama TNI AD, yang melihat ekspansi PKI sebagai ancaman terhadap otonomi dan kekuasaan mereka. Di kemudian hari TNI berkoalisi dengan kelompok oposisi untuk menurunkan Soekarno dan PKI.

³⁹ Kusman, *The Vortex of Power*, 63.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) oleh Masyumi dan PSI⁴⁰ hingga pemberontakan melalui Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Mereka juga membentuk Liga Demokrasi yang terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi, NU, PSII, IPKI, Partai Katolik, dan PARKINDO sebagai wujud perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan presiden.⁴¹

Namun demikian, strategi ini tidak bertahan lama. Kebijakan represif semakin ekstrem salah satunya ditandai dengan pembubaran Masyumi dan PSI melalui Keppres No. 128 tahun 1961. Akibatnya, banyak cendekiawan yang tergabung di dalam Masyumi dan PSI kehilangan saluran aspirasi politik formal mereka. Pada saat bersamaan, kelompok militer mulai terpinggirkan dan melemah pengaruh politiknya di dalam lingkaran inti kekuasaan Soekarno. Dari dua kelompok yang “tersingkir” ini lahir jaringan oposisi yang semakin luas dan beragam.⁴²

Bagan 3. Inflasi dan PDB dalam Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1951–1966⁴³



⁴⁰ Zaini Muslim Ahmad, "Soekarno's Political Attitude towards the Masjumi Party 1957–1960 as a Learning Resource for History Subjects," *Indonesian Journal of History Education* 2, no. 2 (2017): 28, <https://doi.org/10.15294/ijhe.v2i2.2192>.

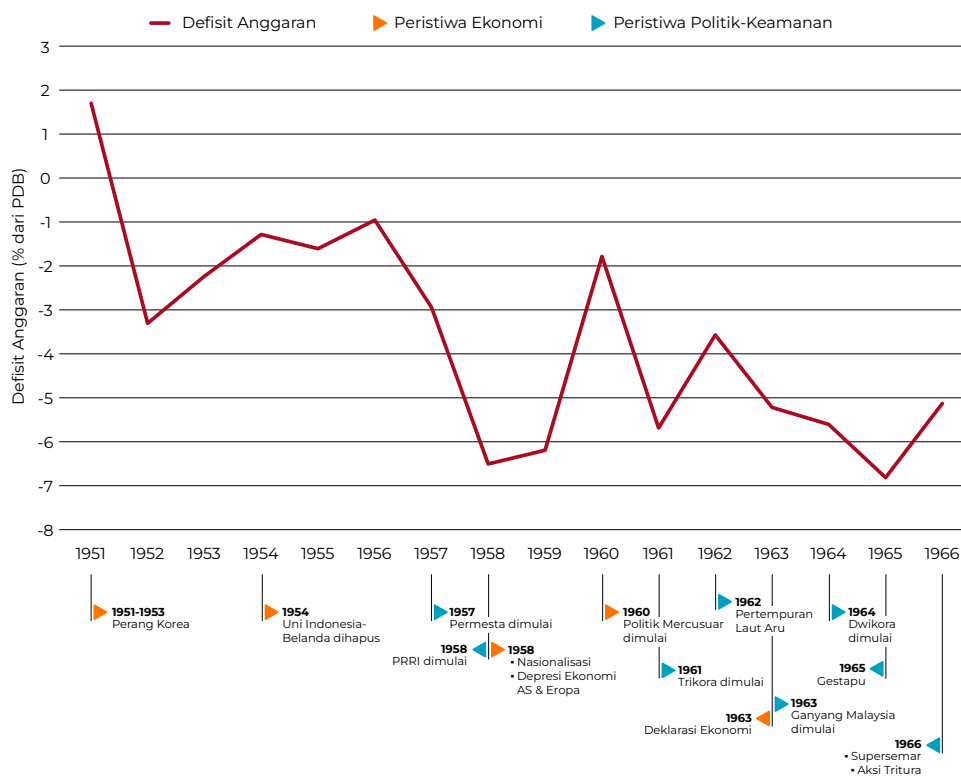
⁴¹ Muhammad Firdaus, *Pembentukan Liga Demokrasi dan Peranannya di Tahun 1960–61* (Skripsi, Universitas Indonesia, 1994), vi.

⁴² Edward Aspinall, *The Broadening Base of Political Opposition in Indonesia* (Routledge, 2013), 176.

⁴³ Diolah dari Wing Thye Woo dan Anwar Nasution, "Political and Economic Instability, 1950–65," dalam *Developing Country Debt and Economic Performance 3: Country Studies – Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, disunting oleh Jeffrey D. Sachs dan Susan M. Collins (University of Chicago Press, 1989), 35.

Tekanan terhadap Soekarno dan rezim Demokrasi Terpimpin semakin kuat manakala kondisi ekonomi Indonesia semakin terperosok. Agenda politik mercusuar, operasi militer, dan penolakan terhadap pelbagai institusi pembangunan dan politik negara Barat menjadi faktor yang memperburuk krisis ekonomi Indonesia. Pada tahun 1963, PDB turun drastis ke minus 2,24 persen. Anggaran belanja pemerintah defisit di angka 63,4 persen atau minus Rp1.565,6 miliar, dan hiperinflasi mencapai 692 persen.⁴⁴ Situasi ini menjadi latar bagi demonstrasi besar tahun 1966.

Bagan 4. Tren Defisit Anggaran Indonesia Tahun 1951-1966⁴⁵



Koalisi oposisi yang terdiri dari mahasiswa, profesional, dan politikus cendekiawan memanfaatkan momentum G30S/PKI (Gestapu) untuk menggencarkan perlawanan terhadap rezim Demokrasi Terpimpin. Para aktivis menyuarakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) dalam demonstrasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Tiga tuntutan tersebut mencakup pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwikora dan unsur-unsur Gestapu, serta perbaikan ekonomi. Ketiganya dapat diinterpretasikan sebagai perwujudan nilai antikomunisme, anti pemerintahan Soekarno yang dianggap tidak kredibel, dan ekspresi frustrasi akibat kondisi sosial-ekonomi yang muram.

Gelombang demonstrasi pertama, pada 12 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Sekretariat Negara untuk memprotes kenaikan harga dan meminta

⁴⁴ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa," *Kompas*, 26 November 2018, <https://jeo.kompas.com/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>; Nibras Nada Nailufar, "Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin," *Kompas*, 09 Maret 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/09/180000469/kondisi-ekonomi-pada-masa-demokrasi-terpimpin>.

⁴⁵ Diolah dari Woo dan Nasution, "Political and Economic Instability," 34–35.

peninjauan kembali atas kebijakan tersebut. Namun demikian, permohonan audiensi delegasi mahasiswa ditolak.⁴⁶ Dengan memanfaatkan jejaring Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan front aksi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), aksi ini terus berlanjut dan justru meluas hingga pelbagai daerah luar pulau Jawa.

Dukungan logistik, bantuan moral, dan finansial mengalir dari mantan tokoh PSI dan Masyumi, serta TNI AD.⁴⁷ Jaringan oposisi yang beragam ini membuktikan efektivitas koalisi antara kelas menengah kritis dan kekuatan struktural dalam menggulingkan rezim. Inilah momentum pertama keberhasilan mobilisasi politik kelas menengah Indonesia dalam memengaruhi arah demokrasi. Kelompok cendekiawan, khususnya, berperan krusial sebagai konsolidator demokrasi pada era ini.

Konsolidasi Kapitalis yang Gagal

Berbeda dengan kelas menengah kritis, kelompok kapitalis Indonesia pada masa Orde Lama gagal terkonsolidasi menjadi kekuatan politik yang mandiri. Sejak awal, mereka terhambat oleh keterbatasan modal, akses ekonomi yang sempit, dan ketergantungan terhadap kebijakan negara. Langkah strategis negara untuk membentuk kapitalis pribumi melalui Kebijakan Benteng (1950–1956) tidak berhasil menciptakan kelas kapitalis yang kuat dan independen. Sementara itu, proses nasionalisasi justru menguntungkan kelompok militer sebagai kelompok bisnis baru.

Pascakemerdekaan, perekonomian nasional Indonesia ditandai dengan ketidakstabilan, kerusakan infrastruktur, beban utang kolonial, serta tingginya biaya upah tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan Belanda. Struktur ekonomi Indonesia pun masih didominasi oleh kapitalis asing, antara lain Belanda, Arab, dan Tiongkok, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun bukan. Sementara itu, kapitalis pribumi berasal dari pedagang kecil dan pemilik usaha keluarga di sektor ritel, dengan sedikit yang mampu naik kelas ke industri manufaktur.

Dari situasi ini, muncul urgensi untuk melakukan nasionalisasi ekonomi. Namun, program nasionalisasi serentak mustahil dilakukan karena dua hambatan utama. Pertama, perjanjian finansial dan ekonomi pada Perjanjian Konferensi Meja Bundar (1949) menyaratkan persetujuan Belanda untuk setiap nasionalisasi perusahaan mereka.⁴⁸ Kedua, nasionalisasi harus disertai kompensasi berbasis nilai riil perusahaan tersebut, yang artinya membutuhkan modal yang besar. Karena itu, golongan pragmatis di kabinet mengadvokasikan Indonesianisasi perusahaan Belanda secara bertahap.⁴⁹

⁴⁶ Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, disunting oleh Stanley dan Aris Santoso (Gagas Media, 2005), 5.

⁴⁷ David Ransom, "Ford Country: Building an Elite for Indonesia," dalam *The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid*, disunting oleh Steve Weissman (Ramparts Press, 1974), 108.

⁴⁸ Howard Dick, Vincent J. H. Houben, J. Thomas Lindblad, dan Thee Kian Wie, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800–2000* (Allen & Unwin, 2002), 171.

⁴⁹ Jasper van de Kerkhof, "Indonesianisasi of Dutch Economic Interests, 1930–1960: The Case of Internatio," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 161, no. 2/3 (2005): 191, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003707>.

Nasionalisasi akhirnya dilakukan terbatas dengan mendahulukan *Herstelbank* untuk menjadi Bank Industri Negara (1951) dan *Javasche Bank* sebagai Bank Indonesia (1953) untuk kedaulatan moneter.

Paralel dengan kebijakan nasionalisasi, pemerintah meluncurkan Kebijakan Benteng (1950–1957). Kebijakan ini bermaksud untuk menguatkan basis kelas menengah baru⁵⁰ dan meyakinkan AS—yang merupakan patron penting saat itu—bahwa Indonesia tetap memberi ruang bagi sistem ekonomi pasar bebas.⁵¹ Dalam praktiknya, Benteng menyokong pebisnis dengan memberi eksklusivitas lisensi impor dan kredit modal melalui Bank Negara Indonesia (BNI) karena sektor impor tidak memerlukan modal yang terlalu besar dan paling mudah untuk dikontrol pemerintah.⁵² Dengan ini, Benteng membantu akumulasi modal pebisnis pribumi untuk memasuki sektor-sektor dagang lain pada masa depan. Hasilnya, kebijakan ini berhasil menyokong pendirian sekitar 4.200 firma, dengan sekitar 40 persen firma dagang dan 33 persen firma manufaktur dimiliki oleh pebisnis pribumi.⁵³

Akan tetapi, Kebijakan Benteng mulai tampak bermasalah karena dukungan yang disalurkan cenderung bersifat patronase yang bergantung kepada kedekatan terhadap elite politik.⁵⁴ Ketergantungan ini menjadikan mereka lebih sebagai penerima manfaat daripada aktor penggerak ekonomi. Penyelewengan *Ali-Baba* juga terjadi, merujuk pada jual-beli lisensi impor kepada pengusaha Cina dan Arab sehingga aktor bisnis yang berkembang tetap didominasi oleh dua kelompok tersebut.⁵⁵ Terlebih lagi, di kalangan politisi PNI, anggaran Benteng kerap disalahgunakan untuk “membeli” kesetiaan terhadap partai.⁵⁶

Imbas dari penyelewengan Program Benteng, kebijakan ini diberhentikan pada tahun 1957. Pada saat yang bersamaan proses nasionalisasi ekonomi dengan pendekatan yang lebih radikal memperoleh momentum. Di level masyarakat, kondisi sosial-politik diwarnai dengan kericuhan. Sentimen anti-Belanda yang meluas pasca Konferensi Asia Afrika (1955) semakin menguat karena ketegangan atas keberlanjutan ekonomi kolonial di Indonesia, serta kekecewaan atas negosiasi Irian Barat.⁵⁷ Puncak kericuhan terjadi

⁵⁰ Thee Kian Wie, *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an* (Penerbit Buku Kompas, 2005), 144.

⁵¹ Dick et al., *The Emergence*, 172.

⁵² Dick et al., *The Emergence*, 192.

⁵³ Anne Booth, *Economic Change*, 135.

⁵⁴ Richard Robison, "The Middle Class and the Bourgeoisie in Indonesia," dalam *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonald's and Middle-Class Revolution*, disunting oleh David Goodman dan Richard Robison (Routledge, 1996), 81.

⁵⁵ Kerkhoff, "Indonesianisasi," 193; Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Equinox Publishing, 2009), 58.

⁵⁶ Remco Raben, "Economic Regimes in the Long Decolonization of Indonesia: The Nexus between State and Business, 1930s–1950s," *Lembaran Sejarah* 10, no. 1 (2013): 54–55.

⁵⁷ Dick et al., *The Emergence*, 184.

pada bulan Desember 1957, meliputi aksi mogok kerja dan pendudukan oleh serikat buruh atas Kantor Pelayaran KPM, bank, pabrik, perkebunan, bahkan kantor-kantor 'Big Five' Belanda.⁵⁸

Di situasi tersebut, militer memainkan peran penting sebagai otoritas yang kuat⁵⁹ dan kawan politik baru Soekarno.⁶⁰ Guna merebut kendali dari serikat buruh, Jenderal Nasution memerintahkan perusahaan-perusahaan yang disita untuk ditempatkan di bawah pengawasan komandan Angkatan Darat setempat dan operasi sehari-hari dilimpahkan kepada personel tentara Indonesia yang memiliki keahlian teknis.⁶¹ Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki legitimasi politik sekaligus sumber daya yang cukup untuk mengambil alih pendudukan perusahaan-perusahaan tersebut. Di antara lebih dari 700 perusahaan asing yang diambil alih,⁶² mayoritasnya berada di bawah kendali militer.

Tindakan pemerintah mengambil alih perusahaan Belanda akhirnya disahkan melalui penerbitan UU 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda berpindah ke tangan badan pengawas milik negara.⁶³ Sejumlah pebisnis berusaha membujuk pemerintah untuk memindahkan beberapa perusahaan ke sektor swasta, tetapi ditolak.⁶⁴ Pada momen ini, alasan pemerintah tidak lagi mengistimewakan kelompok pebisnis salah satunya karena kekecewaan mendalam terhadap penyalahgunaan Kebijakan Benteng. Tidak hanya itu, ada anggapan bahwa mereka terlalu lemah untuk melaksanakan bisnis modern.⁶⁵ Di sisi lain, meskipun kecewa dengan hasil nasionalisasi, pebisnis tidak bisa mengkritik secara vokal karena takut bisnisnya terancam.⁶⁶

Ironinya, pascanasionalisasi, performa perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat diandalkan untuk mendongkrak perekonomian, antara lain karena faktor

⁵⁸ Dick et al., *The Emergence*, 184.

⁵⁹ Sejak pemberlakuan darurat militer tahun 1957, militer memiliki wewenang yang lebih luas karena dapat mengumumkan regulasi, termasuk atas pendudukan properti Belanda dan melarang aksi mogok kerja serikat buruh. Ini memberikan mereka legitimasi untuk mengintervensi kondisi bahaya, termasuk peristiwa pendudukan, dan mengambil alih kontrol.

⁶⁰ Koalisi Soekarno-TNI terbentuk karena kepentingan yang sama. Keduanya merasa terpinggirkan oleh sistem Demokrasi Liberal. Di situasi ini, ada sentimen bahwa mereka berjasa dalam proses kemerdekaan, tetapi tidak diakomodasi oleh sistem. Selengkapnya berdasarkan wawancara bersama Saiful Mujani (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 11 Juli 2025).

⁶¹ Robison, *The Rise of Capital*, 70.

⁶² Nasionalisasi mencakup 90 persen perusahaan produksi dan ekspor agrikultur, 60 persen perusahaan perdagangan luar negeri, dan 246 pabrik dan perusahaan dari industri lain. Selengkapnya dalam Waskito Widi Wardojo, Singgih Tri Sulistiyono, Endang Susilowati, dan Yeti Rochwulaningsih, "Socio-Cultural Responses to The Post-Nationalization of Dutch Companies in 1958-1966," *E3S Web of Conferences* 317 (2021): 3, <http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202131701010>; Robison, *The Rise of Capital*, 72.

⁶³ Dick et al., *The Emergence*, 184.

⁶⁴ Raben, "Economic Regimes," 55.

⁶⁵ Robison, *The Rise of Capital*, 72-73.

⁶⁶ Thee, *Pelaku Berkisah*, 145.

manajemen yang buruk dan modal yang lemah. Pertumbuhan PDB justru merosot ke -4,1 persen pada tahun 1958, salah satunya akibat merosotnya ekspor kala depresi ekonomi melanda Eropa dan AS.⁶⁷ Meskipun kondisi ekonomi berangsur baik, performanya tidak pernah melampaui rata-rata capaian tahun 1951–1957. Bersamaan dengan hal tersebut, defisit anggaran kembali membesar seiring dengan operasi militer pemerintah untuk melawan PRRI/Permesta. Tercatat, pada tahun tersebut, 47 persen dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk pertahanan.⁶⁸ Inflasi nasional tetap fluktuatif dan meningkat tajam sejak tahun 1960-an dari 17,8 persen (1958) ke 135,1 persen (1964),⁶⁹ sementara konflik politik dengan Singapura dan Malaysia menurunkan tingkat ekspor di kala pengeluaran membengkak akibat politik mercusuar Soekarno.⁷⁰

Rangkaian situasi ini menggambarkan ketidakstabilan kondisi ekonomi dan politik yang berimbas kepada gagalnya konsolidasi kelas kapitalis pada masa Orde Lama. Berawal sebagai kelompok yang akan diperkuat, kelompok pebisnis justru berakhir sebagai yang dipinggirkan oleh negara pascakegagalan Benteng. Di sisi lain, momentum nasionalisasi malah menguntungkan militer dan semakin mengecilkan peran pengusaha pribumi. Kegagalan konsolidasi kelas kapitalis pribumi ini menjadi pelajaran penting bahwa akumulasi kapital tanpa kemandirian politik dan kapasitas organisasi tidak cukup untuk menjadikan mereka agen demokrasi. Sebaliknya, ketergantungan terhadap negara justru menjadikan mereka rentan dan mudah terkooptasi dalam sistem politik otoriter.

Kelas Menengah Orde Baru

Korporatisme Negara dalam Ekonomi Orde Baru

Transformasi ekonomi Orde Baru menciptakan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan mendorong ekspansi kelas menengah Indonesia secara signifikan. Melalui pelbagai kebijakan Orde Baru yang bersifat “*pro-growth*”, struktur ekonomi nasional bergeser dari sektor agraris ke sektor manufaktur dan jasa, bahkan berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan rerata 7 persen per tahun.⁷¹ Pertumbuhan ekonomi disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan dari sekitar 70 persen pada pertengahan tahun 1960-an menjadi 11 persen pada tahun 1996.⁷² Lonjakan pendapatan minyak atau *bonanza* minyak selama

⁶⁷ Woo dan Nasution, “Political and Economic Instability,” 34.

⁶⁸ Woo dan Nasution, “Political and Economic Instability,” 39.

⁶⁹ Terdapat sedikit perbedaan dalam perhitungan angka inflasi nasional. Woo dan Nasution (1989) menyatakan inflasi nasional tahun 1964 sebesar 135,3 persen, sementara BPS melaporkan bahwa inflasi di angka 135,1 persen. Selengkapnya dalam Badan Pusat Statistik, *Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka* (Badan Pusat Statistik, 2005,) 215.

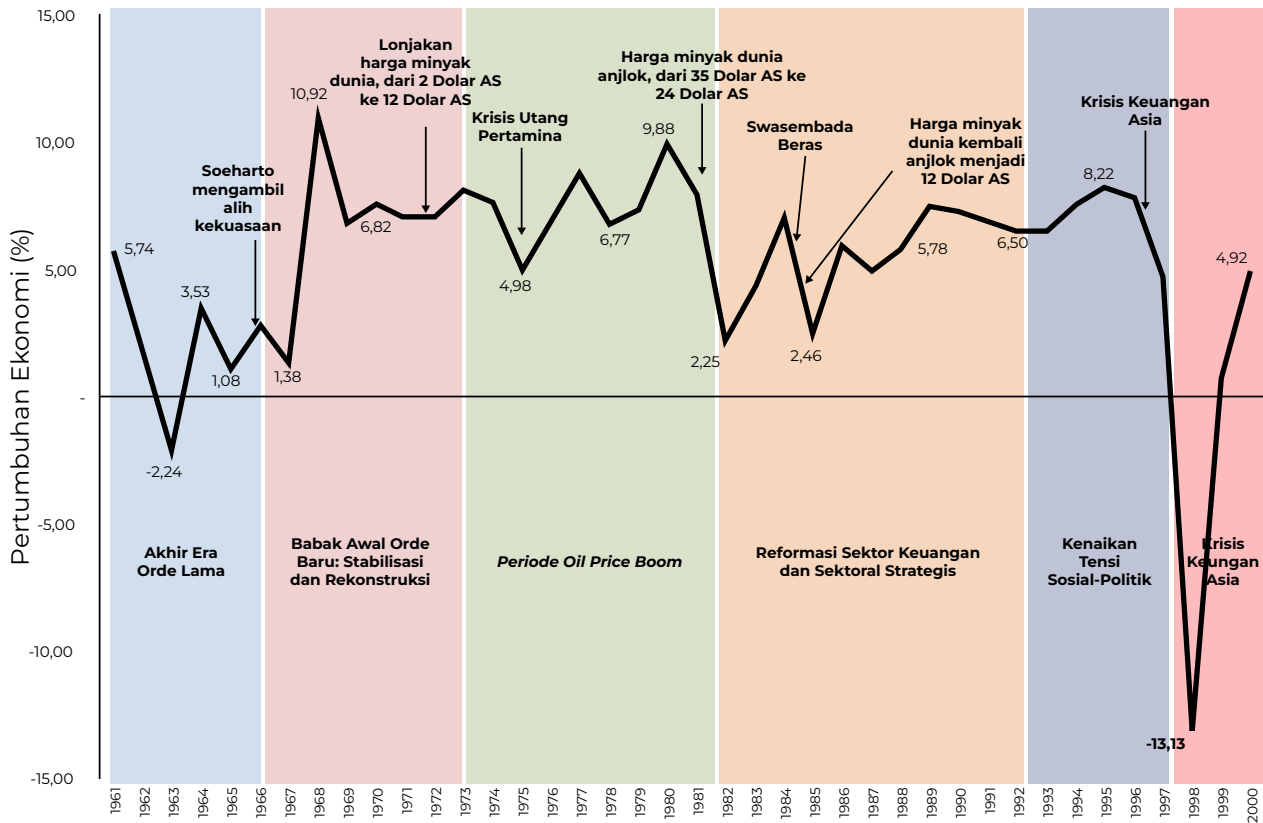
⁷⁰ Woo dan Nasution, “Political and Economic Instability,” 39.

⁷¹ Bert Hofman, Ella Rodrick-Jones, dan Kian Wie Thee, *Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions* (World Bank Report, 2004), 3.

⁷² Hofman et al., *Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions*, 3.

tahun 1970-an memungkinkan pemerintah untuk mendanai pelbagai program pembangunan sosial seperti sekolah instruksi presiden (Inpres) dan perluasan layanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta penciptaan lapangan pekerjaan formal.⁷³ Peningkatan lapangan kerja formal ini turut memperbesar jumlah kelas menengah Indonesia, khususnya di daerah urban.

Bagan 5. Tren Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1961-2000⁷⁴

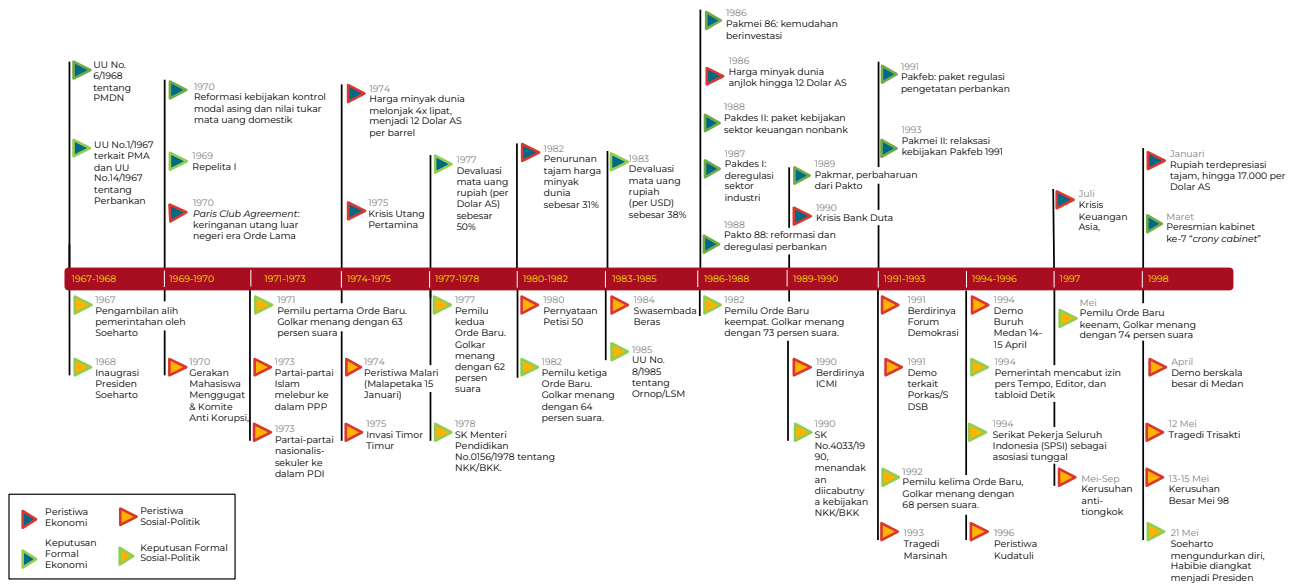


Bersamaan dengan program pembangunan yang dilakukan oleh negara, muncul bentuk baru kelas menengah kritis. Jika pada era sebelumnya kelompok ini lebih terwakili oleh mahasiswa dan cendekiawan, maka pada dekade 1970-an hingga 1990-an lahirlah pelbagai ornop atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memainkan peran penting dalam advokasi hukum, hak asasi manusia, pembangunan desa, hingga demokratisasi. Ornop menjadi kanal baru resistensi sipil yang berkembang di tengah semakin terbatasnya ruang politik formal.

⁷³ Hofman et al., *Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions*, 13.

⁷⁴ Diolah dari World Development Indicator, "GDP per Capita Indonesia," diakses pada Juni 2025, <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>; Hofman et al., *Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions*, 4.

Bagan 6. Lini Masa Peristiwa Utama Ekonomi dan Sosial-Politik Indonesia Era Orde Baru



Namun demikian, pertumbuhan kelas menengah kritis berlangsung dalam lingkup kontrol negara. Pemerintahan Orde Baru menerapkan strategi kooptasi yang disebut oleh para akademisi sebagai praktik korporatisme negara (*state corporatism*), di mana negara berperan dominan dalam mengalokasikan sumber daya melalui birokratisasi yang juga melibatkan militer melalui doktrin dwifungsi. Jabatan strategis dijadikan sumber kekuasaan dan keuntungan pribadi, membentuk kapitalisme birokrat yang terhubung dengan sistem patronase berbasis korupsi terorganisasi dan *rent-seeking*. Rente dari monopoli, lisensi, dan proyek negara dialirkan ke kroni bisnis dan elite militer-birokrat untuk mengamankan loyalitas politik. Soeharto membangun apa yang disebut Ross McLeod sebagai *a better class of corruption*, di mana rente ekonomi tidak hanya memperkaya kalangan elite, tetapi juga menjaga stabilitas politik melalui *"franchise politik"* yang diberikan dari pusat hingga daerah.⁷⁵

Kontrol negara juga dilakukan terhadap asosiasi profesi dan kelompok buruh. Melalui Golongan Karya (Golkar), Orde Baru mendorong asosiasi-asosiasi ini untuk bernaung di bawah pengawasan resmi negara untuk diberikan pembinaan organisasi dan bantuan pendanaan. Asosiasi buruh dimasukkan dalam struktur tunggal seperti SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah ketimbang sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya.⁷⁶ Demikian pula dengan pelbagai organisasi profesi dan pengusaha, seperti Kamar Dagang & Industri (Kadin) yang disokong untuk menjadi wakil tunggal kepentingan bisnis dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diarahkan sedemikian rupa untuk tetap berada dalam garis kebijakan nasional dan tidak menjadi kekuatan

⁷⁵ Ross H. McLeod, "Soeharto's Indonesia: A Better Class of Corruption," *Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform* 7, no. 2 (2000): 99–112.

⁷⁶ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, diterjemahkan oleh Rofik Suhud (Mizan, 1998), 45.

sosial yang otonom.⁷⁷ Dengan cara ini, negara berhasil mengebiri potensi oposisi dari dalam masyarakat sipil melalui kooptasi kelembagaan.

Dari aspek politik, Orde Baru menerapkan kebijakan masa mengambang dan fusi partai politik yang secara sistematis mengubah konstelasi politik nasional. Partai-partai politik dengan identitas ideologis yang kuat dipaksa melebur menjadi hanya tiga kekuatan utama: PPP, Golkar, dan PDI. Kebijakan ini memutus akar ideologis partai dari basis massanya, serta mereduksi politik menjadi alat administrasi kekuasaan. De-ideologisasi ini diperkuat dengan kebijakan masa mengambang, di mana rakyat dilarang melakukan aktivitas politik di luar masa kampanye resmi.⁷⁸ Akibatnya, masyarakat sipil mengalami depolitisasi dan partisipasi politik rakyat seakan terkendali.

Kendati demikian, terdapat perubahan lanskap kekuatan yang kian menekan pengaruh rezim Orde Baru, yang dipicu oleh konflik intra-elite yang berkuasa dan munculnya tekanan-tekanan internasional.⁷⁹ Kohesi internal rezim Orde Baru yang melemah menjadi katalis dari konsolidasi suara oposisi. Dalam konteks ini, elite yang kecewa terhadap rezim Suharto mulai menjalin koneksi dengan kelompok masyarakat sipil—seperti ornop, mahasiswa, dan cendekiawan—yang bergerak dengan isu-isu sosial-politik seperti HAM, kebebasan politik, dan korupsi.

Memasuki tahun 1980-an, fondasi ekonomi Orde Baru mulai bergeser, mendorong negara melepas sebagian kendali ekonomi dan membuka peluang bagi sektor swasta untuk tumbuh. Krisis harga minyak pada tahun 1982 dan 1986 memaksa negara mencari sumber pertumbuhan baru dan mempercepat diversifikasi dan deregulasi ekonomi. Paket Desember 1987 (Pakdes 87) membuka pasar modal bagi investor asing, sedangkan Paket Oktober 1988 (Pakto 88) mempermudah pendirian bank swasta, yang mendorong lonjakan jumlah bank dan penyaluran kredit.

Tekanan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh Orde Baru memaksa negara untuk melonggarkan kendalinya terhadap masyarakat. Sementara itu, perubahan ini juga membuka pintu bagi kelas menengah kritis yang selama ini coba dibendung. Mereka terhimpun di dalam pelbagai ornop yang nantinya akan membangun koalisi demokratis melawan otoritarianisme Orde Baru.

Kelahiran kelompok ini tidak bisa dilepaskan dari dua prasyarat penting: meningkatnya otonomi ekonomi individu melalui pekerjaan profesional, serta meluasnya akses pendidikan tinggi. Kedua faktor ini memungkinkan munculnya kesadaran kritis di kalangan kelas menengah, meski ruang geraknya masih dibatasi oleh kontrol negara. Dengan modal sosial, intelektual, dan jaringan yang mereka miliki, kelas menengah kritis menjadi aktor penting dalam mengawasi dan menantang negara secara strategis,

⁷⁷ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 45.

⁷⁸ Bob Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement* (Routledge, 2003), 84

⁷⁹ Ariel Heryanto, "Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an," dalam *Kelas Menengah Bukan Ratu Adil* (Tiara Wacana Yogya, 1999), 145.

sekalipun belum mampu menandingi kekuatan koersif dan hegemonik Orde Baru.

Mengristalnya Perlawanan Masyarakat: Peran Penting Ornop

Meskipun ornop sering diposisikan sebagai salah satu motor utama demokratisasi Indonesia, kelompok ini sejatinya sangat beragam, khususnya dalam konteks relasi dan sikap mereka terhadap negara. Oleh karena itu, ornop tidak bisa diperlakukan sebagai entitas tunggal prodemokrasi. Dengan jumlah ornop sekitar 3.255 pada tahun 1985 hingga mencapai sekitar 8.720 menjelang akhir Orde Baru, Ornop di Indonesia berkembang dalam spektrum yang luas dan kompleks.⁸⁰

Andres Uhlin, dalam studinya tentang masyarakat sipil di Asia Tenggara, mengusulkan tipologi yang membagi Ornop prodemokrasi Indonesia ke dalam dua kutub utama, yakni moderat dan radikal. Ornop moderat umumnya terdiri dari aktivis 1966 dan sebagian intelektual senior yang mendorong proses transisi demokrasi secara bertahap guna menghindari instabilitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, Ornop radikal lebih banyak diisi oleh generasi baru aktivis mahasiswa dan sebagian aktivis politik yang menyerukan perubahan rezim secara langsung, dengan strategi yang lebih konfrontatif dan artikulatif.

Pada saat saluran penyampaian aspirasi melalui partai politik semakin sempit pascafusi partai politik, para intelektual dan aktivis membentuk ornop sebagai corong alternatif aktivisme mereka. Sebagai contoh adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH)—LBH Jakarta menjadi cikal bakal dibentuknya LBH di daerah lain yang kemudian berhimpun di bawah payung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 1980—yang didirikan atas inisiatif pengacara Adnan Buyung Nasution dengan fokus kepada isu buruh, lingkungan, sengketa tanah, serta hak politik melalui pendidikan dan publikasi hukum.⁸¹ Ornop lain yang juga menonjol dalam menguatkan wacana demokrasi adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, (LP3ES) yang dibentuk pada tahun 1971. LP3ES melakukan produksi pengetahuan dan wacana demokrasi juga melaksanakan proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan, khususnya di pesantren.

Meskipun memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, karakter ornop generasi awal ini cenderung moderat, nonkonfrontatif, eksklusif, dan tidak memiliki basis massa yang kuat. Kebanyakan ornop senior bekerja di dalam aturan rezim rezim berkuasa dengan objektif utama untuk mengubah aturan hukum agar selaras dengan demokrasi. Pemilihan strategi nonkonfrontatif setidaknya dilandasi oleh harapan bahwa Orde Baru akan menepati janji awal untuk membangun negara yang demokratis.⁸² Selain itu, ada kekhawatiran bahwa strategi konfrontatif yang menghimpun masa akan memancing

⁸⁰ Council on Foundations, "Indonesia – Types of Organizations per Juni 2012," *United States International Grantmaking*, diakses pada Mei 2025, https://www.usig.org/countryinfo/indonesia.asp#_end1.

⁸¹ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 102–103.

⁸² Uhlin, *Oposisi Berserak*, 145.

tindakan yang lebih opresif dari negara. Karakter lain dari ornop era 70an adalah tergabungnya mereka di dalam jejaring internasional seperti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang juga ditentang oleh Ornop generasi baru karena dianggap terlalu dekat dengan negara.⁸³

Di tengah tumbuhnya ornop sebagai alternatif saluran aspirasi politik masyarakat semenjak tahun 1970an, aktivis mahasiswa masih tetap menjadi aktor penting melawan otoritarianisme. Gerakan mahasiswa pada periode itu banyak berfokus menentang pembangunan yang bertumpu pada modal asing dan korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya. Salah satu ketegangan besar antara mahasiswa dan pemerintah terjadi pada tahun 1974, pada saat demonstrasi besar-besaran terhadap kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka berubah menjadi kerusuhan massa yang dikenal dengan Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).⁸⁴

Empat tahun pasca-Malari, mahasiswa melakukan demonstrasi atas wacana pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden untuk ketiga kalinya. Untuk membungkam suara kritis mahasiswa, maka pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan pembentukan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK)⁸⁵ untuk mengontrol aktivitas mahasiswa. Kebijakan ini menjadi penanda berakhirnya era kebebasan politik di lingkungan kampus, sekaligus menjadi pemicu hubungan erat aktivis mahasiswa dan ornop pada tahun 1980an.

Lebih lanjut, kelompok elite dan cendekiawan yang sebelumnya merupakan bagian dari pendukung Orde Baru juga mulai berbalik arah melawan pemerintah sejak tahun 1980-an. Mereka meliputi elite (pensiunan jenderal, mantan politisi sipil, unsur prodemokrasi partai politik nonpemerintah), cendekiawan, jurnalis, sastrawan, dan tokoh mahasiswa. "Pembangkangan elite" ini terwujud dalam sebuah catatan tertulis bernama Petisi 50.⁸⁶ Meskipun Petisi 50 secara terbuka mengkritik Soeharto dan Orde Baru, mereka tetap menyalurkan protes melalui mekanisme politik formal seperti pemilu dan lembaga negara, tanpa membangun basis perlawanan di tingkat akar rumput atau menggerakkan masyarakat sipil secara langsung.

Beberapa tokoh dalam anggota Petisi 50 membentuk forum-forum prodemokrasi. Sebagai contoh adalah Forum Pemurnian Kedaulatan Rakyat (FPKR) yang didirikan oleh Letnan H.R. Dharsono, Abdul Madjid (PNI), dan cendekiawan Muslim Deliar Noer pada Agustus 1991, serta Forum Demokrasi yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid kala menjabat ketua NU. Seluruh forum ini memiliki kesamaan strategi aktivisme, yaitu kritik tertulis dan diskusi intelektual. FPKR memiliki strategi yang berbeda karena berupaya

⁸³ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 105.

⁸⁴ BBC News Indonesia, "Pasang surut gerakan mahasiswa dan kebijakan depolitisasi kampus pada masa Orde Baru," *BBC News Indonesia*, diakses 25 Juli 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c20xwgv3xj8o>.

⁸⁵ Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia*, 77-127.

⁸⁶ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 91.

untuk menjangkau dan membangun jejaring dengan masyarakat bawah.⁸⁷

Ornop yang semakin kritis menyoroiti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Orde Baru terasa semakin mengganggu. Soeharto pun merespons dengan menjalankan strategi kooptasi dan depolitisasi. Pada tahun 1985 disahkan Undang-Undang Organisasi Masyarakat No.8/1985 yang mengatur tentang pembinaan organisasi masyarakat di bawah lembaga resmi pemerintah sekaligus hanya mengizinkan Pancasila sebagai haluan ideologi organisasi masyarakat.⁸⁸ Selain itu, pemerintah juga mengenalkan sekaligus mengganti istilah ornop menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar lebih diterima secara politis.⁸⁹

Ketika akses terhadap ekspresi politik semakin sempit, banyak aktivis mahasiswa, intelektual, dan profesional muda dari kelas menengah membangun kanal-kanal baru Ornop, komunitas advokasi, dan media alternatif. Pada akhir tahun 1980an akhir dan 1990an awal menjadi periode lahirnya generasi ornop baru yang radikal dan vokal. Generasi baru prodemokrasi dan hak asasi manusia ini antara lain terhimpun dalam Infight, Pijar, Geni, Lapera, Yayasan Maju Bersama, PIPHAM, Yayasan Perempuan Bebas, Rumpun, Lekhat, Partai Demokratis, dan Aldera. Ornop baru ini biasanya dijalankan oleh lulusan mahasiswa atau aktivis mahasiswa. Mereka tidak hanya membangun jaringan keanggotaan antara mahasiswa di kampus, tapi juga mengembangkan mekanisme untuk menjangkau dan mengorganisir masyarakat kelas bawah termasuk di dalamnya adalah petani dan buruh.⁹⁰ Dalam ruang-ruang ini, terbentuk basis sosial dan jaringan solidaritas baru yang lebih plural dan bersifat lintas kelas.

Jaringan aktivisme yang terbangun sepanjang 1980-an hingga 1990-an antara mahasiswa, elite politik, ornop, dan basis masyarakat yang lebih luas bertransformasi menjadi kekuatan sosial-politik yang mampu mendorong demokrasi dari luar sistem formal. Gerakan perlawanan ini semakin mengristal ketika peristiwa penting seperti pembredelan media, tragedi Trisakti 12 Mei 1998, serta krisis ekonomi tahun 1997 membuka peluang untuk mempercepat delegitimasi kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Mahasiswa memimpin mobilisasi aksi massa di jalanan, ornop mengorganisir advokasi kebijakan dan kampanye HAM, sementara elite politik memberikan kanal legitimasi formal bagi tuntutan perubahan. Peran-peran yang saling melengkapi ini memungkinkan gerakan prodemokrasi mengubah keresahan publik menjadi tekanan politik yang nyata. Dalam konteks ini, ornop menjadi kristalisasi kelas menengah kritis—dengan modal sosial, intelektual, dan jejaring luas—yang berperan strategis dalam membuka ruang demokratisasi yang sebelumnya dikekang oleh otoritarianisme negara.

⁸⁷ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 96.

⁸⁸ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 96.

⁸⁹ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 96.

⁹⁰ Uhlin, *Oposisi Berserak*, 114.

Tabel 3. Pengelompokan Ornop Periode Orde Baru⁹¹

Kategori	Ornop 1970-an	Ornop 1980-an	Ornop 1990-an
Karakter Umum & Strategi	<ul style="list-style-type: none"> Mayoritas Ornop mengambil strategi moderat dan legalistik karena represi Orba sangat kuat (misalnya: LBH, LP3ES) Namun, sudah ada aktor konfrontatif seperti LPHAM dan gerakan mahasiswa radikal 1974–78 yang melawan pembangunanisme dan modal asing 	<ul style="list-style-type: none"> Strategi masih dominan moderat, seperti ditunjukkan oleh Petisi 50 dan Forum Demokrasi yang menyampaikan kritik via surat publik Namun, muncul ekspresi yang lebih populis dan konfrontatif dari mahasiswa seperti FKMY, serta ketegangan internal antara kelompok Islamis, populis, dan kiri 	<ul style="list-style-type: none"> Gelombang baru Ornop lebih vokal, radikal, dan terbuka Gerakan ini sering berakar dari aktivisme kampus 80-an tapi menasar massa luas
Hubungan dengan Negara & Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Relasi Ornop dengan masyarakat lebih representatif daripada partisipatif: mengatasnamakan rakyat miskin tanpa basis massa langsung Namun, mulai ada koneksi struktural, misalnya LBH sebagai penyambung ke gerakan buruh dan sengketa tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Mulai terbentuk kontak antara Ornop dan kelompok terpinggirkan: mahasiswa terhubung dengan petani (Kedung Ombo), media mahasiswa bangkit karena politik kampus dilarang Terdapat batasan pergerakan dari Pemerintah melalui UU No.8/1985 terkait Organisasi Kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> Semakin banyak Ornop yang berbasis atau terhubung langsung ke buruh dan petani: PRD dan jaringannya (SMID, PPBI, STN) adalah contoh nyata penguatan basis sosial Hubungan dengan negara memburuk, ditandai pembredelan dan represi fisik (Pencabutan Izin Pers, PDI 1996)
Jaringan & Aliansi	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan mulai dibangun secara hati-hati. INFID dan LP3ES menjalin kerja sama internasional. Namun ada Ornop seperti LPHAM yang tidak mau berjejaring secara global 	<ul style="list-style-type: none"> Aliansi diperluas ke elite sipil-militer yang kecewa (Petisi 50, Forum Demokrasi). Mahasiswa menjalin kontak antar kampus melalui kelompok studi dan media bawah tanah Akhir 80an, pergerakan mahasiswa berpindah dari Jakarta ke pelbagai kota di daerah, berjejaring dengan kalangan petani dan pekerja industri 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan semakin terstruktur dan lintas sektor: aktivis, mahasiswa, jurnalis, buruh, dan petani (PRD, PIJAR, AJI) saling terhubung Beberapa LSM juga menjalin kerja sama global dan domestik sekaligus

⁹¹ Diolah dari Aspinall, *The Broadening Base*; Uhlin, *Oposisi Berserak*; Billah dan Nusantara, Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya (Prisma, 1988).

<p>Fokus Isu & Aktor Kunci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus isu: hukum, lingkungan, tanah, kejahatan politik • Aktor: Adnan Buyung Nasution (LBH), H.J.C. Princen (LPHAM) dan juga kelompok mahasiswa (1974) dengan kritik terhadap pembangunan Orba dan modal Jepang 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus isu: demokratisasi, HAM, kritik terhadap militerisme dan pembangunan otoriter • Aktor: Ali Sadikin, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Rendra, FKMY, aktivis mahasiswa Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus isu: HAM, demokrasi, kebebasan pers, dan keadilan kelas bawah melalui aksi demonstrasi, pamflet, seminar, dan jaringan internasional • Aktor: Beathor Surjadi, Bonar Naipospos, PRD, AJI, PIPHAM, Geni, Aldera
---	--	---	---

Refleksi Atas Sejarah Gerakan Kelas Menengah Kritis Indonesia

Uraian tentang kelas menengah kritis Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pembelajaran bahwa Indonesia dalam sejarahnya tidak pernah memiliki kelas menengah kritis dengan jumlah besar, meskipun demikian kelompok ini mampu menjadi kekuatan prodemokrasi karena kemampuan membentuk wacana, memproduksi simbol-simbol perubahan, dan berjejaring dengan kelompok masyarakat luas, baik itu kelas bawah maupun elite reformis.

Walaupun dapat menjadi kekuatan untuk menggalang massa, efektivitas gerakan kelas menengah kritis harus dilihat dengan kaca mata kritis. Fragmentasi kepentingan masyarakat secara luas, termasuk di dalam kelas menengah sendiri dan kooptasi negara atau pasar membuat gerakan kritis menjadi rapuh. Berkaca dari proses demokratisasi Indonesia, keberhasilan gerakan kelas menengah kritis cenderung bergantung terhadap momentum “ekstrem” seperti krisis ekonomi dan “restu” elite politik. Hanya dalam situasi ekstrem ini, gerakan kelas menengah kritis dapat menyatukan kepentingan masyarakat.

Refleksi lainnya berkaitan dengan peran negara dalam membentuk basis kelas menengah yang luas. Pengalaman sebagai negara bekas jajahan, menumbuhkan imajinasi kolektif dan kepercayaan yang meletakkan negara sebagai harapan dan solusi atas segala bentuk kegetiran rakyat.⁹² Gagasan ini semakin dominan pada masa Orde Baru dengan mengedepankan konsep negara integralistik.⁹³ Alhasil, terbentuk hubungan organik antara negara dan masyarakat di mana kepentingan negara adalah juga kepentingan masyarakat. Konsekuensinya, tercipta masyarakat yang bergantung kepada negara, yang menghambat tumbuhnya kelas menengah kritis. Beranjak dari hal tersebut, bagian berikutnya mencoba menguraikan aspek yang perlu diperhatikan untuk memberikan ruang lebih luas bagi perkembangan kelas menengah kritis Indonesia pada masa depan.

⁹² Hal ini berbeda dengan pengalaman Eropa yang mengalami pertumpahan darah karena nasionalisme yang menjelma menjadi fasisme. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi prinsip hak asasi dan kontrol masyarakat untuk tumbuh lebih dominan.

⁹³ David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State* (Routledge, 2015), 2

Menyongsong 100 Tahun Indonesia: Kelas Menengah Yang Berdaya?

Pada Bagan 1 dari bagian pendahuluan, monograf ini menerangkan bahwa terdapat inkonsistensi antara narasi pembangunan ekonomi dan kualitas demokrasi Indonesia. Temuan paling signifikan terjadi pada masa Orde Baru, di mana Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, akan tetapi pada saat yang sama indeks demokrasi Indonesia menjadi yang paling rendah selama periode tersebut.

Meskipun demikian, pembangunan ekonomi tetap memiliki implikasi politik terhadap penguatan demokrasi. Pada akhirnya, perluasan akses pendidikan disertai dengan keterbukaan ekonomi turut berkontribusi terhadap kemunculan dan konsolidasi kelas menengah kritis, yang berhasil mendorong reformasi. Di sisi lain, sejarah demokratisasi Indonesia juga menunjukkan keterbatasan dalam efektivitas gerakan kelas menengah kritis yang dipengaruhi oleh hubungan dependensi masyarakat terhadap negara. Realitas tersebut semakin menguatkan argumen dari tulisan ini bahwa untuk memiliki kelas menengah kritis diperlukan fondasi material (ekonomi) dan kultural (pendidikan) yang mengarah kepada penguatan demokrasi.

Berangkat dari temuan historis tersebut, arah pembangunan menuju tahun 2045 perlu secara serius menyiapkan prasyarat ekonomi dan pendidikan yang memadai guna memperbesar basis kelas menengah kritis. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan yang dihadapi Indonesia berupa persoalan ekonomi global yang kian tidak menentu serta disrupsi teknologi yang cepat. Sementara itu, Indonesia juga tengah berada dalam proses transisi demografi. Dalam dua dekade ke depan, struktur penduduk Indonesia akan didominasi oleh generasi baru, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan generasi setelahnya, yang bukan saja akan mengisi ruang-ruang produktif ekonomi, tetapi juga akan memainkan peran sentral dalam arena politik nasional dan daerah.

Gen Z sebagai representasi awal dari generasi baru menjadi kunci penting dalam diskusi ini. Tumbuh dalam ekosistem digital (*digital native*) membuat Gen Z lebih terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, tetapi juga rentan terhadap fragmentasi informasi dan alienasi politik. Mengantisipasi hal ini, strategi pembangunan harus diarahkan pada penguatan pendidikan kritis, pemberdayaan ekonomi yang inklusif, serta perluasan ruang partisipasi yang bermakna menjadi prasyarat mutlak dalam membentuk kelas menengah kritis masa depan yang mampu menjadi penopang utama demokrasi Indonesia.

Selayang Pandang Gen Z

Pada umumnya, Gen Z merujuk pada generasi yang lahir pada rentang tahun 1996 hingga 2012. Kini, posisi mereka semakin strategis dalam lanskap global. McKinsey memproyeksikan bahwa jumlah Gen Z akan mencapai seperempat populasi Asia-Pasifik pada tahun 2025.⁹⁴ Jumlah mereka yang besar menjadikan generasi ini signifikan secara ekonomi dan politik, termasuk dalam perannya menguatkan nilai-nilai demokrasi.

Terkait pandangan politiknya, mayoritas Gen Z berpikir bahwa demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan terbaik, meskipun pelaksanaannya sering kali belum optimal.⁹⁵ Dihadapkan dengan realita demokrasi yang tidak ideal bahkan mengecewakan, respons Gen Z terpecah menjadi mereka yang terpantik untuk menyuarakan keresahannya dengan melayangkan protes, aksi boikot, petisi, bahkan cara-cara ekstrem, atau mereka yang menjadi frustrasi sehingga apatis.⁹⁶ Perbedaan respons terhadap kondisi demokrasi pada dasarnya tidak eksklusif terjadi di Gen Z karena pola serupa juga terjadi di generasi-generasi sebelumnya. Namun, yang membedakan Gen Z adalah cara mereka mengekspresikan dan mengorganisasi partisipasi politik, yaitu melalui penggunaan teknologi dan platform digital.

Sebagai *digital natives*, mereka menginkorporasikan teknologi dalam aktivisme politiknya, mulai dari diseminasi gagasan hingga mobilisasi massa untuk aksi kolektif. Salah satu contoh awal dan signifikan dari gerakan politik berbasis digital adalah Arab Spring pada tahun 2010–2012. Aksi ini merupakan respons terhadap represi politik, korupsi, dan kesulitan ekonomi, khususnya di bawah rezim otoriter Presiden Hosni Mubarak. Pemuda Mesir memanfaatkan media sosial Facebook dan Twitter untuk mengamplifikasi isu dengan cara menyebarkan ajakan untuk ikut berdemonstrasi dan video-video *real-time* selama aksi berlangsung.⁹⁷ Berkat kegigihan ini dan dukungan dari media arus utama, gerakan masa yang terkonsolidasi melalui kanal digital berhasil menggulingkan rezim Mubarak.⁹⁸

Pada tahun 2024, Revolusi Juli di Bangladesh mencerminkan corak serupa. Aksi ini adalah respons terhadap pemberlakuan kembali sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah oleh Mahkamah Agung di tengah tekanan ekonomi dan tingginya tingkat

⁹⁴ "What is Gen Z?" McKinsey & Company, 8 Agustus 2024, <https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-gen-z>.

⁹⁵ "Gen Z Survey: Committed to Human Rights, Worried about Democracy," Friedrich Naumann Foundation, November 2024, <https://www.freiheit.org/human-rights-hub-geneva/focus/gen-z-survey>.

⁹⁶ D. Apau, S. Suzuki, A. Medina, dan R. B. Booth, *How Does Gen Z Feel About Democracy? Insights from Three Profiles of Youth and Democracy* (CIRCLE (Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement) and Protect Democracy, 2025), 2.

⁹⁷ Khaled Hroub, "(Social) Media and Politics and the Arab Spring Moment," *European Institute of the Mediterranean*, diakses pada 24 Juli 2025, <https://www.iemed.org/publication/social-media-and-politics-and-the-arab-spring-moment/>.

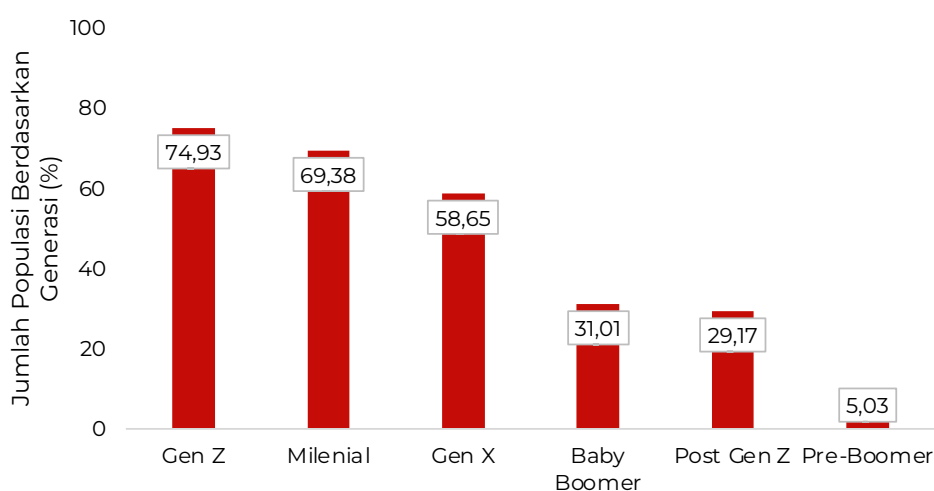
⁹⁸ Media arus utama yang berperan penting dalam Arab Spring adalah Al-Jazeera dan Al-Arabiya, salah satu media internasional pertama yang meliput aksi. Peran mereka adalah menyebarluaskan liputan yang dikumpulkan oleh aktivis melalui media sosial ke audiens yang lebih luas, memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan real-time.

pengangguran. Momentum eskalasi dari aktivisme pemuda Bangladesh terjadi pascatersebarunya video kekerasan oleh polisi di tempat aksi yang berakibat pada kematian beberapa pelajar.⁹⁹ Dampak emosional dari video ini berhasil menggali dukungan publik terhadap gerakan pemuda Bangladesh, yang pada akhirnya membuat Perdana Menteri Hasina mengundurkan diri.

Gen Z Indonesia

Saat ini, Gen Z adalah kelompok demografi dengan jumlah terbesar di Indonesia. Mereka mencakup lebih dari 26,4 persen populasi, yakni sekitar 71,5 juta jiwa.¹⁰⁰ Pada pemilihan presiden 2024, mereka tercatat sebagai pemilih mayoritas terbesar kedua, yakni mencapai 23 persen. Kondisi ini menggambarkan signifikansi ekonomi dan politik dari Gen Z kini dan akan datang.

Bagan 7. Jumlah Populasi Indonesia berdasarkan Generasi Tahun 2020¹⁰¹



Meskipun kerap dilabeli sebagai generasi yang apatis dan apolitis, beberapa studi menunjukkan temuan berbeda. Studi BRIN misalnya, menemukan bahwa Gen Z Indonesia memiliki karakter progresif, terbuka terhadap perbedaan dan perubahan sehingga cenderung menolak gagasan-gagasan konvensional dan konservatif.¹⁰² Mereka juga tertarik terhadap nilai-nilai altruistik, dan peduli terhadap isu kesejahteraan,

⁹⁹ Sirat-E-Rowshan Islam, "Social Media as a Catalyst for Mobilizing Mass Protests During the July Movement in Bangladesh," *BIPSS Commentary* (2024): 2, diakses melalui <https://bipss.org.bd/social-media-as-a-catalyst-for-mobilizing-mass-protests-during-the-july-movement-in-bangladesh/>.

¹⁰⁰ "Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia, 2020," Badan Pusat Statistik, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>.

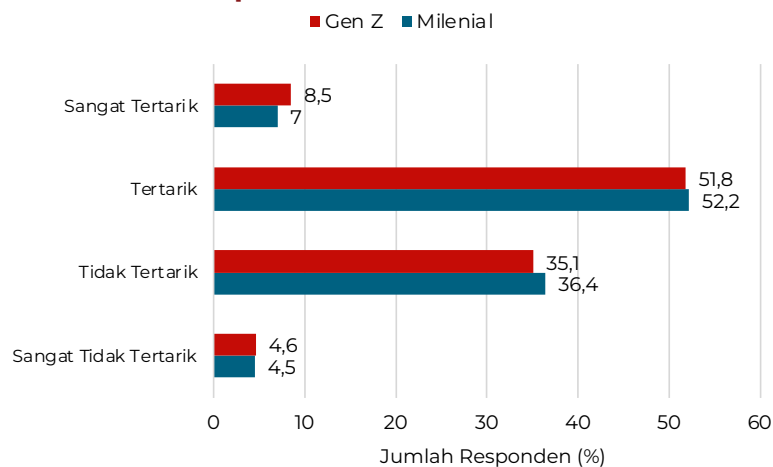
¹⁰¹ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin," diakses pada Juni 2025, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>.

¹⁰² "Karakteristik Khas Generasi Milenial dan Z sebagai Digital Native," Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2 November 2023, <https://brin.go.id/news/116359/karakteristik-khas-generasi-milenial-dan-z-sebagai-digital-native>.

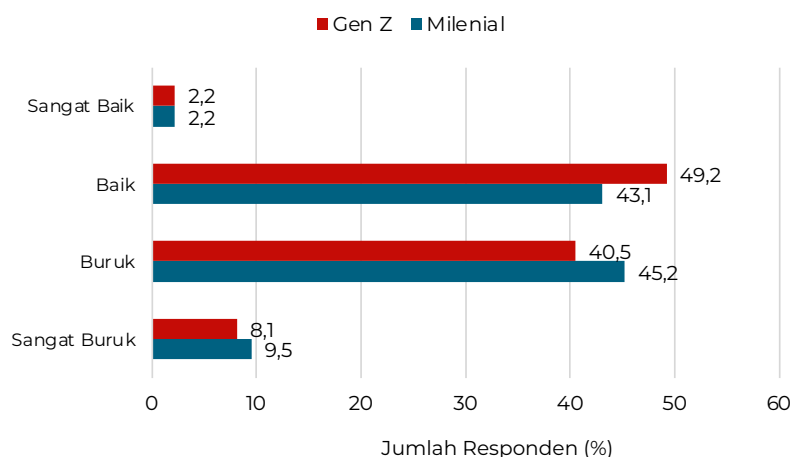
toleransi, dan perlindungan alam.¹⁰³

Terkait dengan isu politik secara umum, survei Katadata yang dilakukan pada tahun 2023 kepada 506 Gen Z dan 499 milenial di 34 provinsi Indonesia dengan tema “Politik di Mata Anak Muda,” menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen Gen Z tertarik terhadap isu politik, yang terefleksikan dari antusiasme mereka dalam mengikuti berita politik. Ketika diminta mengenai baik atau buruknya politik, sekitar 49,2 persen menilai politik itu baik dan 2,2 persen menilai politik sangat baik, sisanya menilai buruk atau sangat buruk. Perbedaan yang relatif tipis ini menunjukkan bahwa ada skeptisme terhadap perpolitikan Indonesia. Penyebabnya sangat beragam salah satunya karena penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi. Meskipun terdapat keraguan terhadap politik, lebih dari setengah responden Gen Z (347 orang) tetap memandang partisipasi politik sebagai hal penting untuk memengaruhi arah perumusan kebijakan.

Bagan 8. Ketertarikan terhadap Politik¹⁰⁴



Bagan 9. Persepsi terhadap Politik¹⁰⁵



¹⁰³ Albertus Magnus Prestianta, Nona Evita, dan Rossalyn Asmarantika, *Gen Z's Digital Media Consumption and Activities* (UMN Press), 10.

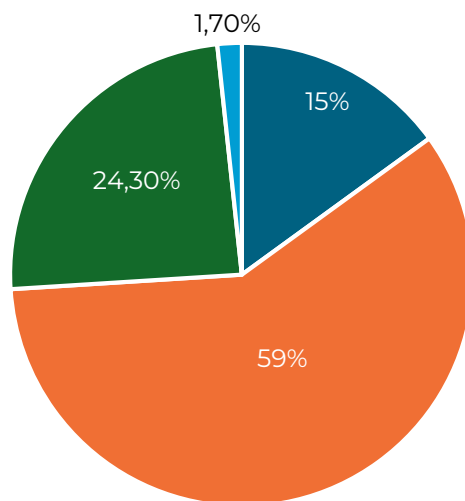
¹⁰⁴ Diolah dari Katadata Insight Center, *Temuan Survei Nasional: Politik di Mata Anak Muda* (Katadata Insight Center, 2023), 7.

¹⁰⁵ Katadata Insight Center, *Temuan Survei Nasional*, 11.

Sikap Gen Z terhadap politik secara umum turut tercermin dalam pandangan mereka terhadap demokrasi. Gen Z menilai bahwa demokrasi masih menjadi sistem politik terbaik dibandingkan opsi sistem politik lainnya. Namun demikian, mereka menunjukkan ketidakpuasan dengan kualitas implementasi demokrasi Indonesia. Berdasarkan survei dari IDN Research Institute terhadap 300 Gen Z di perkotaan Indonesia, hanya 24,3 persen yang menjawab cukup puas dengan kualitas demokrasi Indonesia.¹⁰⁶ Bahkan, hanya ada 1,7 persen atau kurang dari lima orang yang menjawab sangat puas. Pandangan ini disebabkan antara lain oleh kondisi ekonomi dan penanganan hukum yang dinilai buruk.

Bagan 10. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Milenial dan Gen Z Indonesia terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia Tahun 2024¹⁰⁷

■ Sangat Tidak Puas ■ Kurang Puas ■ Cukup Puas ■ Sangat Puas



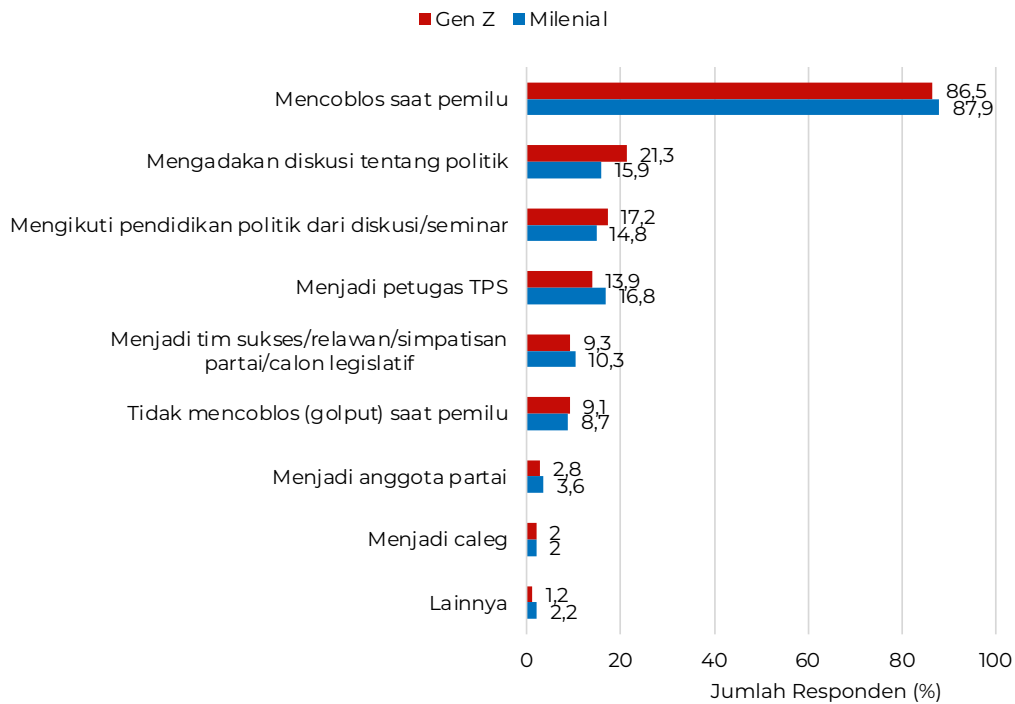
Sayangnya, di tengah ketidakpuasan tersebut partisipasi politik Gen Z masih sangat terbatas. Masih merujuk kepada survei IDN Research Institute yang sama, ketika ditanya tentang bentuk partisipasi politik yang pernah dilakukan—menyuarakan pendapat di sosial media, menyampaikan pendapat langsung ke pejabat publik, atau tergabung ke dalam organisasi politik, serikat buruh, dan masyarakat sipil—tercatat ada 207 responden (69 persen) yang tidak pernah melakukan partisipasi politik dalam bentuk apa pun. Sementara itu, bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan adalah menyuarakan pendapat melalui media sosial yakni sebanyak 74 responden (24,7 persen), sedangkan partisipasi langsung dalam organisasi masyarakat masih sangat terbatas, hanya 25 responden (8,3 persen).¹⁰⁸

¹⁰⁶ Heriyanto et al., *Indonesia Millenial and Gen Z Report 2024* (IDN Research Institute, 2024), 85.

¹⁰⁷ DN Research Institute melakukan survei terhadap 300 Gen Z di area Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, dan Makassar pada Mei hingga Juli 2024 untuk laporan survei tahun 2024. Pemilihan responden menggunakan teknik *random sampling*.

¹⁰⁸ Heriyanto et al., *Indonesia Millenial and Gen Z Report 2024*, 94.

Bagan 11. Hasil Survei Preferensi Bentuk Partisipasi Politik¹⁰⁹



Temuan tersebut senada dengan hasil studi Katadata pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa keterlibatan politik Gen Z masih didominasi oleh partisipasi elektoral formal dibandingkan bentuk partisipasi politik aktif lainnya yang dapat mendukung perkembangan demokrasi deliberatif. Survei Katadata menunjukkan bahwa 87,2 persen dari Gen Z dan Milenial memilih untuk mengikuti pemilu sebagai bentuk partisipasi politik.¹¹⁰ Tingginya angka ini mencerminkan kesadaran akan hak politik sekaligus menandakan keterbatasan partisipasi politik di luar momen elektoral.

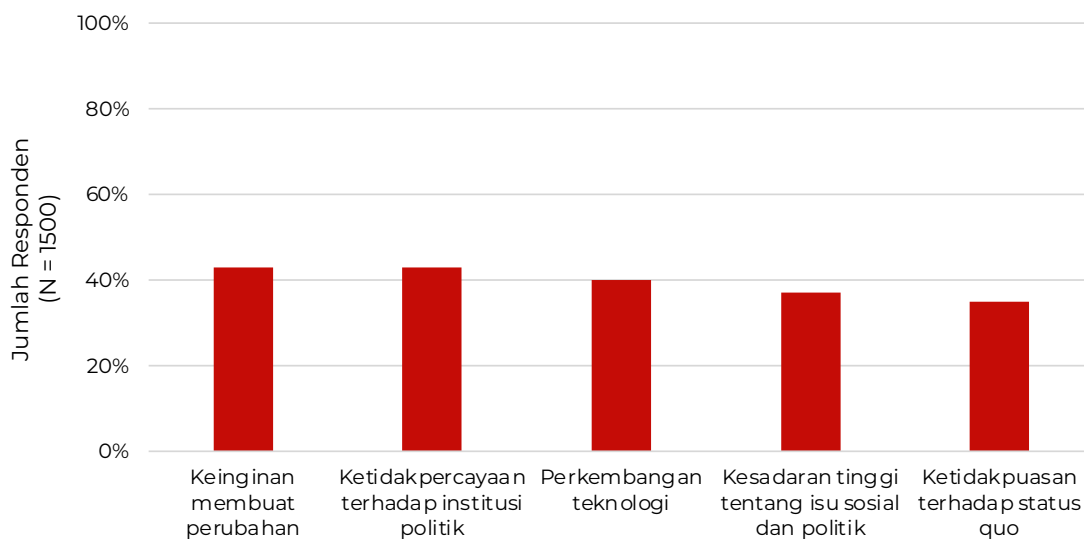
Walaupun masih terbatas dalam bentuk partisipasi politiknya, Gen Z memiliki motivasi yang cukup kuat untuk menciptakan perubahan sosial. Hal ini tertuang di dalam laporan IDN Research Institute pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa keinginan membuat perubahan menjadi faktor tertinggi yang mendorong keterlibatan politik Gen Z dan milenial, disusul oleh faktor ketidakpercayaan terhadap institusi politik di nomor dua.¹¹¹ Kepedulian dan keresahan yang ditampilkan oleh Gen Z adalah modal awal yang baik untuk memperluas basis kelas menengah kritis baru Indonesia. Dengan demikian, perlu ada upaya-upaya untuk menjembatani kesenjangan antara motivasi dan aktualisasi partisipasi politik mereka.

¹⁰⁹ Survei Katadata dilakukan pada 11-17 Oktober 2023 secara daring terhadap 1.005 responden berusia 17-42 tahun di 34 provinsi Indonesia. Sebanyak 50,4 persen responden adalah Gen Z dan kebanyakan responden berpendidikan sarjana strata dan berpenghasilan Rp4-6 juta per bulan.

¹¹⁰ Katadata Insight Center, *Temuan Survei Nasional*, 14.

¹¹¹ IDN Research Institute melakukan survei terhadap 750 milenial dan 750 Gen Z di area Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota-kota kecil di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Palembang, Solo, Banjarmasin, dan Balikpapan pada tahun 2024. Kebanyakan responden Gen Z mengenyam pendidikan hingga SMA, berstatus NEET, dan 51 persen berasal dari latar sosio-ekonomi atas.

Bagan 12. Hasil Survei Faktor Pendorong Keterlibatan Politik Milenial dan Gen Z Indonesia Tahun 2024¹¹²



Aktivisme Digital Gen Z Indonesia: Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

Aktivisme politik Gen Z melalui platform digital ditandai dengan strategi *trend-jacking* melalui *hashtag*, fitur musik, filter wajah, video, dan *meme* yang populer untuk menyebarluaskan gagasan.¹¹³ Mereka mencoba mengambil alih tren populer media sosial dengan konten kampanye untuk menyampaikan pesan politik. Aktivisme mereka juga identik dengan penyisipan humor, tulisan sarkas atau *lip-sync* satir, dan fitur-fitur kolaboratif seperti *challenge* di TikTok untuk mempopulerkan isu yang diangkat.¹¹⁴

Penolakan terhadap UU Ciptaker pada tahun 2020 dapat menjadi ilustrasi bagaimana Gen Z memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan keresahan mereka. Mengangkat isu ini menjadi menarik karena konsolidasi gerakan terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga sulit untuk melakukan konsolidasi secara luring. Demonstrasi UU Ciptaker pada dasarnya menunjukkan kemampuan adaptif para aktivis muda dengan memanfaatkan teknologi digital yang khususnya familier bagi mereka.

Secara umum, aksi ini merupakan respons terhadap UU Ciptaker yang dianggap merugikan pekerja. Hal yang menjadi sorotan demonstran antara lain adalah fleksibilitas kebijakan penetapan upah yang dikhawatirkan menekan pendapatan pekerja, ketentuan jam kerja yang lebih panjang, pemotongan pesangon, dan pengaturan standar perlindungan pekerja lainnya yang dinilai melemah. Massa aksi adalah koalisi yang terbentuk antara aktivis ornop, buruh, dan golongan pemuda yang didominasi oleh

¹¹² Pasaman et al., *Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025*, 152.

¹¹³ Nuurrianti Jalli, "Viral Justice: TikTok Activism, Misinformation, and the Fight for Social Change in Southeast Asia," *Social Media + Society* (2025): 5, <https://doi.org/10.1177/20563051251318122>.

¹¹⁴ Jalli, "Viral Justice," 6.

mahasiswa.¹¹⁵ Melalui jejaring organisasi mahasiswa dan penyebaran informasi di media sosial, aksi meluas ke daerah-daerah. Di Ternate misalkan, PMII, LMND, GMKI, HMI, IMM, dan Gamhas terlibat dalam aksi. Sementara, di Bandung, elemen mahasiswa mencakup FMN Cabang Bandung Raya, BEM Rema UPI, LPPMD Unpad, Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Uninus, PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan lainnya.¹¹⁶

Dalam kasus ini, media sosial berperan penting sebagai sarana diseminasi gagasan, informasi, dan koordinasi aksi. Penggunaan tagar menjadi penting untuk menarik atensi publik dan orang-orang yang tidak bisa dijangkau langsung oleh jejaring gerakan.¹¹⁷ Strategi ini berhasil memicu partisipasi yang lebih luas, termasuk dari kalangan remaja, anak-anak, hingga komunitas penggemar musik K-pop, yang secara signifikan mendorong peningkatan popularitas isu tersebut di Twitter.

Tantangan Aktivisme Politik Gen Z Indonesia

Meskipun pelbagai survei menunjukkan bahwa Gen Z Indonesia telah memiliki modal kepedulian dan kepekaan sosial-politik yang cukup baik—tercermin dari pelbagai bentuk gerakan digital dan advokasi yang mereka lakukan—tetapi kenyataannya, gerakan-gerakan tersebut masih terfragmentasi dan belum menjadi kekuatan kolektif yang solid. Fragmentasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat jejaring, narasi bersama, dan arah gerakan yang lebih strategis.

Di sisi lain, Gen Z sedang dihadapkan dengan persoalan ketenagakerjaan yang berpotensi melemahkan kesejahteraan dan aktivisme politik mereka pada masa depan. Ditambah lagi, konsekuensi dari perkembangan teknologi, yaitu munculnya era *post-truth* yang sarat banjir informasi dan kaburnya batas antara fakta dan opini dapat menyulitkan upaya-upaya pembentukan wacana pendukung demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana Gen Z dapat menavigasi tantangan struktural tersebut sembari membangun kapasitas kolektif seperti literasi digital, membangun jaringan advokasi, dan solidaritas sosial, yang mampu memperkuat daya tahan mereka terhadap fragmentasi informasi dan manipulasi politik di ruang digital.

Tantangan Ekonomi

Gen Z Indonesia sedang dihadapkan dengan masalah ketersediaan lapangan pekerjaan berkualitas. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada tahun

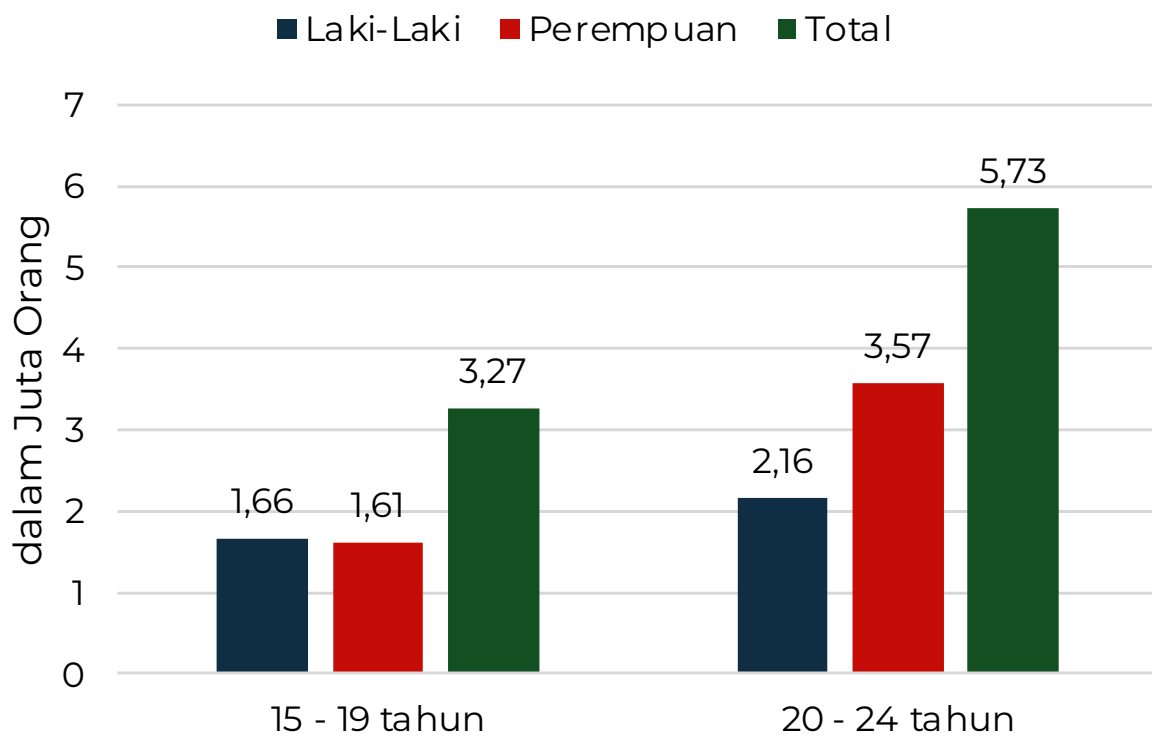
¹¹⁵ Aktivist berdemostrasi di depan ruang publik, termasuk kantor DPRD, walikota, hingga bundaran kampus. Puncak aksi terjadi pada 5–10 Oktober 2025 pasca pengesahan UU Ciptaker. Selengkapnya berdasarkan Vitoria Mantalean dan Egidius Patnistik, "Hari Ini, 2.150 Demonstran Tolak UU Cipta Kerja dengan 10.000 Aparat di Jakarta," *Kompas*, 20 Oktober 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/17555681/hari-ini-2150-demonstran-tolak-uu-cipta-kerja-berhadapan-dengan-10000>.

¹¹⁶ CNN Indonesia, "Setahun Jokowi, Buruh-Mahasiswa DIY & Bandung Turun ke Jalan," *CNN Indonesia*, 20 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201020063622-20-560305/setahun-jokowi-buruh-mahasiswa-diy-bandung-turun-ke-jalan>.

¹¹⁷ Tiara Apriyani, "Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital," *Kalijaga Journal of Communication* 3, no. 1 (2021): 17–30, 23.

2024 menunjukkan bahwa dari total 44,33 juta anak muda Indonesia berumur 15-24 tahun, sekitar 20,30 persennya masuk dalam kategori tidak sedang dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (*Not in education, employment or training/NEET*). Sementara itu, status bekerja pun tidak berarti seseorang memperoleh upah yang layak.¹¹⁸ Inilah yang menjadi permasalahan kedua. BPS per Februari 2025, rata-rata upah/gaji bersih untuk buruh/karyawan/pegawai dalam sebulan pada Gen Z berusia 15–19 tahun hanya sekitar Rp1,92 juta per bulan, sementara yang berusia 20–24 tahun memperoleh sekitar Rp2,41 juta per bulan. Angka ini bahkan masih jauh di bawah kota dengan biaya hidup rumah tangga per bulan terendah di Indonesia seperti Cilacap yakni Rp5,37 juta.¹¹⁹ Situasi ini menimbulkan kecemasan tentang kesejahteraan dan peluang mobilitas ekonomi mereka pada masa depan.

Bagan 13. Not in Employment , Education and Training (NEET) Indonesia, Agustus 2024¹²⁰

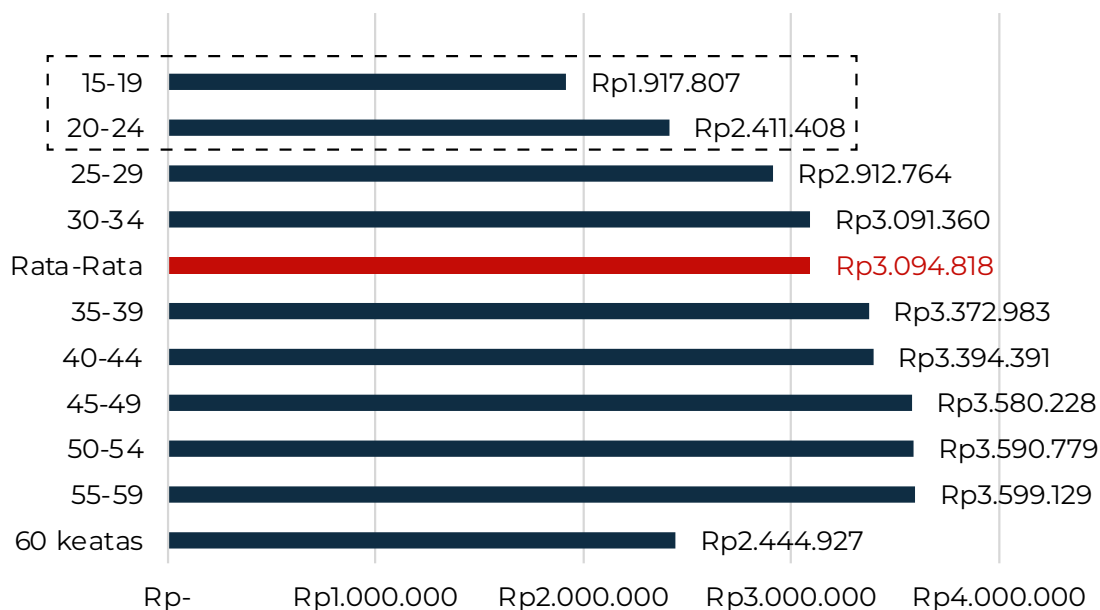


¹¹⁸ Wawancara bersama Padang Wicaksono (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 16 Juli 2025).

¹¹⁹ "Terendah di RI, Biaya Hidup di Kota Ini Rp5,35 Juta/Bulan," *CNBC Indonesia*, 12 Desember 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231212142316-4-496500/terendah-di-ri-biaya-hidup-di-kota-ini-rp535-juta-bulan>.

¹²⁰ Diolah dari Kementerian Ketenagakerjaan, "Not in Employment, Education, and Training (NEET), Agustus 2024," Satu Data Ketenagakerjaan, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2460>.

Bagan 14. Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan berdasarkan Kelompok Umur, Februari 2025¹²¹



Di tengah keterbatasan pekerjaan formal yang layak, perkembangan dan adopsi teknologi seperti akal imitasi (*artificial intelligence/AI*) dan komputer kuantum oleh perusahaan telah menimbulkan efek disruptif di pasar tenaga kerja.¹²² Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), sejumlah pekerjaan telah mengalami penurunan jumlah secara tajam, khususnya pekerjaan administratif karena telah mengalami otomatisasi. Pada masa depan, efek dari disrupsi teknologi diproyeksikan akan semakin meluas ke pekerjaan manusia yang lebih kompleks.¹²³ Disrupsi teknologi juga sangat berpotensi memperparah *skill mismatch* di Indonesia.¹²⁴

Di Indonesia, dampak teknologi terhadap pasar tenaga kerja harus dikontekstualisasikan dengan kondisi SDM yang ada. Dibandingkan dengan rata-rata negara dalam kelompok pendapatan yang sama, populasi Indonesia masih tertinggal dalam hal keterampilan pengetahuan global. Laporan Global Talent Competitiveness Index (2023) menunjukkan bahwa untuk indikator keterampilan tingkat tinggi, yang ditandai oleh pendidikan tinggi dan pekerjaan profesional, Indonesia berada di posisi 102 dari 134 negara. Ini dapat diinterpretasikan bahwa populasi Indonesia tergolong rentan dalam menghadapi disrupsi teknologi.¹²⁵

¹²¹ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama (Rupiah), 2025," diakses pada Juni 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ3MCMY/rata-rata-upah-gaji-bersih-sebulan-buruh-karyawan-pegawai-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-pekerjaan-utama.html>.

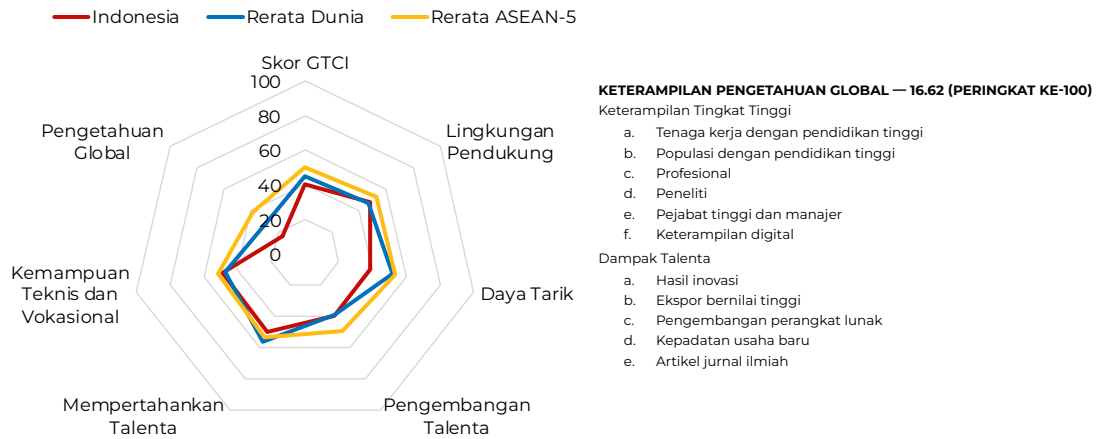
¹²² Attilio Di Battista et al., *Future of Jobs Report 2025* (World Economic Forum, 2025), 6.

¹²³ Max Roser, "AI Timelines: What Do Experts in Artificial Intelligence Expect for the Future?" *Our World in Data*, 28 November 2023, <https://ourworldindata.org/ai-timelines>.

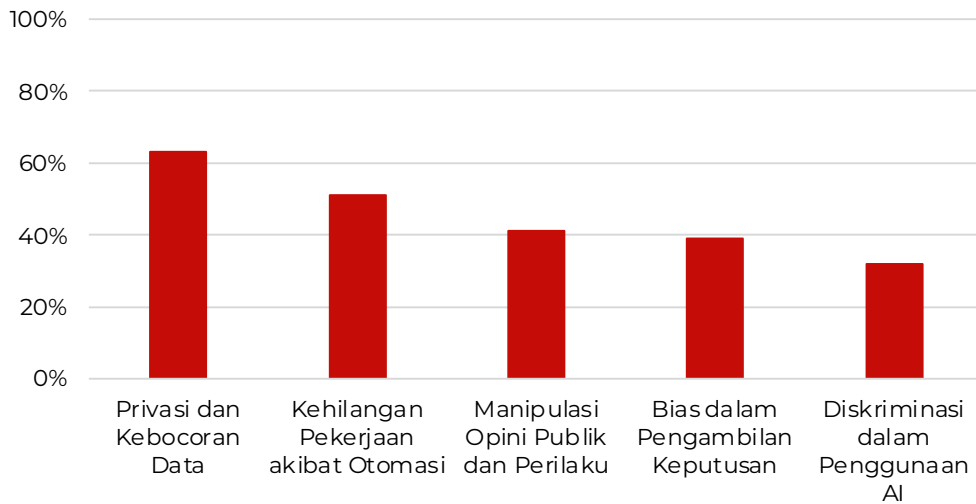
¹²⁴ Wawancara bersama Surjadi Basuki (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 21 Juli 2025).

¹²⁵ Bratt et al., *The Global Talent Competitiveness Index 2023: What a Difference Ten Years Make What to Expect for the Next Decade* (INSEAD, Descartes Institute for the Future, 2023), 123

Bagan 15. Perbandingan *Global Talent Competitiveness Index (GTCI)* Indonesia Tahun 2023¹²⁶



Bagan 16. Kekhawatiran Utama terkait Penggunaan AI¹²⁷



Meskipun demikian, wawancara dengan sejumlah ahli menunjukkan adanya optimisme bahwa Gen Z mampu mencari jalan keluar atas tantangan yang dihadapi. Generasi ini umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding pendahulunya,¹²⁸ serta menunjukkan kinerja yang lebih baik di dalam lingkungan kerja yang memanfaatkan teknologi.¹²⁹ Tumbuh di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan akses informasi yang luas, membuat Gen Z menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks Indonesia, disrupsi teknologi terhadap lapangan pekerjaan bisa saja terjadi lebih lambat dibanding negara maju, karena masih tingginya kebutuhan penyerapan tenaga kerja melalui sektor padat karya, sehingga

¹²⁶ Diolah dari Bratt et al, *The Global Talent Competitiveness Index 2023*, 123.

¹²⁷ Pasaman et al., *Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025*, 69.

¹²⁸ Wawancara bersama Dewa Gede Karma Wisana (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 15 Juli 2025).

¹²⁹ International Labour Organization (ILO), *Global Employment Trends for the Youth 2020: Technologies and the Future of Work* (ILO, 2020).

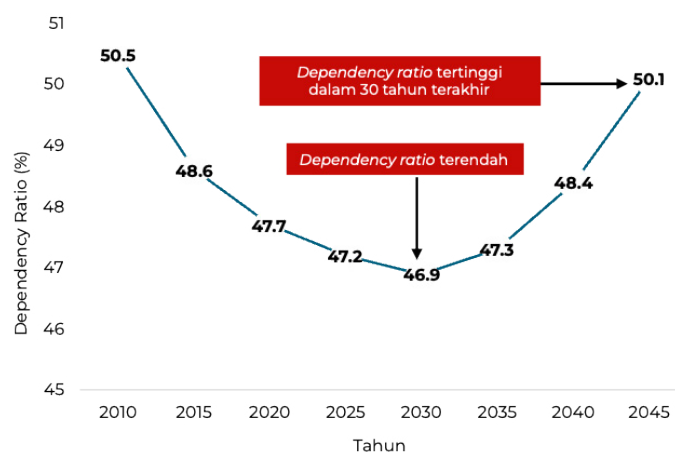
memberi ruang bagi penyesuaian secara bertahap.¹³⁰

Tantangan lain berasal dari perubahan demografi Indonesia.¹³¹ BPS (2018) memproyeksikan bahwa pasca-2030 beban ketergantungan Indonesia akan terus naik sampai dengan tahun 2045. Pada saat mencapai puncak ketergantungan tertinggi pada tahun 2045, maka setiap 100 orang usia kerja, utamanya Gen Z dan Alpha, akan menanggung 52 orang non-produktif. Beban ketergantungan ini berpotensi menekan kesejahteraan Gen Z atau bahkan Generasi Alpha, terlebih di tengah sulitnya lapangan pekerjaan yang layak.

Tabel 4. Jumlah Populasi Berdasarkan Kelompok Usia dan Hasil Proyeksi Skenario Kebijakan Optimis¹³²

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65+ Tahun
2020	66.208.650	186.774.090	16.593.810
2025	66.783.990	196.148.890	21.620.970
2030	67.015.070	203.183.140	27.832.890
2035	66.634.800	208.134.620	34.861.010
2040	65.018.450	212.168.250	45.548.220
2045	63.991.010	214.294.460	50.848.910
2050	63.839.050	215.051.210	59.103.310

Bagan 17. Dependency Ratio dan Hasil Proyeksi 2010-2045¹³³



¹³⁰ Wawancara bersama Edbert Gani (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 16 Juli 2025).

¹³¹ Wawancara bersama Padang Wicaksono (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 16 Juli 2025).

¹³² Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2025: Hasil Sensus Penduduk 2020* (Badan Pusat Statistik, 2023), 38

¹³³ Bima Baskara, "Menangkal Kutukan Sumber Daya," *Kompas*, 1 September 2019, <https://www.kompas.id/artikel/menangkal-kutukan-sumber-daya>; "Dependency Ratio Hasil Proyeksi Penduduk, 2035," Badan Pusat Statistik, 1 Desember 2019, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIwIzI=/dependency-ratio-hasil-proyeksi-penduduk.html>.

Situasi ketenagakerjaan ini pada dasarnya menegaskan bahwa Gen Z akan menghadapi tekanan beban sosial-ekonomi yang semakin besar, baik dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kewajiban menanggung populasi non-produktif yang meningkat. Dalam konteks ini, persiapan finansial yang memadai menjadi krusial, tidak hanya untuk menjaga daya tahan ekonomi individu, tetapi juga untuk memungkinkan mereka berperan aktif dalam proses politik dan advokasi kebijakan. Tanpa fondasi kemandirian ekonomi yang kokoh, sulit membayangkan Indonesia dapat memiliki kelas menengah kritis dalam jumlah besar pada masa depan.

Tantangan Teknologi

Selain memiliki dampak tidak langsung terhadap aktivisme kelas menengah kritis melalui disrupsi pasar tenaga kerja, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi juga berdampak langsung terhadap aktivisme kelas menengah kritis. Seperti pisau bermata dua, teknologi dapat menguatkan dan juga melemahkan partisipasi politik masyarakat. Banyak literatur yang menerangkan bagaimana teknologi dapat menjembatani alienasi orang-orang dari politik,¹³⁴ menyebarkan informasi,¹³⁵ menurunkan biaya partisipasi,¹³⁶ menyediakan ruang diskusi, dan meningkatkan aktivisme sipil berbasis isu.¹³⁷

Meskipun demikian, teknologi juga berpotensi menciptakan *echo chamber* yang memperkuat bias kognitif dan membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Media sosial, yang semula diharapkan menjadi ruang terbuka untuk berjejaring dan memobilisasi aksi kolektif, kerap berubah menjadi kanal ekspresi emosional semata. Dalam konteks frustrasi politik, alih-alih mendorong aksi nyata di lapangan, ruang digital justru menjadi katup pelepas tekanan sosial, di mana kemarahan dan kritik hanya tertuang dalam bentuk unggahan, komentar, atau tanda *like* tanpa diikuti tindakan lanjutan.¹³⁸ Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai *slacktivism*—aktivisme yang dangkal dan berisiko mengaburkan urgensi perlawanan di dunia nyata. Akibatnya, potensi tekanan terhadap penguasa melemah karena energi kolektif yang seharusnya terkonsolidasi dalam aksi fisik terfragmentasi di ruang maya.

¹³⁴ Cristian Vaccari dan Augusto Valeriani, *Outside the Bubble: Social Media and Political Participation in Western Democracies* (Oxford University Press, 2021), 231.

¹³⁵ Paulo Savaget, Tullio Chiarini, dan Steve Evans, "Empowering Political Participation through Artificial Intelligence," *Science and Public Policy* 46, no. 3 (2019): 372; Shelley Boulianne, "Does Internet Use Affect Engagement? A Meta-Analysis of Research," *Political Communication* 26 (2009): 205; Tom Kirk, *How Change Happens* (Oxford University Press, 2024), 184.

¹³⁶ Boulianne, "Does Internet Use Affect Engagement?", 205.

¹³⁷ Rabia Karakaya Polat, "The Internet and Political Participation: Exploring the Explanatory Links," *European Journal of Communication* 20 (2005): 452.

¹³⁸ Wawancara bersama Burhanuddin Muhtadi (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 9 Juli 2025); Wawancara bersama Edbert Gani (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 16 Juli 2025).

Teknologi juga dapat memantik berkembangnya elemen-elemen anti-demokratis di masyarakat salah satunya adalah *buzzer* (pendengung) politik. Keberadaan pendengung politik yang menyebarkan misinformasi dan disinformasi dapat melemahkan integritas elektoral, menciptakan polarisasi politik, memperburuk kualitas debat publik, dan melemahkan gerakan-gerakan prodemokrasi.¹³⁹ Ancaman menjadi semakin serius ketika terjadi penormalan atas kehadiran pendengung di media sosial dikarenakan insentif ekonomi yang diberikan.¹⁴⁰ Dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, menjadi pendengung politik dapat menjadi opsi karier bagi Gen Z.¹⁴¹

Lebih jauh lagi, infrastruktur teknologi informasi dan sosial media juga dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen pengawasan dan pembatasan informasi untuk menurunkan visibilitas dan gema dari aktivisme politik yang dilakukan masyarakat.¹⁴² Negara juga dapat meningkatkan represi dengan dalih bahwa aktivisme politik di media sosial tergolong sebagai terorisme siber.¹⁴³ Di Indonesia keberadaan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi celah kriminalisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah.¹⁴⁴ Tidak hanya itu, ancaman *doxxing* atau penyebaran identitas tanpa persetujuan pihak terkait adalah taktik yang semakin sering digunakan untuk melemahkan suara dan legitimasi aktivisme kelompok muda. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana ruang digital menjadi arena utama partisipasi politik sekaligus medan rawan bagi pembungkaman kebebasan berekspresi.

Mencermati karakteristik Gen Z serta dinamika aktivisme politik mereka di tengah tekanan ekonomi dan disrupsi teknologi, muncul pertanyaan krusial, bagaimana peluang menjadikan generasi ini sebagai kelas menengah kritis baru pada masa depan? Untuk menjawabnya, bagian berikut akan menyusun skenario konsolidasi demokrasi menggunakan metode *Structured Analytic Techniques* untuk merumuskan prasyarat yang dibutuhkan Gen Z dan generasi berikutnya dapat tumbuh sebagai kelas menengah kritis.

¹³⁹ Wijayanto dan Ward Berenschot, *Cybertroops and Public Opinion Manipulation through Social Media in Indonesia* (CSIS Indonesia, 2024), 17.

¹⁴⁰ Muhammad Rachimoellah, Putri Handayani Lubis, dan Nindya Juwita Utimadini, "Digital Activism and Political Change: Challenges of Social Media's Impact on Political Development," *Journal of Middle East and Islamic Studies* 11, No. 2 (2024): 115.

¹⁴¹ Wawancara bersama Edbert Gani (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 16 Juli 2025).

¹⁴² Jalli, "TikTok Activism," 6.

¹⁴³ Bart Cammaerts, "Social Media and Activism," dalam *The International Encyclopedia of Digital Communication and Society*, disunting oleh Robin Mansell dan Peng Hwa (Blackwell-Wiley, 2015), 8.

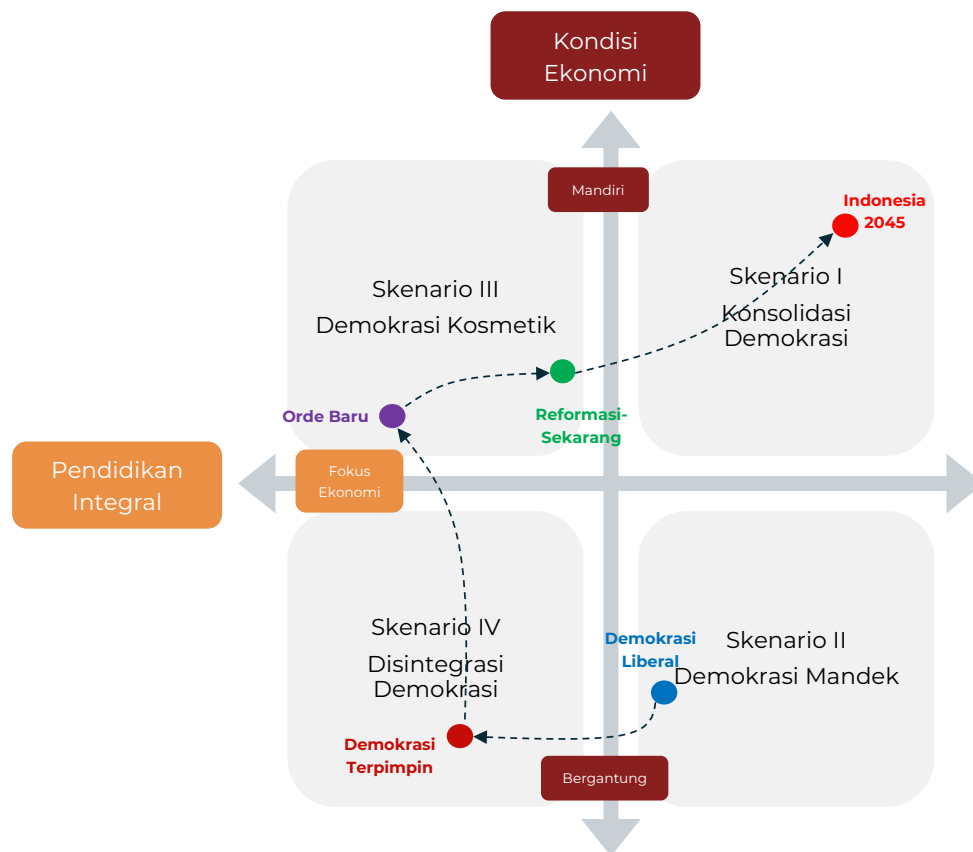
¹⁴⁴ "LBH Jakarta Catat, 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan untuk Kriminalisasi," *Hukumonline.com*, July 13, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-catat-2-pasal-uu-ite-ini-kerap-digunakan-untuk-kriminalisasi-lt64af51f610afe/>.

Skenario Menuju Konsolidasi Demokrasi

Menghubungkan antara teorisasi peran kelas menengah dalam demokrasi serta kondisi terkini Indonesia, maka skenario konsolidasi demokrasi akan memerhatikan dua variabel utama yakni, pendidikan integral—pendidikan yang menyeimbangkan pengetahuan dan kemampuan praktis dengan pengembangan nilai-nilai demokrasi—sebagai Sumbu X dan tingkat kemandirian ekonomi sebagai Sumbu Y.

Sumbu X menggambarkan kualitas pendidikan. Semakin ke kanan, pendidikan semakin seimbang antara orientasi ekonomi dan pembentukan nilai demokrasi. Sebaliknya, semakin ke kiri, pendidikan hanya berfokus pada fungsi ekonomi semata, mengabaikan aspek kewargaan. Sumbu Y merepresentasikan tingkat kemandirian ekonomi masyarakat. Semakin tinggi posisinya, semakin mandiri secara ekonomi, ditandai oleh dominasi pekerjaan formal dan keterlibatan sektor privat yang produktif. Sebaliknya, semakin rendah, maka semakin tinggi ketergantungan terhadap negara untuk pekerjaan formal.

Bagan 18. Skenario Konsolidasi Demokrasi



Skenario pertama merepresentasikan kondisi ideal ketika **demokrasi berhasil terkonsolidasi** secara substansial. Salah satu ciri utamanya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang unggul, hasil dari sistem pendidikan integral yang tidak semata-mata berorientasi kepada pasar, tetapi juga membentuk warga negara yang

sadar atas hak dan tanggung jawab politiknya. Dalam konteks ini, pendidikan berhasil menjalankan peran gandanya, yakni sebagai pengungkit ekonomi yang membuka akses terhadap pekerjaan formal yang layak, serta sebagai ruang yang membentuk nilai-nilai kewarganegaraan seperti toleransi, rasionalitas politik, dan partisipasi aktif. Terwujudnya pendidikan integral berhasil menghasilkan kelas menengah kritis yang mandiri secara finansial dan matang secara politik.

Konsolidasi demokrasi dalam skenario ini juga ditopang oleh ekonomi yang terbuka, namun terkelola dengan baik. Ekonomi Indonesia terintegrasi ke dalam ekonomi global, khususnya melalui keterlibatan aktif dalam *Global Value Chains* (GVC) dan peningkatan arus *Foreign Direct Investment* (FDI), yang mendorong proses industrialisasi dan perluasan lapangan kerja formal berkualitas. Pekerjaan layak yang datang dari sektor swasta memberi kepastian penghasilan dan jaminan sosial, yang menjadi fondasi bagi terbentuknya kelas menengah yang bebas dari patronase negara.

Dalam konfigurasi ini, terbentuk kelas menengah kritis yang besar. Mereka tidak hanya berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Dengan kemandirian ekonomi yang kuat dan kesadaran politik yang tinggi, mereka mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap potensi dominasi oligarki maupun populisme otokratik. Mereka aktif dalam mengawasi kebijakan publik, berpartisipasi dalam forum-forum politik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Skenario dua atau demokrasi mandek menggambarkan situasi di mana pendidikan berhasil menciptakan masyarakat sipil yang memiliki kesadaran kewarganegaraan tinggi dan partisipatif. Sistem pendidikan yang inklusif dan terintegrasi dengan nilai-nilai demokrasi mendorong lahirnya warga negara yang kritis dan tidak ragu menyuarakan aspirasi politik melalui pelbagai bentuk protes sosial. Namun demikian, kesadaran politik ini berdiri di atas fondasi ekonomi yang rapuh, sehingga masyarakat tidak berdaya untuk mengubah struktur politik yang tidak ideal.¹⁴⁵ Dalam konfigurasi ini, sebagian besar masyarakat menjadi kelas menengah karena mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga tercipta hubungan patron-klien.

Ketergantungan pada institusi negara ini menciptakan keterbatasan dalam kapasitas kelas menengah untuk bertindak sebagai kekuatan demokratis yang independen. Mobilitas sosial mereka lebih ditentukan oleh mekanisme alokasi daripada kompetisi pasar terbuka, dan jaminan institusional seperti pensiun, tunjangan, dan stabilitas kerja menjadikan posisi mereka cenderung kompromistis terhadap kekuasaan. Sementara sebagian terdorong untuk memperjuangkan perubahan, sebagian lainnya justru memilih menjaga *status quo* demi kenyamanan posisi sosial-ekonominya. Imbasnya adalah pengetahuan kewarganegaraan yang telah dibentuk melalui pendidikan demokrasi tidak sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan kolektif

¹⁴⁵ Wawancara bersama Teguh Dartanto (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 25 Juni 2025).

yang mampu mendorong perubahan politik struktural. Demokrasi dalam skenario ini tumbuh dalam ruang yang penuh potensi, tetapi melemah akibat absennya dukungan ekonomi-politik yang otonom dari basis kelas menengah.

Skenario tiga menjabarkan yang disebut dengan **demokrasi kosmetik**, di mana demokrasi berlangsung secara formal dan prosedural, tetapi secara substansial kehilangan semangat partisipatif dan akuntabilitas publik. Dalam konfigurasi ini, sistem pendidikan difungsikan secara sempit, hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Kurikulum dan praktik pendidikan mengabaikan pendidikan demokrasi seperti pentingnya deliberasi, berpikir kritis, toleransi, keadilan sosial, dan keterlibatan sipil. Akibatnya, sistem pendidikan gagal membentuk warga negara yang sadar hak dan tanggung jawab politiknya.

Secara ekonomi, kelas menengah pada skenario ini memang menikmati tingkat kemandirian relatif dari negara. Mereka mendapat manfaat dari keterbukaan ekonomi, peningkatan industrialisasi, serta akses terhadap pekerjaan formal yang mapan. Namun, kemapanan ekonomi tersebut tidak disertai dengan tumbuhnya nilai-nilai demokratis atau kepekaan terhadap isu-isu publik.

Kelas menengah terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang tidak memiliki solidaritas politik bersama. Sebagian yang telah berhasil secara ekonomi cenderung mengadopsi sikap apatis, memisahkan diri dari urusan politik yang dianggap tidak relevan atau berisiko terhadap stabilitas kesejahteraannya. Sementara itu, kelompok yang merasa terpinggirkan dari manfaat pembangunan menunjukkan gejala frustrasi yang dapat bermuara pada radikalisme atau tuntutan perubahan drastis. Dalam situasi ini, kelas menengah gagal memainkan peran sebagai penyangga demokrasi. Alih-alih menjadi kekuatan penyeimbang, mereka justru tercerai berai dan kehilangan orientasi kolektif. Demokrasi pun berjalan tanpa fondasi partisipasi politik yang kokoh dan bermakna, serta cenderung terjebak dalam prosedur yang dikendalikan oleh elite.

Skenario empat merepresentasikan kondisi terburuk yang disebut dengan **disintegrasi demokrasi**, di mana kualitas SDM berada di titik rendah akibat gagalnya penyelenggaraan pendidikan yang utuh. Tidak terlaksananya pendidikan integral dengan baik menyebabkan lemahnya kompetensi warga negara, baik secara teknis maupun sosial-politik. Hal ini membatasi peluang mereka untuk mengakses pasar kerja yang layak dan mempersempit ruang partisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas SDM juga berdampak pada rendahnya daya saing industri domestik yang gagal terhubung dengan GVC, sehingga memperparah keterisolasian ekonomi Indonesia dalam konteks global.

Kondisi ini menciptakan keputusasaan ganda. Menjadikan kelas menengah berada dalam posisi yang rentan secara ekonomi sekaligus terisolasi dari ruang-ruang aktualisasi politik. Ketika pekerjaan tidak memberikan jaminan hidup yang layak dan pendidikan gagal menumbuhkan kesadaran berdemokrasi, maka partisipasi politik

yang lahir bersifat dangkal, oportunistis, atau bahkan apatis. Lebih jauh, masyarakat dapat mengalami alienasi politik dan merasa tidak berdaya.

Dalam situasi ekstrem, alienasi ini berpotensi menjadi lahan subur bagi lahirnya gerakan politik antidemokrasi, yang justru mengancam keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, skenario ini menggambarkan situasi di mana kegagalan dalam membangun kualitas manusia dan struktur ekonomi yang sehat akan berbalik menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik dan keberlanjutan demokrasi.

Tabel 5. Lintasan Proyeksi Kelas Menengah dan Demokrasi

Skenario	Posisi Kelas Menengah	Pola Relasi terhadap Negara	Implikasi terhadap Demokrasi
Konsolidasi Demokrasi	Tercipta basis kelas menengah kritis yang besar	Otonom terhadap negara dan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan nondemokratis	Demokrasi terkonsolidasi secara substansial, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap keresahan masyarakat
Demokrasi Mandek	Kelas menengah kritis tidak berkembang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi terhadap negara	Ambivalen: sebagian kecil berposisi, sebagian besar kompromistis karena ketergantungan ekonomi kepada negara	Pikiran tentang prinsip demokrasi tumbuh di masyarakat, akan tetapi tidak bisa bergerak ke arah demokrasi substansial
Demokrasi Kosmetik	Masyarakat tumbuh stabil secara ekonomi, akan tetapi terfragmentasi dan cenderung apolitis	Tidak peduli dengan isu publik selama kesejahteraannya terjaga dan kelas menengah lebih individualistis	Demokrasi hanya bersifat prosedural, kehilangan fondasi partisipasi, dan deliberasi
Disintegrasi Demokrasi	Kelas menengah menjadi sangat kecil dan rentan karena rendahnya kualitas pendidikan dan instabilitas ekonomi	Tidak berdaya dan mengalami keputusasaan. Dalam kondisi ekstrem dapat melahirkan gerakan ekstrem dan menggulingkan demokrasi	Tingkat kepercayaan terhadap sistem dan institusi demokrasi menjadi semakin lemah, yang dapat berujung pada menangnya gerakan ekstrem antidemokrasi

Monograf ini secara khusus akan menyoroti strategi untuk mendorong tercapainya **skenario pertama**, yaitu demokrasi yang terkonsolidasi. Fokus kebijakan akan diarahkan kepada upaya menciptakan pekerjaan yang berkualitas dan pendidikan yang inklusif sebagai prasyarat utama dalam memperkuat kelas menengah yang berdaya secara ekonomi dan sadar secara politik.

Merujuk dari pengembangan skenario konsolidasi demokrasi, maka monograf ini secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi strategi-strategi intervensi yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat kelas menengah kritis agar tidak hanya berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran politik yang memadai. Uraian berikutnya akan fokus kepada dua faktor kunci yang telah ditentukan, yakni tersedianya pekerjaan yang layak dan berkualitas dari sektor privat, serta sistem pendidikan integral.

Pekerjaan Berkualitas Sebagai Fondasi Kelas Menengah Kritis

Kondisi atau kualitas pekerjaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Kualitas pekerjaan yang baik akan membantu individu untuk naik kelas ekonomi.¹⁴⁶ Dalam kaitannya dengan demokrasi, sistem ini dipandang mampu menyediakan kepastian institusional dalam jangka panjang.¹⁴⁷ Beberapa penelitian juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti sifat (formal/informal), struktur, dan pengalaman dalam bekerja turut memengaruhi *political efficacy*, kepercayaan terhadap institusi, dan kapasitas partisipatif politik seseorang dalam berdemokrasi.¹⁴⁸

Dalam banyak kasus, negara-negara dengan tingkat partisipasi kerja tinggi cenderung memiliki tingkat demokrasi yang lebih kuat. Ketika proporsi penduduk bekerja meningkat, maka akan semakin banyak individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan partisipasi politik—ketersediaan waktu, sumber daya, dan kesadaran kolektif. Sebagai contoh adalah negara-negara Nordik (Norwegia, Swedia, Denmark) dengan partisipasi kerja tinggi secara konsisten menempati peringkat atas dalam Indeks Demokrasi EIU.¹⁴⁹ Sebaliknya, kondisi menganggur dan hilangnya akses terhadap ekonomi formal dapat menurunkan kapasitas partisipasi politik dan memperbesar risiko alienasi politik, yaitu ketidakpercayaan terhadap institusi politik yang berujung kepada perilaku apatis.

Di sisi lain, kondisi pengangguran berpotensi memengaruhi partisipasi sosial-politik. Ketidakamanan kerja (*job insecurity*) dapat mendorong mobilisasi masa (*grievance-based mobilization*) yang dipicu oleh rasa frustrasi dan ketidakadilan, dalam bentuk protes publik, unjuk rasa, atau keterlibatan dalam gerakan sosial lainnya.¹⁵⁰ Dengan kata lain, kondisi menganggur tidak selalu identik dengan eksklusivitas politik, ia juga dapat menjadi pemantik keterlibatan sipil, tergantung pada konteks struktural dan tersedia atau tidaknya kanal partisipasi yang terbuka dan inklusif. Tulisan lain menyoroti bahwa demonstrasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh individu yang menganggur,

¹⁴⁶ Teguh Dartanto, Faizal Rahmanto Moeis, Shigeru Otsubo, "Intragenerational Economic Mobility in Indonesia: A Transition from Poverty to the Middle Class in 1993–2014", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, (2020): 42–43.

¹⁴⁷ Bahar Leventoglu, "Social Mobility, Middle Class and Political Transitions," *Journal of Conflict Resolution* 58, no. 5 (2003): 3

¹⁴⁸ Bram Geurkink et al, "Political Participation and Workplace Voice: The Spillover of Suppression by Supervisors," *Political Studies* 70, no. 2 (2022): 329-330

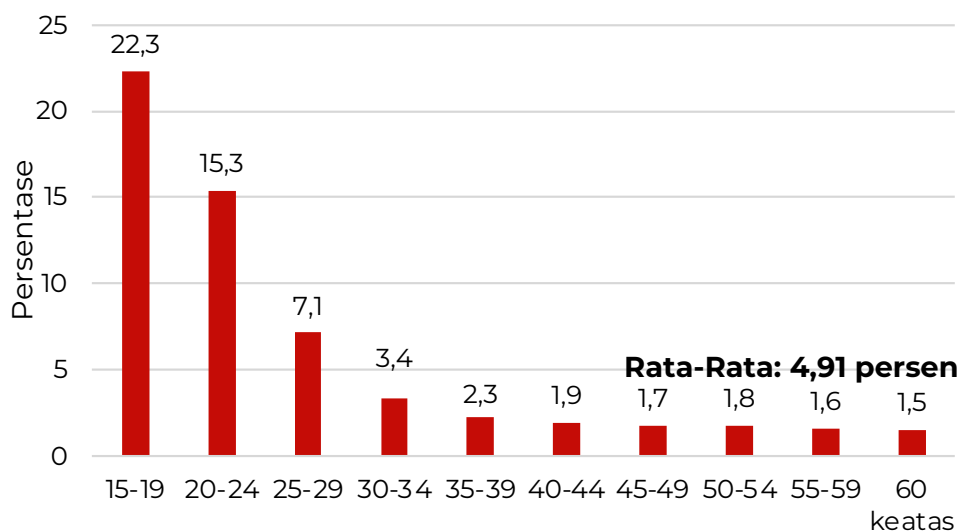
¹⁴⁹ OECD Indicator, Employment Rate, diakses 25 Juli 2025, <https://www.oecd.org/en/data/indicators/employment-rate.html?oecdcontrol-40985420ae-var3=1955>

¹⁵⁰ Mindy Shoss et al., "The Job Insecurity of Others: On the Role of Perceived National Job Insecurity during the COVID-19 Pandemic," *Economic and Industrial Democracy* (2023), dikutip dalam Eva Selenko et al., "The Political Consequences of Work: An Integrative Review," *Journal of Management* (2025): 2356

cenderung sporadis dan sulit terlembagakan.¹⁵¹ Kelemahan ini disebabkan oleh besarnya biaya peluang (*opportunity cost*) yang dihadapi individu tanpa pekerjaan tetap, di mana waktu dan energi untuk berpolitik harus bersaing dengan kebutuhan mendesak untuk mencari nafkah.¹⁵²

Di Indonesia, data per tahun 2024 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen, di mana TPT penduduk kelompok umur muda (15–24 tahun) merupakan TPT tertinggi, yaitu mencapai 22,3 persen.¹⁵³ Apabila direfleksikan dengan penjelasan sebelumnya, maka TPT yang rendah memberi kesan risiko alienasi politik yang rendah. Akan tetapi, data ini perlu dipahami dengan kaca mata kritis. Batasan definisi bekerja yang digunakan oleh BPS sangat rendah, yakni mendapat upah dari satu jam bekerja. Konsekuensinya adalah setiap individu yang bekerja serabutan secara statistik akan terhitung bekerja. Oleh karena itu, butuh melihat komposisi jenis pekerjaan. Bila ditelusuri lebih dalam, maka tampak bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis ketersediaan lapangan kerja berkualitas. Data BPS per Februari 2025 menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal Indonesia masih mendominasi total angkatan kerja, yaitu sekitar 58 persen, sementara pekerja formal baru mencakup sekitar 42 persen dari total populasi bekerja.¹⁵⁴ Kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan kapasitas partisipasi politik individu yang akhirnya berdampak kepada kualitas demokrasi.

Bagan 19. Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Berdasarkan Kelompok Umur, 2024¹⁵⁵



¹⁵¹ Arman Azedi, "Does Job Insecurity Motivate Protest Participation? A Multilevel Analysis of Working-Age People from 18 Developed Countries," *Sociological Perspectives* (2023), dikutip dalam Eva Selenko, "The Political Consequences of Work: An Integrative Review," *Journal of Management* (2025): 2375

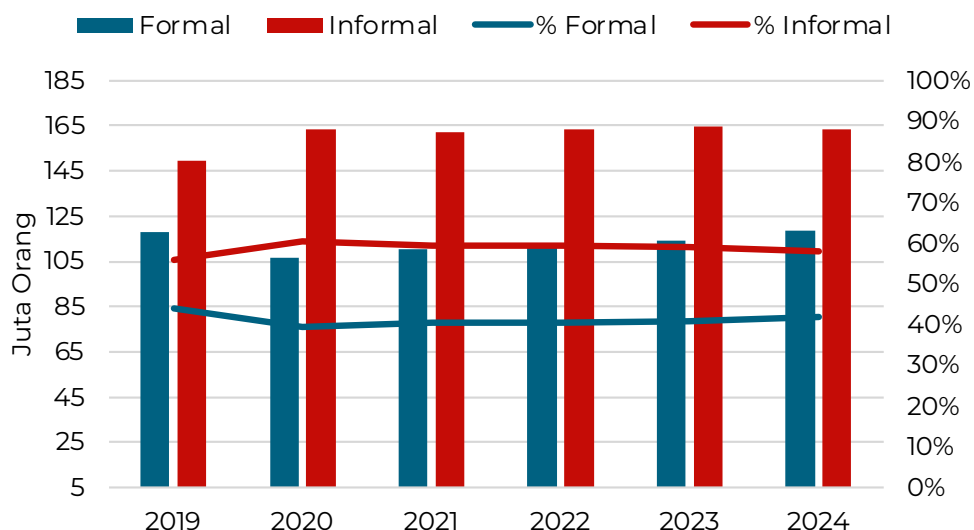
¹⁵² Wawancara bersama Dewa Gede Karma Wisana (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 15 Juli 2025).

¹⁵³ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik* (25 Juli 2025): 11.

¹⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik* (25 Juli 2025), 5.

¹⁵⁵ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur, 2024," diakses pada Juli 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MCMY/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur.html>.

Bagan 20. Jumlah Pekerja Indonesia Menurut Jenis Pekerjaan, 2019-2024¹⁵⁶



Pekerjaan formal yang stabil dan terorganisir tidak hanya menyediakan penghasilan dan jaminan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran politik. Dalam struktur pekerjaan formal, seorang individu pada umumnya lebih terhubung dengan struktur kerja yang terorganisir seperti forum bipartit, kontrak kerja, atau skema jaminan sosial yang berpotensi memperkuat kapasitas partisipasi sipil mereka.¹⁵⁷ Sebaliknya, pekerja informal cenderung menjalani kehidupan kerja yang terisolasi secara kelembagaan dan minim peluang untuk mengartikulasikan kepentingan kolektif.¹⁵⁸ Ketika mayoritas individu bekerja dalam kondisi informal yang terisolasi, mereka kehilangan pengalaman sosial yang setara dan kesempatan kolektif yang diperlukan untuk memperkuat demokrasi.

Refleksi dari uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak individu yang bekerja, tetapi juga oleh bagaimana pengalaman kerja itu membentuk kapasitas partisipatif dan kesadaran politik mereka. Ketika mayoritas individu berada dalam pekerjaan informal yang terfragmentasi dan tidak terhubung dengan struktur kelembagaan, maka partisipasi politik cenderung bersifat sporadis, tidak terlembagakan, dan mudah teredam oleh tekanan ekonomi.¹⁵⁹ Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang substantif dibutuhkan jaminan lapangan pekerjaan berkualitas yang inklusif secara sosial, representatif secara institusional, dan memperkuat kapasitas politik setiap individu.

¹⁵⁶ Diolah dari Badan Pusat Statistik, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi (%), 2024," diakses pada Juli 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html>.

¹⁵⁷ Edward S. Greenberg, Leon Grunberg, L., & Kelley Daniel. "Industrial Work and Political Participation: Beyond Simple Spillover," *Political Research Quarterly* (1996), dikutip dalam Bram Geurkink et al, Political Participation and Workplace Voice: The Spillover of Suppression by Supervisors, *Political Studies* (2022): 329

¹⁵⁸ Bram Geurkink, Akkerman, Sluiter, "Political Participation and Workplace Voice: The Spillover of Suppression by Supervisors," *Political Studies* (2022): 341".

¹⁵⁹ Wawancara bersama Teguh Dartanto (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 25 Juni 2025).

Menghadapi kondisi ini, dibutuhkan langkah intervensi yang tidak sekadar menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan formalitas pekerjaan. Contoh langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan memangkas biaya dan durasi legalisasi usaha, serta merancang sistem pajak dan jaminan sosial yang adil dan terjangkau bagi pekerja serta pelaku usaha kecil.¹⁶⁰ Intervensi ini penting agar status memiliki pekerjaan tidak hanya menjadi alat bertahan hidup, tetapi juga menjadi medium pembentukan warga negara yang otonom secara ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, monograf ini menekankan pada pentingnya upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keterbukaan ekonomi.

Keterbukaan Ekonomi Sebagai Keniscayaan

Keterbukaan ekonomi mencerminkan sejauh mana suatu negara terintegrasi dengan ekonomi global dan berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi nasional. Dalam hal ini, transmisinya dapat dijelaskan melalui tingkat perdagangan bebas dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*).¹⁶¹ Prinsip perdagangan bebas berdasarkan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan David Ricardo, menganjurkan setiap negara untuk melakukan spesialisasi produksi komoditas berdasarkan efisiensinya dalam rantai pasok global (*global value chains/GVC*). Pendekatan ini memungkinkan tercapainya skala ekonomi, di mana peningkatan volume produksi dapat dicapai bersamaan dengan penurunan biaya produksi per unit.¹⁶²

Berbasis keunggulan komparatif, negara berkembang dapat diuntungkan dengan menjadi bagian dari rantai pasok global. Keterhubungan dengan produksi global akan meningkatkan ekspor komponen *intermediate*, memperoleh akses terhadap teknologi dan pasar baru, serta mendorong peningkatan produktivitas melalui transfer pengetahuan dan kapabilitas produksi dari mitra dagang yang lebih maju.¹⁶³ Integrasi pasar domestik ke dalam rantai pasok global juga akan mendorong modernisasi ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kompetisi antara pasar domestik dan pasar global, yang pada gilirannya akan menguatkan struktur industri nasional.¹⁶⁴

Terkait dengan FDI, keterlibatan perusahaan multinasional (*Multinational Corporations/MNCs*) menjadi elemen krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Meskipun terdapat pandangan yang menganggap MNCs sebagai entitas yang melakukan eksploitasi, akan tetapi MNCs juga menawarkan manfaat strategis melalui transfer modal, teknologi, dan praktik manajerial yang lebih

¹⁶⁰ Carlos Kuriyama dan Eldo Malba Simanjuntak, "Addressing Informality: Transitioning to the Formal Economy," *APEC Policy Brief* (2024): 9-10.

¹⁶¹ Rafael Reuveny and Quan Li, "Economic Openness, Democracy, and Income Inequality," *Sage Publications* 36, no. 5 (2003): 576; DOI: 10.1177/0010414003251882.

¹⁶² Paul R. Krugman et al., *International Economics: Theory & Policy* (Pearson, 2012), 45.

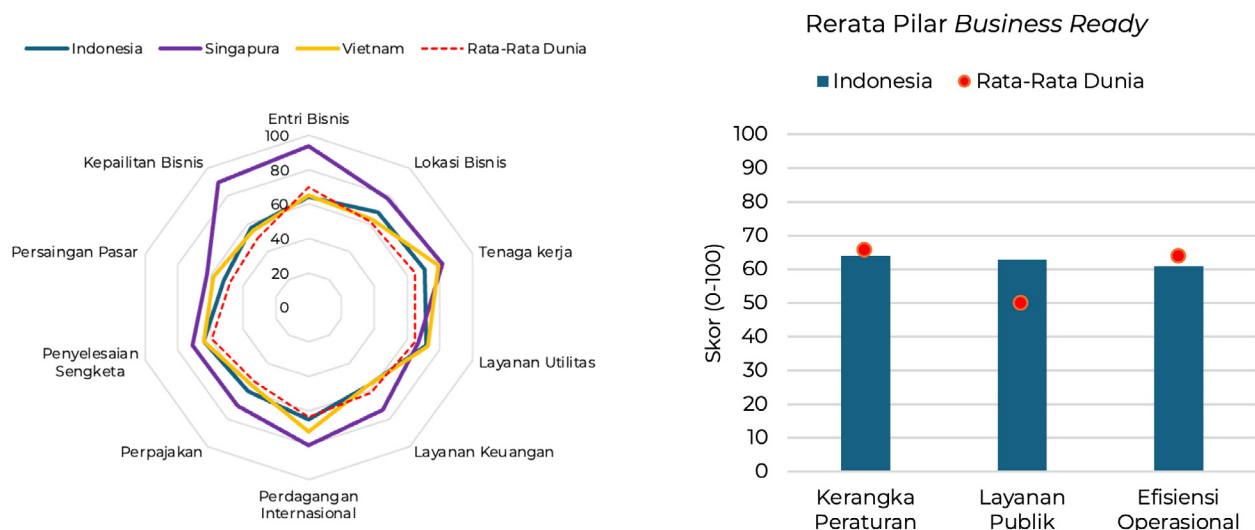
¹⁶³ OECD, *Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains* (OECD Publishing, 2013), <http://dx.doi.org/10.1787/9789264189560-en>.

¹⁶⁴ Krugman et al., *International Economics*, 174-175

maju.¹⁶⁵ Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang.¹⁶⁶ Selain itu, efek limpahan (*spillover*) dari FDI akan mendorong perluasan lapangan kerja di sektor formal.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, partisipasi dalam keterbukaan ekonomi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Akan tetapi, Indonesia sendiri masih menghadapi pelbagai tantangan dalam mendorong keterbukaan tersebut. Pertama, keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global (GVC) masih didominasi oleh ekspor bahan mentah (*raw materials*). Sementara ekspor produk *intermediate* masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mengolah produk ekspornya, yang didominasi oleh hasil ekstraksi sumber daya, menjadi produk bernilai tambah tinggi. Akibatnya, posisi Indonesia dalam GVC lebih banyak berperan sebagai pemasok input produksi bagi negara lain (Forward Participation). Situasi ini erat kaitannya dengan lemahnya hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri. Kedua, rasio FDI terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai level 1,57 persen,¹⁶⁷ terpaut jauh dari target RPJPN 2045 sebesar 4,5 persen dari PDB.¹⁶⁸ Ketiga, sejumlah tantangan teknis seperti proses pendirian dan legalisasi usaha yang berbelit, kebijakan TKDN yang menghambat, serta inefisiensi logistik domestik makin memperburuk daya saing iklim usaha di Indonesia.

Bagan 21. Penilaian *Business Ready* Indonesia, 2024¹⁶⁹



¹⁶⁵ Reuveny dan Li, "Economic Openness, Democracy, and Income Inequality," 2.

¹⁶⁶ Borenszstein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. (1994). *How does foreign direct investment affect economic growth?* (IMF Paper No. WP/94/110). Washington, DC: International Monetary Fund.

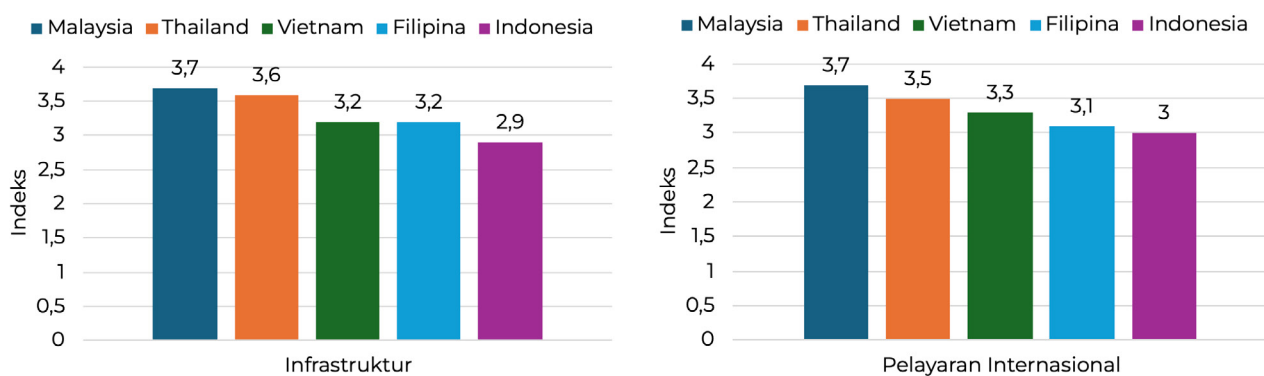
¹⁶⁷ "Foreign Direct Investment, Net Inflows (persen of GDP) – Indonesia," World Bank, <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?locations=ID>.

¹⁶⁸ Kementerian PPN/Bappenas, *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), 13.

¹⁶⁹ Diolah dari World Bank, *Business Ready 2024: Indonesia* (The World Bank, 2024), 1; World Bank, *Business Ready 2024: Singapura* (The World Bank, 2024), 1; World Bank, *Business Ready 2024: Viet Nam* (The World Bank, 2024), 1.

Berdasarkan laporan *Business Ready 2024* yang dirilis oleh Bank Dunia, pendirian usaha di Indonesia masih tergolong berbelit dan menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan rendahnya minat perusahaan swasta, khususnya asing, untuk memulai bisnis di Indonesia. Salah satu kendala yang menonjol adalah regulasi yang tumpang tindih dan implementasi di lapangan yang belum selaras. Sebagai gambaran, perusahaan asing baru membutuhkan waktu sampai 65 hari untuk mendaftarkan izin usaha di Indonesia,¹⁷⁰ jauh lebih lambat dibandingkan dengan Singapura yang hanya memerlukan waktu sekitar 15 hari.¹⁷¹ Selain itu, dibutuhkan sekitar 45 hari untuk pelaku usaha memperoleh izin bangunan,¹⁷² sedangkan di Singapura hanya membutuhkan waktu 14 hari.¹⁷³

Bagan 22. Komparasi Nilai Infrastruktur dan Pelayaran Internasional dalam *Logistics Performance Index (LPI)*¹⁷⁴



Tingginya biaya logistik dan layanan distribusi yang belum efisien di pelbagai wilayah masih menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan bisnis yang efisien. Menurut *Logistics Performance Index (LPI) 2023* yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia masih tertinggal dibandingkan empat negara ASEAN lainnya dalam hal efisiensi infrastruktur logistik. Kesenjangan ini tidak terlepas dari belum meratanya kualitas infrastruktur fisik di Indonesia, baik infrastruktur udara, darat, laut.¹⁷⁵ Sebagai contoh, rendahnya integrasi antarpelabuhan dan lambatnya proses bongkar muat barang di pelabuhan menjadi faktor yang membuat kualitas layanan logistik Indonesia relatif lemah dibandingkan negara lain di ASEAN.¹⁷⁶ Hambatan-hambatan tersebut berimplikasi pada tingginya biaya transaksi ekonomi dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia

¹⁷⁰ World Bank, *Business Ready 2024: Indonesia*, 6.

¹⁷¹ World Bank, *Business Ready 2024: Singapura*, 6.

¹⁷² World Bank, *Business Ready 2024: Indonesia*, 14.

¹⁷³ World Bank, *Business Ready 2024: Singapura*, 14.

¹⁷⁴ Diolah dari World Bank, *Connecting to Compete 2023 Trade Logistics In An Uncertain Global Economy* (World Bank, 2023), 33

¹⁷⁵ Indah Lestari et al., *Kompetisi Arsitektur Konektivitas Global: Posisi dan Opsi bagi Indonesia* (Laboratorium Indonesia 2045, 2023), 70.

¹⁷⁶ Antara, "Integrasi Pengelolaan Pelabuhan Upaya Tingkatkan Daya Saing Indonesia," Antara News, 14 September 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2306362/integrasi-pengelolaan-pelabuhan-upaya-tingkatkan-daya-saing-indonesia>.

dalam rantai pasok global.

Kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)—kebijakan ini pada hakikatnya didesain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lokal—memiliki *unintended consequences* atau konsekuensi yang tidak diinginkan yakni menghambat partisipasi dalam GVC. Dalam banyak kasus, aturan wajib TKDN minimal 40 persen membuat pelaku industri beroperasi dengan tidak efisien, sebabnya input produksi yang berasal dari dalam negeri cenderung lebih mahal. Biaya produksi yang lebih mahal membuat produk Indonesia tidak kompetitif di pasar global. Alih-alih mempercepat industrialisasi, kebijakan TKDN yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas industri lokal, justru menjadi kebijakan yang menghambat.¹⁷⁷

Untuk memaksimalkan manfaat keterbukaan ekonomi, Indonesia dapat melakukan deregulasi yang mendorong industrialisasi dan hilirisasi produk bernilai tambah tinggi. Deregulasi dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis yang kompetitif dan efisien bagi swasta. Dalam pelaksanaannya, deregulasi harus disokong oleh pemerintahan yang kredibel.¹⁷⁸ Artinya, pemerintah harus menjamin tata kelola yang transparan, cepat, dan tanpa korupsi.

Dalam konteks Indonesia, deregulasi dapat diperkuat melalui desentralisasi.¹⁷⁹ Desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang regulasi investasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, kebijakan deregulasi tidak hanya bersifat *top-down*, melainkan mampu menyesuaikan dengan keragaman kondisi di daerah. Dengan begitu, diharapkan kebijakan investasi dan industrialisasi dapat direspons dengan lebih cepat dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

Namun, pendekatan ini membawa tantangan serius. Kesenjangan kapasitas manajerial antardaerah membuat tidak semua pemerintah daerah mampu mengelola kebijakan investasi secara efektif. Tantangan ini tercermin dalam tingkat kemandirian fiskal di daerah. Pada tahun 2025, hanya sembilan dari 38 provinsi di Indonesia yang berstatus mandiri fiskal (rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 50–75 persen).¹⁸⁰ Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan pemerintah daerah dalam mengelola ekonominya. Lebih jauh lagi, desentralisasi wewenang investasi tanpa

¹⁷⁷ Kendala regulasi yang menghambat pelibatan swasta seperti kewajiban TKDN sebaiknya dipertimbangkan kembali. Sebagai bentuk alternatif strategi, Rizal Taufikurrahman sebagai Kepala Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menekankan model kebijakan *performance-based localization*. Model ini menekankan bahwa pemberian insentif fiskal maupun preferensi dalam pengadaan pemerintah sebaiknya tidak lagi semata didasarkan pada pemenuhan angka minimal TKDN secara kuantitatif, tetapi harus dikaitkan langsung dengan kontribusi realisasi investasi, penguatan kapasitas rekayasa dan transfer teknologi lokal, serta penyerapan tenaga kerja domestik.

¹⁷⁸ Wawancara bersama Jahen Fachrul Rezki (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 15 Juli 2025).

¹⁷⁹ Wawancara bersama Teguh Dartanto (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 25 Juni 2025).

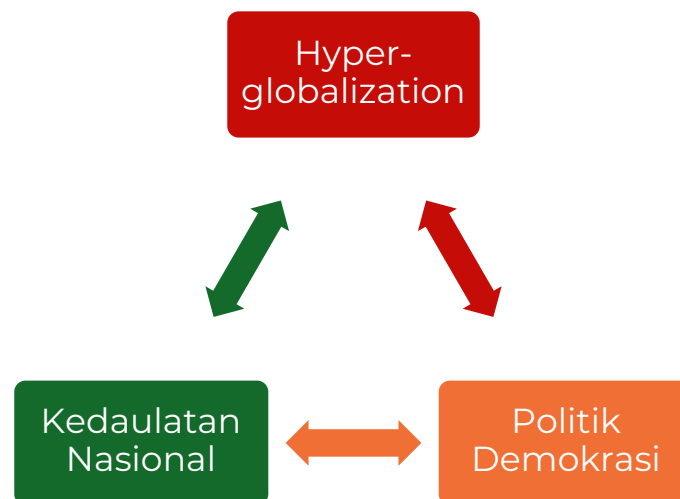
¹⁸⁰ Kementerian Keuangan, "Postur APBD Tahun 2025," diakses pada Agustus 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.

penguatan kapasitas kelembagaan berisiko menimbulkan ketimpangan antardaerah, di mana daerah dengan kelembagaan yang kuat akan semakin maju sementara daerah yang lemah kian tertinggal. Oleh karena itu, agenda desentralisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu menciptakan iklim investasi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Mencari Titik Tengah Keterbukaan Ekonomi

Meski memiliki sejumlah manfaat, upaya “membuka” ekonomi seyogianya diimplementasikan dengan penuh kehati-hatian. Dani Rodrik mengenalkan sebuah kerangka pikir yang ia sebut *Political Trilemma of the World Economy*. Ia menekankan bahwa dinamika ekonomi dunia senantiasa menunjukkan ketegangan antara tiga elemen utama, yakni globalisasi ekonomi penuh (*hyper-globalization*), kedaulatan nasional, dan demokrasi. Secara sederhana, Rodrik hendak menekankan bahwa mengejar *hyper-globalization* memiliki konsekuensi negatif terhadap kedaulatan dan demokrasi di sebuah negara, sebab negara harus mematuhi dan menyesuaikan kebijakannya dengan standar kebijakan yang telah ditentukan di tingkat global. Arah kebijakan ini menjadi bermasalah karena standar global tidak selalu merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat nasional, melainkan kepentingan dari negara atau bisnis yang kuat. Manakala terjadi perbedaan kepentingan antara aturan global dan kepentingan nasional, maka kepentingan nasionallah yang cenderung akan “dikorbankan”. Situasi menjadi semakin sulit ketika satu negara dilanda krisis ekonomi, sebab manuver kebijakan menjadi semakin terbatas.¹⁸¹

Bagan 23. Political Trilemma of the World Economy¹⁸²



¹⁸¹ Rodrik menggunakan contoh Uni Eropa sebagai bentuk yang mendekati *hyper-globalization*. Pada saat terjadi krisis Zona Eropa sekitar tahun 2009, Yunani menghadapi situasi yang sangat sulit. Integrasi ekonomi dengan Uni Eropa membuat Yunani tidak memiliki kendali atas kebijakan moneter dan fiskalnya. Alhasil, ketika krisis terjadi, Yunani tidak bisa leluasa menggunakan kebijakan moneter dan fiskalnya untuk melakukan pemulihan ekonomi, sehingga ia harus bergantung kepada bantuan pinjaman dengan prasyarat *austerity*. Beban kebijakan ini pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat Yunani.

¹⁸² Dani Rodrik, *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy* (W. W. Norton & Company, Inc, 2011) 185.

Mengacu pada penjelasan tersebut, Rodrik mengusulkan untuk mencari titik tengah antara globalisasi, kedaulatan nasional, dan demokrasi. Menurutnya, hanya melalui dengan cara ini, setiap negara dapat memperoleh manfaat dari keterbukaan ekonomi tanpa harus kehilangan kendali dalam menentukan kebijakan ekonomi yang dibutuhkan. Dalam konteks Indonesia, tulisan ini menilai masih ada ruang yang besar untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi. Ruang besar ini tercermin salah satunya dari tingkat perdagangan internasional Indonesia terhadap PDB yang masih berkisar 43 persen pada tahun 2024. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura (322 persen), Malaysia (137 persen), bahkan Meksiko (75 persen) yang memiliki ukuran perekonomian relatif mirip dengan Indonesia.¹⁸³ Temuan ini mencerminkan bahwa struktur ekonomi Indonesia masih cenderung berorientasi pada pasar domestik (*inward looking*). Agar keterbukaan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap pembangunan nasional, diperlukan strategi yang tidak hanya membuka pasar, tetapi juga mengelola reformasi institusional secara menyeluruh. Dalam konteks ini, negara dapat berperan aktif tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga turut menciptakan ekosistem pasar untuk menopang transformasi ekonomi jangka panjang.¹⁸⁴ Menilik konsep *developmental state* dan *entrepreneurial state* menjadi relevan bagi Indonesia.

Konsep *developmental state* menekankan fungsi negara sebagai aktor yang menopang dan mengarahkan proses industrialisasi melalui kebijakan insentif, proteksi selektif, insentif, perlindungan selektif, deregulasi yang terukur, serta kebijakan disiplin pasar agar sektor industri mampu tumbuh kompetitif. FDI maupun pinjaman luar negeri diarahkan tidak sekadar untuk menambah modal, tetapi juga untuk transfer teknologi dan modernisasi industri, sebagaimana ditunjukkan oleh Korea Selatan pada akhir 1970-an.¹⁸⁵ Model *developmental state* hanya dapat berhasil bila negara memiliki kapasitas institusional yang kuat, terutama melalui birokrasi yang profesional dan relatif otonom dari kepentingan politik dan pasar. Negara dalam hal ini tidak boleh berperan sebagai patron, melainkan sebagai fasilitator yang menyalurkan insentif berbasis performa swasta dan target yang jelas. Tanpa kapasitas tersebut, kebijakan industrialisasi rawan berubah menjadi rente dan kolusi seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) seperti saat ini, logika *developmental state* dapat dilengkapi dengan pendekatan *entrepreneurial state*. Di dalam persaingan ekonomi berbasis pengetahuan, keunggulan ekonomi satu negara tidak hanya diukur berdasarkan kapasitas infrastruktur dan industrinya,

¹⁸³ "Trade (Percentage of GDP) – Indonesia, Singapore, Malaysia, Mexico," World Bank, <https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=ID-SG-MY-MX>.

¹⁸⁴ Verena Fritz dan Alina Rocha Menocal, "(Re)building Developmental States: From Theory to Practice" Working Paper 274 (Overseas Developmental Institute, 2006), 3.

¹⁸⁵ John L. Enos dan Woo-Hee Park, *The Adoption and Diusion of Imported Technology: The Case of Korea* (Routledge, 1988); Kim Linsu, *Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea's Technological Learning* (Harvard Business School Press, 1997), 42-43, dalam Jaedo Choi dan Younghun Shim, "Technology Adoption and Late Industrialization," Working Paper (STEG, 2023), 5-7.

tapi juga kapasitas *Research and Development* (R&D), penciptaan ekosistem inovasi, dan penerapan teknologi baru dalam proses produksi. Model *entrepreneurial state* menggarisbawahi fungsi aktif pemerintah untuk menciptakan pasar baru melalui dukungan terhadap inovasi, riset, dan teknologi yang bersifat eksperimental dan berisiko.¹⁸⁶

Korea Selatan menjadi contoh negara yang berhasil melakukan lompatan tersebut, di mana mereka telah bergeser dari model *input-driven economy* menuju *technology intensive and knowledge-based innovation system*. Sistem tersebut bertumpu pada penguatan kapabilitas teknologi dan investasi R&D yang melibatkan tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah (UKM), agar rantai inovasi terus berjalan.¹⁸⁷

Sebagai langkah awal, pemerintah dapat berfokus pada dua hal utama yakni kemudahan investasi dan efisiensi logistik. Terkait kompleksitas regulasi dan iklim usaha, diperlukan reformasi regulasi yang menekankan pada penyederhanaan perizinan, harmonisasi aturan antara pusat dan daerah, serta penghapusan kebijakan yang tumpang tindih. Akselerasi digitalisasi layanan publik juga harus diprioritaskan. Tidak hanya sebagai upaya mempercepat proses bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi yang selama ini menjadi hambatan. Di sisi lain, untuk memperluas keterlibatan dalam GVC, Indonesia perlu melakukan deregulasi sektor jasa, khususnya pada bidang logistik dan maritim yang banyak bersinggungan dengan isu tingginya biaya logistik.¹⁸⁸

Bagi Indonesia, mengadopsi kombinasi kerangka *developmental state* dan *entrepreneurial state* secara bertahap mampu memperkuat fondasi kapasitas domestik melalui industrialisasi, sembari menumbuhkan ekonomi berbasis pengetahuan yang lebih luas. Lebih dari itu, pendekatan ini juga berpotensi mendorong distribusi ekonomi yang lebih adil, di mana tidak hanya mengandalkan konglomerasi besar saja namun juga membuka ruang bagi UKM dan perusahaan rintisan skala kecil (*start-up*) untuk turut berkontribusi. Dengan demikian, arah pembangunan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perluasan basis kelas menengah yang produktif dan berdaya. Pada gilirannya, kelas menengah yang makin kuat ini akan menjadi pilar penting bagi penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

¹⁸⁶ Mariana Mazzucato, *The Entrepreneurial State* (Demos, 2011), 53.

¹⁸⁷ Hyeong Ki Kwon, *Changes by Competition: The Evolution of South Korean Developmental State* (Oxford University Press, 2021), 36.

¹⁸⁸ Biyan Shandy dkk, *Unlocking Indonesia's Economic Potential Through OECD Accession* (Center for Indonesia Policy Studies, 2025), 5.

Peran Ganda Pendidikan

“A democratic society is responsible for educating not just some but all children for citizenship” - **John Dewey**¹⁸⁹

Dalam studi ilmu politik dan ekonomi, pendidikan sejak lama dipandang memiliki pengaruh positif terhadap penguatan demokrasi.¹⁹⁰ Pengaruh ini setidaknya dapat dicermati melalui dua peran utama pendidikan. Pertama, pendidikan yang memadai memungkinkan individu memperoleh keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja formal, yang pada gilirannya meningkatkan peluang untuk memperoleh penghasilan stabil, jaminan sosial, dan ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas.¹⁹¹

Ketika seseorang memiliki pekerjaan yang layak, ia akan cenderung lebih berdaya secara ekonomi, memiliki waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan sosial-politik, serta tidak mudah terjebak dalam praktik politik yang manipulatif. Lebih lanjut lagi, dengan setiap individu memiliki kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas, maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin kecil, sehingga akan tercipta sistem demokrasi yang lebih stabil.¹⁹²

Kedua, pendidikan sejak lama dipandang sebagai fondasi penting bagi terbentuknya budaya demokrasi. Putnam menyebut pendidikan sebagai indikator terbaik untuk menilai tingkat partisipasi sipil individu.¹⁹³ Bahkan di dalam sistem otoriter sekalipun, pendidikan tetap berpotensi membuka ruang tumbuhnya nilai-nilai demokrasi di kalangan pelajar.

Pendidikan akan membekali siswa dengan kemampuan verbal, analitis, dan kritis, yang dibutuhkan untuk memudahkan dalam memahami manfaat dan memupuk nilai-nilai politik yang demokratis.¹⁹⁴ Selain itu, pendidikan membantu individu untuk memahami dan memaknai situasi sosial-politik yang berkembang. Melalui pendidikan, masyarakat akan memiliki kesadaran politik dan kemampuan untuk mengendalikan jalannya pemerintahan, sehingga terbentuk Masyarakat sipil yang hidup dan dinamis.¹⁹⁵

¹⁸⁹ Gutmann, *Democratic Education*, 13.

¹⁹⁰ Ciqdem Karis dan Dilek Tandogan, “The Effect of Education on Democracy: Panel Data Analysis of High Income Countries,” *Universal Journal of Educational Research* 7, no. 11 (2019): 2426, DOI: 10.13189/ujer.2019.071120.

¹⁹¹ Edward L. Glaeser, Giacomo A. M. Ponzetto, dan Andrei Shleifer, “Why does Democracy Need Education?,” *J Econ Growth* 12 (2007): 77.

¹⁹² Eduardo Alemán dan Yeaji Kim, “The democratizing effect of education,” *Research and Politics* (2015): 2, DOI: 10.1177/2053168015613360.

¹⁹³ Thomas S Dee, “Are there civic returns to education?,” *Journal of Public Economics* 88 (2004): 1700.

¹⁹⁴ Marcus Österman dan Darrel Robinson, “Educating Democrats or Autocrats? The Regime-Conditional Effect of Education on Support for Democracy,” *Political Studies* 1–23 (2022): 4.

¹⁹⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, “Membangun Demokrasi Melalui Pendidikan,” *Suara Unpar*, 4 Desember 2015, <https://unpar.ac.id/membangun-demokrasi-melalui-pendidikan/>

Selaras dengan itu, Lipset memandang bahwa pendidikan dapat memperluas cara pandang seseorang, membuat ia mampu memahami kebutuhan akan pentingnya toleransi dan perbedaan, serta dapat mengarahkan seseorang menjadi pemilih rasional (*rational voters*), yakni pemilih yang menggunakan kalkulasi rasional dalam menentukan pilihan politik sehingga dapat meredam polarisasi primordial yang dapat merusak esensi demokrasi.¹⁹⁶

Namun demikian, beberapa studi memberikan contoh bahwa pendidikan tidak hanya menjadi instrumen memupuk nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menjadi instrumen kontrol yang dijalankan oleh pemerintahan otoriter. Hal ini dilakukan dengan cara membentuk kurikulum pendidikan dengan orientasi mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kepentingan rezim seperti yang terjadi di Uni Soviet, Portugal pada era Salazar, dan Tiongkok.¹⁹⁷

Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa dilihat sebagai sebuah hal yang netral. Ia adalah medan kontestasi ideologis yang harus dimenangkan, apakah akan menjadi sarana emansipasi atau justru internalisasi kepatuhan pada rezim. Berangkat dari penjelasan di atas, berikutnya akan dijelaskan bagaimana peran ganda pendidikan dalam konteks Indonesia dan langkah apa yang perlu diambil untuk menjadikan pendidikan sebagai titik tumbuh demokrat baru.

Fungsi Ekonomi dari Pendidikan

Studi Bank Dunia menemukan bahwa perluasan akses terhadap pendidikan telah berkontribusi pada penurunan kemiskinan global (menggunakan garis kemiskinan, konsumsi 2,15 Dolar AS per hari) dari 44 persen pada tahun 1981, menjadi 9 persen pada tahun 2022.¹⁹⁸ Diketahui dua per tiga dari 20 persen populasi termiskin dunia mengalami peningkatan pendapatan riil karena adanya akses terhadap pendidikan. Hal ini selaras dengan studi yang menemukan bahwa pendidikan adalah faktor utama dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Temuan tersebut senada dengan Becker yang mengemukakan gagasan bahwa pengembangan modal manusia (*human capital*), terutama melalui pendidikan, dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.¹⁹⁹ Sementara itu, Mincer menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pendapatan

¹⁹⁶ Edward L. Glaeser, Giacomo A. M. Ponzetto, Andrei Shleifer, "Why does Democracy Need Education?," *J Econ Growth*, 12 (2007): 77.

¹⁹⁷ Marcus Österman dan Darrel Robinson, "Educating Democrats or Autocrats? The Regime-Conditional Effect of Education on Support for Democracy," *Political Studies* 1–23 (2022): 4.

¹⁹⁸ Amory Gethin, "The Power of Education Policy," *Finance & Development*, Maret 2025, <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2025/03/the-power-of-education-policy-amory-gethin>.

¹⁹⁹ Gary S. Becker, *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (University of Chicago Press, 1993), 24.

yang lebih tinggi.²⁰⁰ Studi oleh Gregorio dan Lee mengonfirmasi bahwa disparitas dalam pendidikan, terutama dalam hal akses ke sekolah menengah dan tinggi, berkorelasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.²⁰¹

Oleh karena itu, menyediakan pendidikan berkualitas bagi masyarakat luas adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menjamin akses pendidikan berkualitas.²⁰² Piketty melihat isu akses pendidikan sebagai masalah ketidakadilan struktural, di mana individu dari keluarga kelas ekonomi tinggi memiliki kemampuan dan peluang ekonomi yang jauh lebih besar untuk menikmati pendidikan berkualitas.²⁰³ Bowles dan Gintis menyoroti bagaimana perbedaan kelas sosial menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya kesetaraan pendidikan dan ekonomi.²⁰⁴ Pada akhirnya, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan akan melanggengkan disparitas pendapatan dan memuskilkan mobilitas sosial, yang dapat menghambat konsolidasi demokrasi.²⁰⁵

Indonesia dalam konteks pendidikan telah menorehkan hasil yang cemerlang. Apabila dilihat dari tren akses dan partisipasi anak dalam pendidikan, tampak terjadi kenaikan signifikan. Hal ini berkaitan dengan sejarah panjang kebijakan intervensi pemerintah seperti program sekolah instruksi presiden (Inpres) yang meningkatkan jumlah sekolah dasar sampai ke pelosok Indonesia, program wajib belajar, dan bantuan keuangan yang disalurkan dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui sekolah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada orang tua tidak mampu, dan beragam kebijakan intervensi lainnya. Meskipun akses pendidikan meluas, Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan kualitas.²⁰⁶ Masalah ini tercermin dari tren terbalik antara indeks pembangunan manusia (*human development indeks/HDI*) dan skor PISA Indonesia terbaru.

²⁰⁰ Jacob Mincer, *Schooling, Experience, and Earnings* (Columbia University Press, 1974), 133.

²⁰¹ Jose De Gregorio dan Jong-Wha Lee, "Education and Income Inequality: New Evidence From Cross-Country Data," *Review of Income and Wealth*, 48: 403, <https://doi.org/10.1111/1475-4991.00060>

²⁰² Wawancara bersama Teguh Dartanto (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 25 Juni 2025).

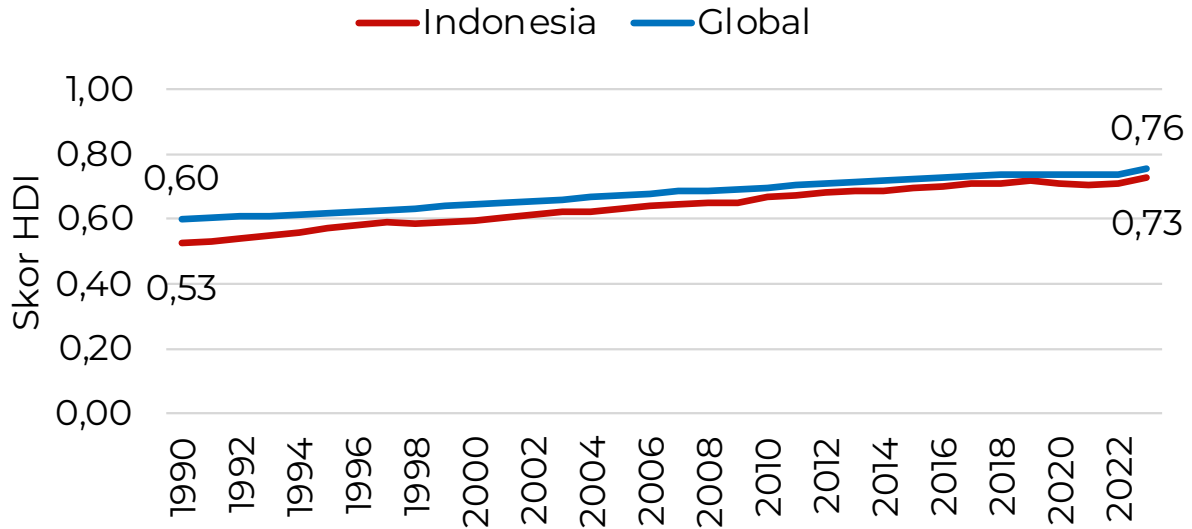
²⁰³ Thomas Piketty, *Capital in the twenty-first century* (Harvard University Press, 2014), 424.

²⁰⁴ Samuel Bowles dan Herbert Gintis, "Schooling in capitalist America revisited," *Sociology of Education* 75, no. 1 (2002): 2.

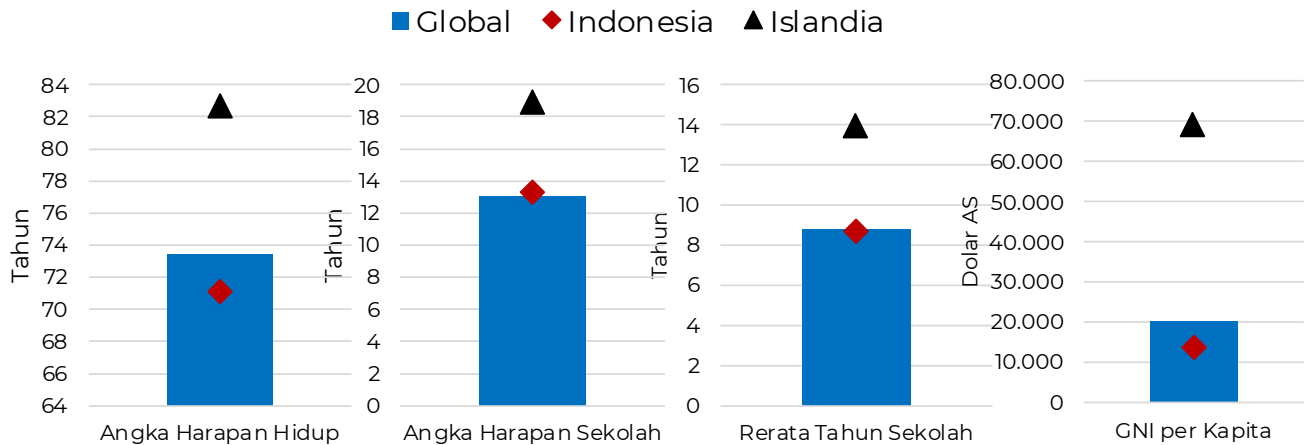
²⁰⁵ Jo Blanden et al., *Education Inequality*, CEP Discussion Paper No. 1849 (Centre for Economic Performance, April 2022), 25.

²⁰⁶ Zulfa Sakhiyya and Teguh Wijaya Mulya, "Introduction: Education in Indonesia - A Critical Introduction," dalam Zulfa Sakhiyya dan Teguh Wijaya Mulya, *Education in Indonesia: Critical; perspectives on Equity and Social Justice* (Springer, 2023), 3.

Bagan 24. Tren HDI Indonesia dan Global²⁰⁷



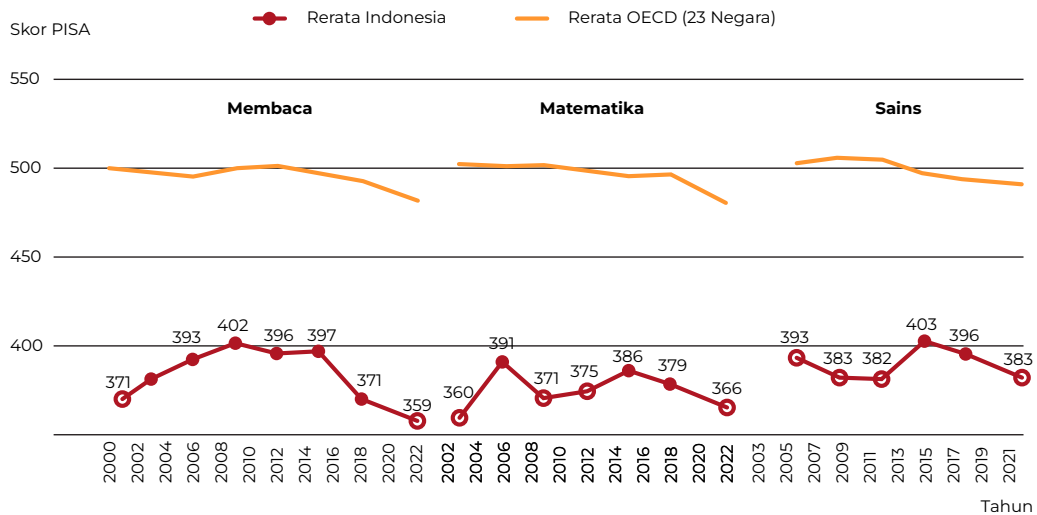
Bagan 25. Perbandingan Skor HDI Indonesia per Indikator (2023)



Dalam beberapa tahun terakhir nilai HDI Indonesia mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Kenaikan pada skor HDI pada dasarnya mencerminkan perbaikan kondisi SDM Indonesia dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Akan tetapi, bila dilihat dari indikator pembentuknya, HDI terbatas pada perbaikan akses dan belum menyentuh kualitas. Khusus untuk indikator pendidikan, skor PISA dapat menjadi acuan tingkat kualitas proses belajar siswa di sekolah. Skor PISA terbaru Indonesia menampilkan hasil yang bertolak belakang dengan HDI. Kemampuan literasi, matematika, dan sains pelajar Indonesia mengalami penurunan bahkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

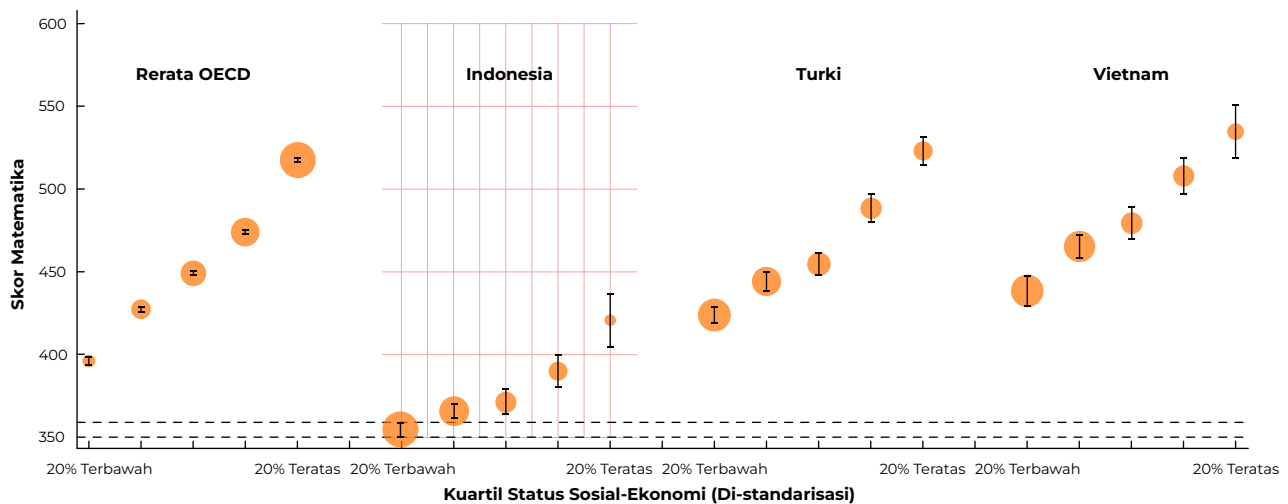
²⁰⁷ Diolah dari United Nations Development Programme, “Human Development Index (HDI)”, diakses 2 Agustus 2025, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>.

Bagan 26. Tren PISA Indonesia²⁰⁸



Pada saat dilakukan komparasi skor matematika berdasarkan status sosial-ekonomi, sebanyak 43 persen siswa Indonesia yang berada dalam status sosial-ekonomi terbawah memiliki rerata nilai jauh lebih rendah dibandingkan siswa dari Turki dan Vietnam dengan kelas sosial yang sama. Secara nasional juga ditemukan ketimpangan hasil rerata skor matematika antara siswa yang berada dalam 20 persen ekonomi terbawah dan 20 persen ekonomi teratas. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas di Indonesia. Ketika jurang besar ini tidak dapat dijembatani, maka berpotensi meningkatkan ketimpangan dan masalah sosial yang lebih besar, termasuk pelemahan demokrasi.

Bagan 27. Komparasi Rerata Skor Matematika Berdasarkan Status Sosial-Ekonomi²⁰⁹

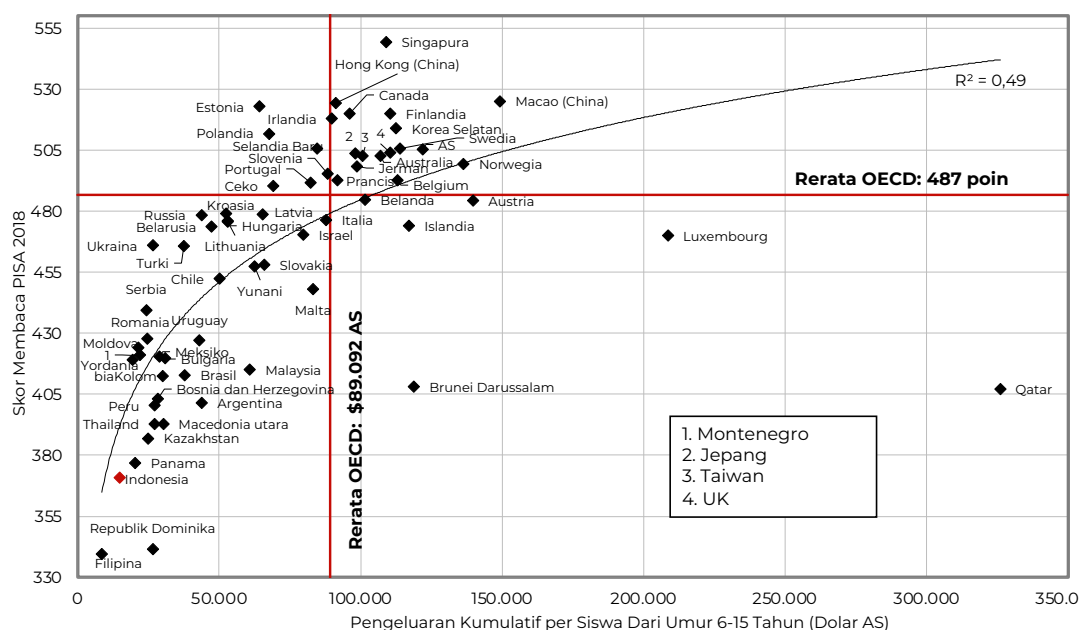


²⁰⁸ Diolah dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *PISA 2022 Results: Factsheets – Indonesia* (OECD, 2023), https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2022_CN_IDN.pdf.

²⁰⁹ OECD, *PISA 2022 Results: Factsheets – Indonesia* (OECD, 2023), 4.

Dalam laporan OECD mengenai efek kebijakan pendidikan terhadap produktivitas makroekonomi, dijelaskan bahwa faktor seperti belanja pendidikan dan kualitas guru memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan. Tanpa menafikan kompleksitas masalah pendidikan, bagian ini akan lebih menyoroti kebijakan anggaran pendidikan Indonesia dibandingkan faktor determinan lain. Fokus kepada anggaran dipilih karena berkaitan dengan fungsi anggaran itu sendiri sebagai simpul strategis yang menentukan sejauh mana negara mampu melakukan intervensi kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Bagan 28. Perbandingan Skor Kemampuan Membaca (PISA 2018) dan Rerata Anggaran Pendidikan per Siswa (Kumulatif)²¹⁰



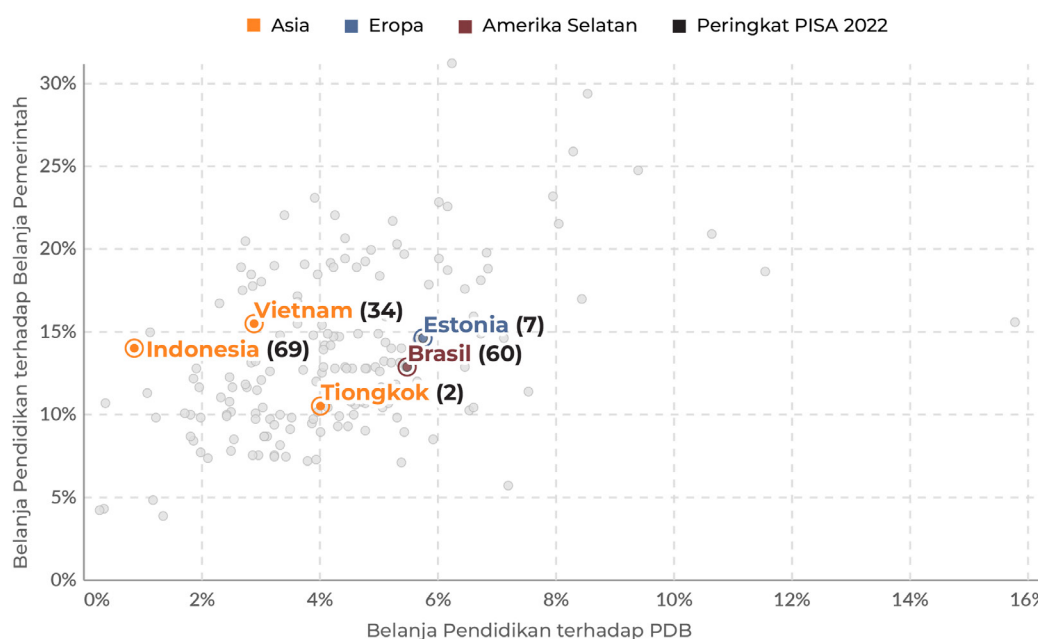
Studi OECD menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara besar anggaran pendidikan terhadap kualitas hasil belajar siswa (dilihat dari skor PISA). Artinya, negara yang mengalokasikan persentase anggaran pendidikan dari PDB yang besar cenderung mencatatkan skor PISA yang lebih baik. Dalam studi yang sama, OECD juga menegaskan bahwa efisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan sama pentingnya dengan besarnya anggaran itu sendiri. Bagan 22 menyajikan hubungan positif antara performa belajar siswa dan besar anggaran per siswa. Meskipun demikian tetap perlu digarisbawahi bahwa hasil studi ini tidak bersifat sebab-akibat, di mana anggaran tidak menjadi satu-satunya faktor penentu kualitas belajar siswa.²¹¹

²¹⁰ OECD, *PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do* (OECD Publishing, 2019), 66, <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>.

²¹¹ Pengalaman Estonia menunjukkan bahwa keunggulan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besar-kecilnya anggaran, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola dan diarahkan. Dengan kata lain, investasi pendidikan yang cerdas—yang berfokus pada kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, serta pemerataan akses—dapat menghasilkan capaian akademik yang tinggi meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Dilihat dari trennya, secara nominal anggaran pendidikan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, apabila dilihat proporsinya terhadap PDB, anggaran pendidikan Indonesia tergolong kecil. Negara seperti Vietnam, India, Tiongkok, dan Brasil menunjukkan proporsi anggaran yang lebih besar. Pada saat yang sama, negara-negara tersebut memiliki rerata skor PISA yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

Bagan 29. Perbandingan Anggaran Belanja Pendidikan Indonesia dengan Negara Lain²¹²



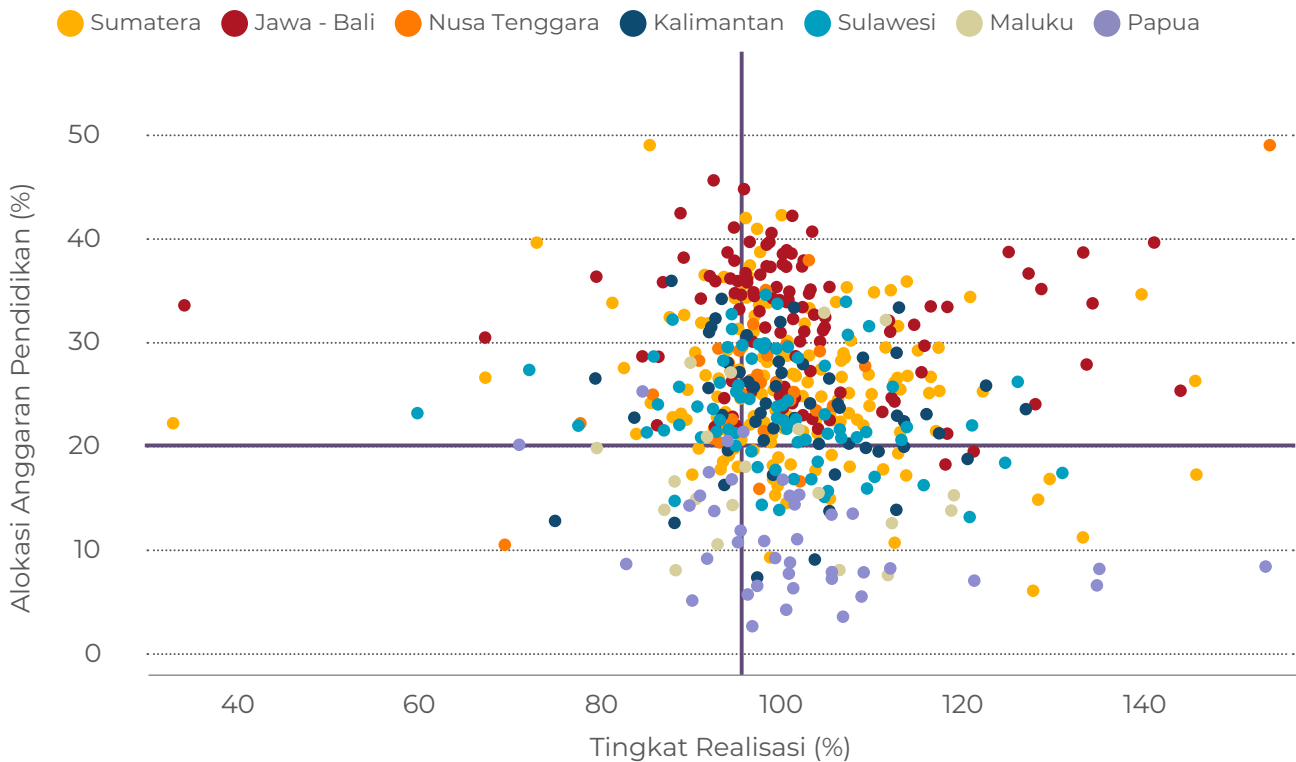
Selain memiliki keterbatasan dalam anggaran, Indonesia juga mengalami tantangan dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.²¹³ Laporan Bank Dunia tentang pelaksanaan anggaran pendidikan di tingkat daerah menunjukkan tidak semua kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia dapat memenuhi mandat alokasi 20 persen untuk anggaran pendidikan.²¹⁴ Sebanyak 22 persen atau 112 dari 508 kabupaten/kota dan 35 persen atau 12 dari 34 provinsi tidak memenuhi mandat tersebut. Dari total 388 kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran 20 persen hanya 70 persen yang dapat melakukan realisasi di atas 95 persen.

²¹² Our World in Data, "Share of Government Education Spending in GDP vs. Total Government Spending," diakses 20 Juli, 2025, <https://ourworldindata.org/grapher/share-edu-spending-gdp-vs-share-edu-total-spending>.

²¹³ Rythia Afkar, Javier Luque, Shinsaku Nomura, dan Jeffery Marshall, *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend their Money on Education* (World Bank, 2020), 42.

²¹⁴ Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memandatkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Serta, dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Bagan 30. Realisasi Anggaran Pendidikan per Kabupaten/Kota Tahun 2018²¹⁵



Selain itu, belanja pendidikan di tingkat kabupaten/kota masih didominasi oleh pembayaran gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), sehingga menyisakan ruang yang sangat terbatas bagi pembiayaan non-gaji. Padahal, anggaran non-gaji dibutuhkan untuk mendanai pelbagai program strategis seperti beasiswa, hibah tambahan untuk sekolah, pelatihan guru, dan kebutuhan operasional lainnya yang berkontribusi penting terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Keterbatasan pembiayaan non-gaji tercermin dari tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).²¹⁶ Sebagai contoh, studi Bank Dunia menunjukkan hanya 70 persen dari kabupaten yang memenuhi standar personel pengajar dan hanya 67 persen yang memenuhi standar implementasi kurikulum yang telah dicantumkan dalam SPM.²¹⁷

Menghadapi realitas inefisiensi dan inefektivitas pendanaan pendidikan, maka dapat dilakukan langkah-langkah strategis antara lain seperti, mengubah skema transfer nasional ke daerah yang lebih mencerminkan kebutuhan per siswa, sehingga dapat

²¹⁵ Diolah dari World Bank 2020. Laporan dapat dipelajari lebih lanjut melalui: Afkar et al., *Revealing How Indonesia's Subnational*, 42.

²¹⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota

²¹⁷ World Bank, *Improving Education Services in Indonesia* (World Bank, 2020), diakses 25 Juli, 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/611541588612447572/pdf/Main-Report.pdf>.

meningkatkan pembiayaan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan.²¹⁸ Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah terkait pengembangan kapasitas pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk di dalamnya menguatkan kapasitas ASN daerah untuk mengembangkan kebijakan berbasis data yang relevan dengan masalah pendidikan di masing-masing daerah. Pemerintah tingkat nasional dan daerah dapat menjadi mitra sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan ke daerah. Terakhir, perlu ada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dari penggunaan anggaran pendidikan dengan menguatkan sistem pengawasan dan evaluasi yang tepat.

Pendidikan Demokrasi

Demokrasi akan terbentuk dan bertahan apabila masyarakat secara sadar meyakini manfaatnya sebagai sebuah sistem politik. Alexis de Tocqueville mengatakan di dalam sistem demokrasi, generasi baru adalah orang baru, oleh karena itu demokrasi tidak akan bertahan di tengah ketidakpedulian.²¹⁹ Pernyataan Tocqueville tersebut hendak mengingatkan bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem politik bukanlah hal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, tetapi ia adalah sistem yang menuntut untuk diperjuangkan secara terus menerus. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk melahirkan demokrat baru yang siap menghadapi tantangan masa depan. Sayangnya, perkembangan ekonomi dan teknologi seolah membuat paradigma pendidikan semakin condong kepada kepentingan pasar.²²⁰ Menyiapkan siswa sebagai “mesin” ekonomi dan mengesampingkan kebutuhan untuk hidup bernegara dalam sistem demokrasi.²²¹ Oleh karena itu, pendidikan demokrasi harus menjadi kekuatan penyeimbang dalam pelaksanaan sistem pendidikan.

Di awal pembahasan mengenai pendidikan, telah disebut pendidikan sebagai ruang kontestasi ideologis yang harus dimenangkan. Sejarah pendidikan Indonesia semenjak kemerdekaan adalah ilustrasi bagaimana ideologi saling terbentur dan coba disisipkan ke dalam pikiran murid di sekolah. Pada masa demokrasi liberal, apabila mengacu kepada Undang-Undang No 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan, maka sistem pendidikan memiliki dua orientasi utama yakni nasionalisme sebagai penguatan identitas sebagai orang Indonesia dan demokrasi yang berkaitan dengan

²¹⁸ Apabila mengacu kepada rumus penghitungan DAU saat ini, maka akan ditemukan ketidakseimbangan anggaran Pendidikan per siswa. Sebagai contoh pada tahun 2018, Provinsi Jawa Barat memperoleh transfer anggaran Pendidikan sebesar Rp29 triliun dengan anggaran per siswa Rp4,4 juta. Sedangkan Provinsi Papua Barat memperoleh Rp3 triliun dengan anggaran per siswa Rp19 juta. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan anggaran pendidikan antara daerah. Untuk lebih lanjut hal ini dapat dipelajari melalui: World Bank, *Improving Education Services in Indonesia: The Role of Subnational Governments* (World Bank, 2020), diakses 26 Juli 2025, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/611541588612447572/pdf/Main-Report.pdf>.

²¹⁹ Bruno Aguilera-Barchet, “Educating for Democracy,” *European View* 12 (2013): 173.

²²⁰ Wawancara bersama Surjadi Basuki (Baginda Muda Bangsa et al., Wawancara Melalui Zoom, 21 Juli 2025).

²²¹ Sakhiyya dan Mulya, “Introduction,” 3.

semangat dan aspirasi mewujudkan masyarakat yang demokratis.²²² Pendidikan yang berorientasi kepada demokrasi tidak berhenti pada level abstraksi tetapi menjelma ke dalam strategi, metode, dan pembelajaran di kelas.²²³

Meskipun kebijakan pendidikan pada masa demokrasi liberal berhasil membuka pintu kesempatan bagi anak Indonesia untuk bersekolah, ia tidak lepas dari kritik. Dalam tulisan Suradi Hp, dikarenakan orientasi ideologis sistem pendidikan yang bertaut dengan realitas politik pada saat itu, pendidikan menjadi ruang pertenggaran ideologis partai politik.²²⁴ Selain itu, pelaksanaan pendidikan juga dianggap menyimpang dari semangat menuju masyarakat adil berdasarkan Pancasila, malah condong kepada liberalisme Barat.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pendidikan dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat Sosialis Indonesia. Soekarno menjadikan Manipol/USDEK²²⁵ sebagai doktrin ideologis dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Ideologi yang menjelma menjadi kompas pendidikan tercantum dalam Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tertanggal 17 Agustus 1961.²²⁶ Instruksi menteri tersebut berisi lima prinsip pelaksanaan pendidikan yang dikenal sebagai Panca Wardhana, dengan salah satu prinsipnya adalah perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/ keagamaan. Pengejawantahan dari prinsip pertama dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Pada pelajaran inilah Manipol/USDEK diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah.

Pada Orde Baru, orientasi pendidikan sangat menekankan kepada kepatuhan terhadap negara. Hal ini didorong oleh target pertumbuhan ekonomi yang dibalut

²²² Pada bagian penjelasan umum dari UU No. 4/1950 tentang pendidikan dasar, poin 10, disebutkan: Sifat yang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak yang dididik di sekolah-sekolah secara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga cara memberi pendidikan. Pendidikan yang dicitacitakan bukan supaya kanak-kanak bertindak lahir dan batin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita ini tercapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam juga keinsyafan pada anak-anak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnya kemerdekaan dan dari mana mulainya anarchie harus ditanam pada kanak-kanak.

²²³ Edi Subhkan, "Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965)", *Journal of Indonesia History* 7(1), (2018):24.

²²⁴ Suradi Hp et al., *Sejarah Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), 46.

²²⁵ Istilah Manifesto Politik (Manipol) dikenalkan pascapidato Soekarno pada 17 Agustus 1945 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato tersebut singkatnya adalah gagasan Soekarno untuk mencari alternatif dari sistem politik yang lebih sesuai dengan Indonesia, yakni "Demokrasi Terpimpin". Pada tahun 1960an istilah Manipol berubah menjadi Manipol/USDEK. Kata USDEK merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

²²⁶ Subkhan, "Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965)," 28.

dalam ideologi Pembangunan.²²⁷ Kurikulum disusun dengan cara pandang *link and match* antara lembaga pendidikan dan pasar. Barbara Leigh menuliskan bahwa pembangunanisme yang menjadi penjuror dari pelaksanaan pendidikan Orde Baru telah mengorbankan pengembangan siswa yang dapat berpikir kritis dan reflektif dengan capaian ekonomi.²²⁸

Di luar ruang belajar formal, buku dan tulisan kritis, terutama yang berbau “Kiri” dilarang beredar, diskusi tentang teks-teks tersebut juga dibubarkan. Para intelektual dan jurnalis kritis kerap menghadapi intimidasi, ancaman pembunuhan, pemenjaraan, hingga kekerasan fisik. Pemikiran yang bebas dianggap sebagai ancaman oleh Orde Baru karena berpotensi membongkar persoalan sosial dan politik yang coba ditutup rapat-rapat.

Masuk pada era reformasi, pertentangan ideologis tidak lagi terjadi seperti era sebelumnya. Kesan indoktrinasi kontrol negara pun tidak terasa seperti pada Orde Baru. Namun demikian, apabila perlu menilai, maka bisa dikatakan bahwa kepentingan pasar menjadi “ideologi” dominan dalam pendidikan Indonesia saat ini.²²⁹ Mata Pelajaran yang dapat menjadi ruang untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan sejarah hanya mendapatkan ruang kecil di dalam kurikulum pendidikan .

Kofi Annan mengatakan “No One is born a good citizen, no nation is a born democracy”, oleh karena itu, demokrasi harus diperjuangkan tanpa kenal lelah. Indonesia dalam hal ini perlu mengambil langkah serius untuk menyiapkan pendidikan demokrasi yang lebih baik. Kerangka pikir dari David Campbell mengenai pengaruh pendidikan terhadap penguatan partisipasi sipil dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam melaksanakan pendidikan demokrasi.

²²⁷ Edi Subkhan, “Vocationalizing Education: The Dangers of Link-And-Match Paradigm for the Students’ Future”, dalam Zulfa Sakhiyya dan Teguh Wijaya Mulya, *Education in Indonesia: Critical; perspectives on Equity and Social Justice*, Springer (2023): 76.

²²⁸ Barbara Leigh, “Learning and Knowing Boundaries: Schooling in New Order Indonesia,” *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 14, No. 1 (April 1999): 52.

²²⁹ Edi Subkhan, “Vocationalizing Education: The Dangers of Link-And-Match Paradigm for the Students’ Future”: 79.

Tabel 6. Transmisi Pendidikan terhadap Partisipasi Sipil²³⁰

Transmisi	Ringkasan
Keterampilan Sosial Emosional	Sekolah adalah tempat penting untuk mempelajari keterampilan sosial-emosional yang dibutuhkan untuk kehidupan kewargaan seperti komunikasi, debat, pengambilan keputusan, dan organisasi
Kapasitas kognitif	Pendidikan formal meningkatkan praktik dan keterampilan kognitif penting seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Selain itu, dapat menguatkan literasi digital dan media siswa
Kurikulum	Pembelajaran tentang partisipasi sipil dapat terintegrasi langsung dalam kurikulum, contohnya melalui pelajaran kewarganegaraan di mana siswa belajar tentang topik seperti politik, sejarah, dan pemilu
Metode pedagogis	Metode pedagogis, seperti dialog dan debat di kelas mengenai topik yang “sulit” dapat mendorong partisipasi sipil
Organisasi Kesiswaan	Studi menunjukkan bahwa terlibat di dalam organisasi kesiswaan berdampak positif terhadap keterlibatan politik pada masa depan
Kegiatan ekstrakurikuler	Keterlibatan dalam ekstrakurikuler pada tingkat menengah atas berpengaruh terhadap keterlibatan dalam berorganisasi saat dewasa
Kerelawanan	Melakukan kegiatan kerelawanan baik di sekolah atau di luar sekolah dapat meningkatkan partisipasi sipil siswa saat dewasa. Ketika dilakukan dalam lingkup sekolah, dampaknya akan lebih efektif ketika dilakukan refleksi atas kegiatan kerelawanan tersebut
Kompetensi global	Kompetensi global merujuk pada kemampuan siswa untuk berinteraksi dan terlibat dengan orang dari latar belakang berbeda, menelaah informasi secara kritis, dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap isu global dan lokal

Merefleksikan apa yang disebutkan oleh Campbell, Indonesia pada hakikatnya telah memiliki filosofi nasional—merujuk kepada pemikiran Ki Hadjar Dewantara—dan perangkat struktural untuk mengajarkan pendidikan demokrasi di sekolah. Hal ini tercermin dari keberadaan mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), PKn, dan sejarah yang secara eksplisit memuat materi kewarganegaraan. Akan tetapi, desain kurikulum yang ada masih terkesan cenderung menekankan pada penghafalan konsep dan peristiwa sejarah ketimbang pemaknaan dan refleksi kritis. Padahal, seperti disarankan oleh Maiello, Oser, dan Biederman serta Bachner, integrasi pendidikan kewarganegaraan yang bermakna ke dalam kurikulum sangat krusial untuk membentuk keterampilan sipil (*civic skills*) peserta didik.²³¹

D. Sunshine Hillygus dan John B. Holbein menekankan bahwa perlu ada upaya untuk mengubah pedagogi pendidikan demokrasi yang lebih menekankan kepada penajaman kecerdasan sosial dan emosional siswa, ketimbang hanya melatih

²³⁰ Diadaptasi berdasarkan Richard Dejustin et al., “Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement: Proceedings from the Copenhagen Symposium,” *UCLA* (2006) Retrieved from <https://escholarship.org/uc/item/6h84705f>, 75.

²³¹ Hannah Borhan, “Civic education as a pathway to inclusive societies: Exploring the role of education in fostering civic and social engagement,” Working Papers 326 (OECD Education, 2012), 21, <https://dx.doi.org/10.1787/3f128be8-en>.

kemampuan kognitif.²³² Untuk itu, guru dapat menggunakan *project based learning* untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Kemudian, melibatkan siswa dengan perdebatan, isu, dan gerakan politik yang sedang berlangsung. Terakhir, guru harus memastikan bahwa siswa dapat memahami cara-cara melakukan partisipasi politik.

Pedagogi yang menekankan kepada pengalaman siswa berdemokrasi menjadi kunci dalam pendidikan demokrasi itu sendiri. Karena hanya dengan melakukan langsung siswa dapat memami prinsip-prinsip demokrasi.²³³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Aristotle bahwa berdemokrasi bukan hal yang dilakukan secara alamiah oleh manusia layaknya mendengar dan bernafas, tetapi ia seperti kerajinan yang perlu dilatih dan diasah secara langsung. *“Thus, by building we become builders, and by playing on the harp, we become harpers. Thus too, by acting justly we become just, prudent by acting prudently, and brave by acting bravely.”* Dengan kata lain, hanya dengan bertindak demokratis, maka seseorang itu menjadi demokrat.

Di sisi lain, tantangan utama juga terletak pada kapasitas guru dalam menerjemahkan rancangan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang demokratis. Kerap kali guru masih mengandalkan pendekatan instruksional yang menekankan hafalan dan penyeragaman, alih-alih mendorong dialog kritis dan partisipasi aktif siswa. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah telah melakukan sejumlah upaya. Salah satu kebijakan terbaru adalah program *Merdeka Belajar* dan pengembangan Kurikulum Merdeka, yang bertujuan memberi keleluasaan bagi guru dalam menyusun metode dan materi ajar yang kontekstual dan berpihak pada peserta didik.

Di samping itu, pelatihan dan platform pengembangan profesional guru juga mulai digiatkan untuk memperkuat kapasitas pedagogis mereka. Namun demikian, implementasi reformasi ini belum menunjukkan hasil yang merata dan maksimal di berbagai daerah. Banyak guru masih menghadapi keterbatasan sumber daya, waktu, dan dukungan kelembagaan untuk benar-benar mengadopsi pendekatan pembelajaran yang partisipasi dan reflektif.

²³² D. Sunshine Hillygus dan John B. Holbein, “Refocusing Civic Education: Developing the Skills Young People Need to Engage in Democracy,” *ANNALS, AAPSS*, 705 (Januari 2023): 86.

Penekanan kepada kemampuan non-kognitif bukan untuk mengatakan bahwa Pendidikan demokrasi tidak mengembangkan kecerdasan kognitif, tetapi ingin menunjukkan bahwa ada aspek kecerdasan lain yang tidak tepat untuk diukur melalui ujian kognitif seperti mata pelajaran matematika.

²³³ Johannes Kiess, “Learning by doing: The impact of experiencing democracy in education on political trust and participation,” *Politics*, 42, no. 1 (2022): 77, DOI: 10.1177/0263395721990287.

Penutup

Semenjak diperdebatkan secara akademik pada medio 1970an sampai dengan saat ini, bisa dibilang pandangan tentang peran kelas menengah Indonesia terhadap demokrasi tidak pernah konklusif. Ada kelompok yang pesimistis dan ragu dengan peran dan kapasitas kelas menengah mampu untuk menjadi pelindung demokrasi. Beberapa menganggap bahwa karakter “menengah” dari kelas menengah Indonesia hanya tercermin dari gaya hidupnya yang konsumtif dan hedonistik. Sementara secara politik mereka apatis dan sibuk dengan kepentingan sendiri. Meski demikian, tetap ada pandangan optimis yang masih menggantungkan harapan kepada kelas menengah dalam upaya menguatkan demokrasi, terutama kepada kelompok kelas menengah kritis seperti cendekiawan, mahasiswa, media, dan ornop.

Penelusuran sejarah demokratisasi Indonesia yang dilakukan dalam monograf ini menemukan bahwa Indonesia, sejak pertama kali berdiri tidak pernah memiliki kelas menengah kritis yang besar. Akan tetapi, pada setiap periode atau generasi selalu dapat ditemukan kekuatan prodemokrasi. Selama periode otoritarianisme Indonesia, kelas menengah kritis tetap tumbuh, meskipun jumlahnya sedikit. Dengan membangun jejaring yang luas—antara sesama mereka, kelompok pekerja, petani, perempuan, dan kelompok termarginalkan—mereka menjadi lokomotif demokrasi dengan gerbang yang panjang dan penuh.

Dari sejarah transisi demokrasi, kekuatan utama kelas menengah kritis bukan hanya terletak dari ekonominya yang otonom dan daya pikir mereka, tetapi kapasitas untuk menjalin relasi dan menyambungkan simpul-simpul perlawanan yang ada. Hal inilah yang dilakukan oleh para cendekiawan, mahasiswa, dan ornop di Indonesia, yakni menjalin basis demokrasi dengan konstituen yang luas. Hal serupa juga harus diperkuat oleh kelas menengah kritis Indonesia pascareformasi.

Saat ini, seolah mengulang perdebatan kelas menengah masa lalu, keraguan terhadap kapasitas mendukung demokrasi juga disematkan kepada Gen Z Indonesia, dengan anggapan bahwa generasi ini tidak memiliki daya juang dan sibuk dengan dunianya sendiri. Monograf ini memegang pendapat yang berseberangan. Gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa api perlawanan tidak padam dan demokrasi masih diperjuangkan. Saat ini, kelompok prodemokrasi mungkin relatif kecil, tetapi masih bisa dan akan membesar. Sejarah perjuangan demokrasi Indonesia adalah bukti.

Menuju skenario konsolidasi demokrasi pada tahun 2045, jumlah kelas menengah kritis Gen Z dan generasi setelahnya harus diperkuat untuk menciptakan kelas menengah dengan kemandirian ekonomi yang secara aktif melakukan partisipasi sipil. Penguatan tersebut secara garis besar dapat diarahkan melalui dua saluran:

1. Menjamin pekerjaan berkualitas yang berasal dari sektor privat. Kebijakan publik perlu diarahkan untuk meningkatkan pekerjaan formal, baik melalui kemudahan

legalisasi serta efisiensi membangun usaha maupun rancangan insentif pajak bagi pelaku usaha kecil (sektor informal) yang bertransformasi menjadi sektor formal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya mendorong keterbukaan guna meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Deregulasi menjadi salah satu instrumen kunci untuk mendorong pengembangan sektor unggulan—yakni sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif—melalui kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta (*public private partnership*). Salah satu langkah konkretnya adalah menyederhanakan kewajiban TKDN yang kerap kali menimbulkan rigiditas dalam mendorong ekspor industri bernilai tambah.

Pada saat yang bersamaan, simplifikasi peran pemerintah pusat melalui desentralisasi menjadi penting sebagai bagian dari strategi mendorong investasi, baik dari FDI maupun DDI. Dengan otonomi dan keleluasaan regulatif yang tetap selaras dengan koridor kebijakan nasional, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan insentif yang lebih adaptif terhadap karakteristik ekonomi lokal maupun responsif terhadap kebutuhan investor. Penguatan peran swasta yang diejawantahkan melalui arus investasi ini mampu mempercepat agenda industrialisasi, yang pada gilirannya berdampak pada penyerapan tenaga kerja industri lebih luas.

2. Mewujudkan pendidikan integral, di mana pendidikan tidak hanya membekali siswa sebagai calon pekerja yang terampil, tapi juga bernalar kritis dan memegang nilai demokrasi menjadi saluran penting kedua. Indonesia harus menjamin akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi kembali efektivitas dan efisiensi dari anggaran pendidikan agar lebih terarah untuk mendukung hasil belajar yang lebih berkualitas.

Di sisi lain, dominasi logika pasar di dalam penyelenggaraan pendidikan harus diseimbangkan. Pendidikan demokrasi harus secara sadar diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran, tidak sekadar menjadi aksesoris. Nilai-nilai demokrasi tidak akan tumbuh jika diletakkan di pinggiran ruang kelas. Ia harus berada di depan dan diberikan ruang yang lebih besar karena pada hakikatnya, pendidikan tidak netral. Ia bersifat ideologis.

Selain kemandirian ekonomi dan pendidikan integral, kebebasan berekspresi kelas menengah kritis harus dijamin melalui perlindungan hukum yang efektif, sehingga tidak ada ketakutan dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang memiliki celah kriminalisasi seperti UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)—yang tengah direvisi—perlu dikawal agar tidak menjadi instrumen pembungkaman. Pada saat yang sama, penting untuk membangun jejaring prodemokrasi lintas generasi dan kelas sosial. Gen Z dan generasi baru perlu bersinergi dengan aktivis senior, sekaligus menjangkau masyarakat akar rumput, guna menciptakan simpul prodemokrasi yang inklusif, solid, dan tidak terfragmentasi.

Lampiran: Rekomendasi Para Ahli

Tim penulis berterima kasih atas masukan dari Teguh Dartanto dan I Dewa Gede Karma Wisana yang telah membantu dalam penyempurnaan monograf ini. Tim Penulis telah mengakomodasi sebagian rekomendasi yang disampaikan pada proses Mitra Bestari. Namun demikian, atas keterbatasan penulisan terdapat pula rekomendasi yang masih belum mampu diakomodir. Akan tetapi, Tim Penulis menilai bahwa masukan yang diterima penting untuk menambah referensi bagi khasanah penelitian ke depan. Di bawah ini merupakan rangkuman Tim Penulis atas catatan-catatan penting yang diberikan oleh para ahli.

Teguh Dartanto mencatat bahwa rumusan masalah dalam monograf perlu difokuskan secara konseptual agar maksud pembahasan tersampaikan dengan jelas. Pada kajian yang menggunakan pendekatan telaah historis dan wawancara mendalam, perlu dijelaskan secara rinci mengenai proses pengolahan dan pengodean transkrip wawancara untuk meningkatkan kredibilitas metodologis serta memperkuat validitas temuan. Teguh turut menekankan pentingnya menjaga koherensi antarbahasan dengan memastikan benang merah dari satu bahasan mengalir ke bahasan berikutnya melalui transisi yang berpijak pada refleksi konseptual yang kuat. Selain itu, lensa analisis 'Kelas Menengah Kritis' yang telah didefinisikan dalam monograf perlu dijaga secara konsisten di sepanjang pembahasan.

Selanjutnya, Teguh memberi catatan bahwa penyusunan skenario ke depan perlu didasarkan pada penalaran sistematis yang berangkat dari benang merah analisis historis, supaya memperjelas landasan serta sintesis tiap skenario. Pada setiap skenario, Teguh mendorong eksplorasi peran dan relasi antaraktor institusional – negara, kelas menengah, masyarakat sipil, media, dan partai politik – dengan ilustrasi konkret agar skenario yang diuraikan terefleksi dengan baik. Teguh juga menyarankan bahwa setiap skenario perlu memuat perkembangan karakter kelas menengah, relasinya terhadap negara, serta implikasinya terhadap demokrasi, sehingga pembaca dapat memahami konsep kelas menengah secara komprehensif.

Terakhir, Teguh menyarankan bahwa rekomendasi yang disajikan perlu diterjemahkan menjadi strategi implementatif yang terukur. Beberapa contoh intervensi kebijakan yang disarankan adalah reformasi kurikulum kewarganegaraan di tingkat sekolah menengah, pemberian insentif pajak bagi sektor informal yang bertransformasi menjadi formal, serta program literasi digital-politik untuk generasi muda. Rekomendasi ini dapat diperkaya dengan merujuk pada praktik baik di Korea Selatan, sebagai acuan penguatan partisipasi warga negara melalui *civic education* yang transformatif.

I Dewa Gede Karma Wisana memberikan masukan agar rumusan masalah dalam monograf disusun secara lebih eksplisit untuk memperjelas arah analisis. Pada bagian kerangka metodologis, ia menekankan perlunya uraian spesifik mengenai metode

penulisan eksploratif-deskriptif berbasis pendekatan historis dan reflektif kritis. Ia juga mengingatkan pentingnya mencantumkan keterbatasan metodologis, seperti belum digunakannya data primer atau tidak dilakukannya observasi lapangan, sebagai bentuk transparansi ilmiah. Lebih lanjut, Dewa menyarankan agar monograf memasukan referensi data kuantitatif terbaru yang relevan, khususnya terkait partisipasi digital anak muda yang dapat ditinjau dari berbagai survei nasional seperti LSI, CSIS, SMRC. Temuan empiris pascapandemi Covid-19 juga dinilai menarik untuk menyoroti perubahan preferensi politik dan pola aktivisme anak muda. Pada aspek koherensi, ia mengingatkan perlunya narasi penghubung antarbagian agar kesinambungan analisis lebih kuat.

Pada bagian pembahasan, Dewa menyarankan agar kelas menengah dilihat dari dua spektrum. Pertama, perlu menambahkan perbandingan peran kelas menengah di setiap periodisasi, dengan menekankan bagaimana relasi kuasa dan dinamika ekonomi membentuk orientasi serta posisi politik mereka. Kedua, memperkaya perspektif melalui pembahasan komparatif atas pengalaman kelas menengah di negara-negara Asia lainnya.

Lebih lanjut, Dewa menilai bahwa transisi dari pembahasan historis menuju proyeksi melalui peran Generasi Z sebagai aktor demokrasi masa depan perlu diawali dengan pengantar yang menggarisbawahi pergeseran konteks struktural dan kultural pascareformasi. Dalam membahas Generasi Z, fokus analisis diarahkan pada keterkaitannya dengan struktur kelas dan kesadaran politik, sehingga tidak sekadar deskriptif. Pada bagian akhir pembahasan, Dewa menyarankan penambahan ringkasan yang secara eksplisit menegaskan potensi kelas menengah sebagai kekuatan pendorong demokrasi, sekaligus mengakui kecenderungan mereka yang terserap dalam logika pasar serta mengalami depolitisasi melalui budaya digital. Kondisi tersebut perlu dikaitkan dengan tren erosi demokrasi yang menggeser budaya partisipasi politik kolektif menuju individualistik.

Pada bagian kesimpulan, Dewa menyarankan agar monograf tidak hanya menutup dengan rangkuman temuan, tetapi juga menyertakan rekomendasi kebijakan ataupun refleksi strategis. Beberapa gagasan yang diajukan di antaranya penguatan pendidikan kewarganegaraan, pembentukan organisasi kelas menengah yang berdaya secara politik, revitalisasi gerakan sosial, serta perluasan ruang publik digital dan fisik sebagai fondasi bagi partisipasi demokratis yang lebih kokoh.

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.



📍 Jalan Mabas Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890

📧 lab45@lab45.id

☎ +62811452045

🌐 www.lab45.id

